ISBN 978-602-278-061-8
9 786022 780618

SYAMSUN NI'AM
IMAM FUADI
MUHAMMAD RIDHO

Pancasila Vis A Vis Islam

SYAMSUN NI'AM
IMAM FUADI
MUHAMMAD RIDHO

PANCASILA vis a vis ISLAM

Pandangan Tokoh Muslim terhadap Upaya De-Ideologisasi Pancasila dan Implikasinya dalam kehidupan Kebangsaan di Indonesia

KURNIA KALAM SEMESTA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG
TAHUN 2018

PANCASILA VIS A VIS ISLAM

Pandangan Tokoh Muslim terhadap Upaya De-Ideologisasi Pancasila dan Implikasinya dalam Kehidupan Kebangsaan di Indonesia

Disusun Oleh:

Syamsun Ni'am
Imam Fuadi
Muhammad Ridho

KURNIA KALAM SEMESTA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG
TAHUN 2018

Judul
PANCASILA VIS A VIS ISLAM
Pandangan Tokoh Muslim terhadap Upaya De-Ideologisasi Pancasila dan Implikasinya dalam Kehidupan Kebangsaan di Indonesia

Penulis
Syamsun Ni'am
Imam Fu'adi
Muhammad Ridho

Cetakan I, 2018

ISBN : 978-602-278-061-8

Diterbitkan oleh:
Kurnia Kalam Semesta &
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Hak Cipta 2018 pada Penulis
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copy, tanpa izin sah dari penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, kami dapat menyelesaikan laporan penelitian BOPTN ini sesuai dengan rencana dan *schedule* yang telah ditentukan. Shalawat dan Salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia menjalankan ajaran dan misi profetisnya.

Penelitian/kajian ilmiah merupakan tidak hanya tuntutan namun barangkali merupakan kewajiban bagi setiap akademisi untk melakukannya. Sebab satu tugas berat seorang intelektual adalah responsi dan pandangannya terhadap isu-isu menyangkut problem yang dihadapi oleh suatu masyarakat dan bangsanya. Beban berat seorang tokoh, intelektual, dan mungkin juga akademisi adalah dapatnya mengurai benang kusut dari berbagai problem yang muncul ke permukaan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh cuek begitu saja terhadap hingar-bingarnya kehidupan ini. Dengan cara menulis, mengkaji, dan meneliti, maka satu beban yang barangkali menjadi sebuah tuntutan dan bahkan mungkin kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka. Di sinilah urgensi dan signifikansi penulisan buku ini dilakukan. Kami satu tim peneliti merasa lega karena satu beban berat sebagai akademisi menjadi terkurangi dengan selesainya penelitian ini.

Laporan penelitian dengan judul **"PANCASILA *VIS A VIS* ISLAM (Pandangan Tokoh Muslim terhadap Upaya DeIdeologisasi Pancasila dan Implikasinya dalam kehidupan Kebangsaan di Indonesia)"** ini dapat diselesaikan karena adanya partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti tidak akan melupakan bantuan dari berbagai pihak, antara lain: Kepala LP2M, Kepala Pusat Penelitiannya, dan seluruh kru LP2M IAIN Tulungagung, dan berbagai pihak baik yang berupa masukan-masukan akademisnya dan bantuan berupa teknisnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. *Jazakumullah ahsan al-jaza`*.

Tiada gading yang tidak retak, inilah yang patut kami sampaikan untuk mengakhiri kata pengantar kami, karena kami merasa hasil penelitian ini belumlah disebut sempurna, pasti masih ada kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kami membutuhkan saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan penelitian/kajian berikutnya. Akhirnya kami menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak. Semoga Allah SWT selalu meridlai langkah kita semua. *Amin.*

Tulungagung, 20 September 2018
Penulis,

Syamsun Ni'am
Imam Fuadi
Muhammad Ridho

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

C. Tujuan Penelitian 6

D. Target Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu 7

BAB II KAJIAN TEORITIK ISLAM VIS A VIS PANCASILA 10

A. Piagam Madinah; Sumber Inspiratif Hubungan Dialektis Pancasila dan Islam 10

B. Dinamika Pembentukan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa 23

C. Islam dan Pancasila Era-Orde Baru 32

D. Islam dan Pancasila Di Era-Reformasi 41

E. Fenomena Gerakan De-Ideologisasi Pancasila Di Indonesia 52

BAB III METODE PENELITIAN 65

A. Sumber Data 65

B. Teknik Pengumpulan Data 66

C. Analisis Data 66
D. Pendekatan 67
E. Sistimatika Pembahasan 67

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 69
A. Pandangan Tokoh Muslim Indonesia Tentang Hubungan Pancasila dan Islam, dan Upayanya dalam Membendung De-Ideologisasi Pancasila ... 69
1. K.h. Achmad Siddiq 69
2. K.h. Abdurrahman Wahid 88
3. Prof. Dr. Harun Nasution 103
4. Prof. Dr. Nurcholish Madjid 116
B. Implikasi Dari Pandangan Tokoh Muslim Indonesia Tentang Hubungan Pancasila dan Islam Terhadap Kehidupan Kebangsaan 127

BAB V PENUTUP 143
A. Kesimpulan 143
B. Rekomendasi 144

Daftar Pustaka 147

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dan diusulkan berdasarkan kepada suatu pertimbangan atas kegelisahan berbagai kalangan terhadap munculnya beberapa gerakan —baik secara laten atau terang-terangan — dari sebagian kelompok kecil di negeri ini yang ingin mempermasalahkan, bahkan menggugat tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi (de-Ideologisasi) dan *common platform* bangsa Indonesia. Di samping itu, juga munculnya fenomena berbagai krisis kemanusiaan dan pemahaman keberagamaan yang melanda berbagai belahan dunia, tidak hanya terjadi di Timur Tengah yang dianggap sebagai pusat peri-peri Islam, namun juga di dunia Barat/Eropa. Krisis tersebut secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada situasi dan kondisi di Indonesia, baik menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi, agama, maupun politik. Hal tersebut terjadi paling tidak dikarenakan empat persoalan mendasar. *Pertama,* adanya perkembangan yang begitu cepat sebagai akibat dari arus informasi seiring dengan cepatnya arus globalisasi dan modernisasi di segala bidang yang melanda seluruh dunia. Sebagai akibatnya, munculnya gaya dan pola hidup yang serba praktis-pragmatis, materialistis, konsumeristis, dan individualistis, yang membawa kepada hilangnya jati diri manusia sebagai makhluk yang mestinya harus

berhubungan secara normal dan natural baik secara individu maupun sosial. *Kedua,* jargon demokrasi yang selama ini menjadi ruh dan semangat berkebangsaan juga mulai memudar seiring dengan perkembangan interpretasi yang disalahartikan, sehingga berakibat munculnya disharmoni dan disstabilisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Demokrasi yang awalnya memiliki misi suci, yaitu ingin menegakkan supremasi di berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi misi demokrasi itu justru memunculkan ketidakadilan, keserakahan, dan kesewenang-wenangan dari yang kuat baik secara modal maupun politik, terhadap yang lemah secara ekonomi dan politik. *Ketiga,* munculnya radikalisasi atas nama agama di berbagai belahan dunia —termasuk di Indonesia—, juga dianggap sebagai pemicu terhadap lunturnya nilai-nilai dan prinsip demokrasi itu sendiri. Padahal dalam kajian-kajian yang telah lalu, demokrasi tidaklah bertentangan dengan agama (Islam), bahkan bisa berjalan seirama dengan Islam. Hal ini terjadi sebagai akibat dari disorientasi pemahaman agama yang tidak komprehensip, di samping juga problem global yang melanda hampir di semua belahan dunia; sehingga berakibat kepada munculnya gerakan (aksi) yang kontras dengan nurani manusia pada umumnya.

Keempat, dalam konteks Indonesia, munculnya sebagian kecil kelompok yang mempersoalkan kembali tentang dasar Negara, Pancasila sebagai *common platform* dan ideologi bangsa sebagai akibat dari pemahamannya yang tidak integratif dan komprehensip dalam konteks ke-Indonesiaan, sehingga konsekuensinya adalah adanya pemaksaan untuk merumuskan kembali bahkan sudah mengarah kepada penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya (de-ideologisasi). Misalnya yang baru-baru ini muncul, yaitu pemaknaan dan pemaksaan —dari HTI (Hitbuz Tahrir Indonesia) dan sebagian lain yang sepaham dengannya— tentang ideologi Pancasila yang dianggap sebagai produk demokrasi dan tidak sejalan dengan Islam. Oleh karena itu, demokrasi dan

Pancasila dianggap sebagai produk *thaghut* (kafir). Inilah yang kemudian menjadi pemicu terhadap kegelisahan sebagian besar (mayoritas) masyarakat Indonesia, di mana sejak awal berdirinya Republik Indonesia ini, dan Pancasila telah dipilih sebagai ideologi dan *common platform* adalah keputusan final bersama *founding fathers* dan seluruh rakyat Indonesia, namun saat ini justru ada pihak-pihak yang ingin mengotak-atik kembali. Hal ini dianggap tidak realistis dan mengada-ada. Dalam konteks ini, maka segala upaya untuk membendung pemaknaan dan pemaksaan yang melanggar konstitusi ini harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa – termasuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 tahun 2017 tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila beberapa waktu lalu, kiranya patut diapresiasi sebagai langkah konkrit dan antisipatif terhadap upayade-ideologi Pancasila. Sebab sudah bukan rahasia lagi bahwa kebijakan tersebut sebelumnya tidak/ belum secara tegas melarang suatu organisasi apapun bentuknya yang telah nyata-nyata melanggar dan merongrong Pancasila sebagai ideologi bangsa. Saat ini menjadi momen yang paling tepat untuk merespon dan mengcounter terhadap segala upaya pengkhianat ideologi bangsa sebelum rongrongan itu menjadi meluas dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Penelitian ini menemukan momentumnya di saat bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada disintegrasi pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI dan berideologikan Pancasila. Di samping itu, upaya de-ideologisasi Pancasila terus digelindingkan oleh pihak-pihak tertentu seiring dengan bebasnya penyebaran berita, khususnya melalui media sosial. Kajian/penelitian tentang tokoh-tokoh Muslim Indonesia dan pemikirannya terhadap Pancasila vis a vis Islam, kiranya sangat relevan jika dihubungkan dengan

situasi kebangsaan Indonesia saat ini, sebab tidak sedikit para tokoh Muslim kontemporer lainnya yang memiliki pandangan sama bahkan mendukung dan mempertahankan terhadap ide dan pandangan para *founding fathers* (pendiri bangsa) ini tentang hubungan Islam dan Pancasila. Dalam perspektif mereka, Pancasila dipilih sebagai ideologi bukanlah asal-asalan, namun melalui perjuangan (*jihad*) panjang dan hasil kesepakatan (*ijtihad*) bersama bangsa Indonesia —termasuk para tokoh Muslim-Nasionalis dan sekuler. Segala upaya perongrongan terhadap ideologi yang telah disepakati bersama, sama halnya tidak mengakui hasil *jihad* dan *ijtihad* para *founding fathers* (pendiri bangsa) tersebut.

Hal ini sekaligus dapat dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dasar kebangsaan di Indonesia. Para tokoh Muslim adalah penyambung lidah *founding fathers* dalam mengestafetkan ideologi Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara benar dan konsekuen. Bagi mereka, Pancasila dianggap sebagai ideologi paling tepat dan sudah final, tidak bisa diutak-atik lagi, dan harus dipertahankan bersama sampai kapanpun di Indonesia. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa di Indonesia. Dalam konteks saat ini, Pancasila justru dapat dijadikan contoh paling ideal sebagai ideologi bangsa di Indonesia, di saat dunia telah mengalami ujian berat terhadap pemaknaan dan implementasi ideologi yang dianut di Negaranya masing-masing, khususnya saat ini yang terjadi di Timur Tengah. Pandangan*genuine*para tokoh Muslim dalam dinamika kebangsaan di Indonesia ternyata telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap faham kebangsaan yang dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Di sinilah urgensi penelitian ini untuk dilakukan. Tentunya target dari penelitian ini adalah dapatdipublish di jurnal internasional bereputasi, agar dapat dibaca dan diketahui oleh siapapun–termasuk pihak luar negeri— terhadap dinamika

kebangsaan di Indonesia, yang dianggap sebagai penganut agama Islam terbesar di dunia. Akan tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah, bahwa dengan keragaman (kebhinnekaan) yang dimilikinya, ternyata bangsa Indonesia dapat hidup secara berdampingan dan damai, sehingga harmonisasi dalam berbagai aspek kehidupan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks inilah, kemudian tidak sedikit Negara-negara luar untuk belajar tentang pengelolaan kebangsaan dalam membangun harmoni bagi negaranya.

B. RUMUSAN DAN PEMBATASAN PENELITIAN

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, akan dirumuskan dan dibatasi pada beberapa masalahpenting sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muslim Indonesia terhadap Pancasila *Vis a vis* Islam dan upayanya dalam membendung de-ideologisasi Pancasila?
2. Bagaimana implikasi dari pandangan tokoh Muslim Indonesia tentang hubungan Pancasila dan Islamterhadap dinamika kebangsaan?

Rumusan masalah tersebut akan dibatasi pada beberapa tokoh Muslim Indonesia yang selama ini dikenal memiliki pandangan dan konsep pemikiran yang konsisten mengenai hubungan Pancasila dan Islam, yang secara langsung membawa implikasi pada penerapan konsep demokrasi dan Islam yang senantiasa dapat berjalan bersama di Indonesia. Para tokoh Muslim tersebut dibatasi pada empat tokoh Muslim, K. H. Achmad Siddiq, K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Dr. Harun Nasution, dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Keempat ini dipilih karena pandangan-pandangan kritisnya tidak hanya memiliki implikasi secara akademis pada dunia kampus, namun juga berimplikasi luas terhadap dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia secara keseluruhan hingga saat ini. Bahkan saat ini

pandangan-pandangannya tentang hubungan Pancasila dan Islam berikut implementasinya sangat terasa pengaruhnya dan semakin memantapkan untuk memegang erat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang semakin mapan.

Kedua tokoh Muslim pertama (K. H. Achmad Siddiq dan K. H. Abdurrahman Wahid) merupakan tokoh pesantren dan tokoh NU (Nahdlatul Ulama) yang memiliki puluhan juta santri dan jama'ah yang tersebar di sebagian besar pesantren dan pelosok negeri ini dan bahkan di sebagian belahan dunia; dan dikenal memiliki tradisi dan kultur *sami'na wa atha'na* (mengikuti) terhadap segala sikap dan tindakan para pemimpinnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemimpinnya senantiasa dijadikan pedoman dan diikuti —termasuk pandangan-pandangannya mengenai hubungan Pancasila dan Islam. Sementara kedua tokoh berikutnya (Prof. Dr. Harun Nasution dan Prof. Dr. Nurchlish Madjid) adalah dua tokoh yang memiliki basis massa di kampus dan organisasi kemahasiswaan, yang memiliki karakter berfikir kritis dan rasional, sehingga segala pemikiran dan gerakan yang ditimbulkan oleh keduanya senantiasa membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, jika keempat tokoh Muslim ini dijadikan *stressing* kajian dalam penelitian ini, kiranya memiliki momentum yang sangat tepat.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan tokoh Muslim Indonesia terhadap Pancasila *Vis a vis* Islam dan upayanya dalam membendung de-ideologisasi Pancasila.
2. Untuk mendiskripsikan implikasi dari pandangan tokoh Muslim Indonesia tentang hubungan Pancasila dan Islam

terhadap kehidupan kebangsaan.

D. TARGET PENELITIAN

Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan konsep yang jelas mengenai pandangan tokoh Muslim Indonesia terhadap hubungan Pancasila dan Islam, serta upayanya dalam membendung de-ideologisasi Pancasila oleh sebagian kelompok di Indonesia.
2. Menghasilkan data jelas mengenai implikasi dari pandangan tokoh Muslim Indonesia tentang hubungan Pancasila dan Islam terhadap kehidupan kebangsaan di Indonesia.
3. Menghasilkan artikel yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau Inggris untuk dipublish di jurnal internasional bereputasi, sehingga bisa diakses, dibaca dan disitasi oleh masyarakat internasional.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penulis telah berusaha menelusuri tulisan-tulisan terkait dengan pembahasan Pancasila dan Islam dalam konteks Indonesia, baik oleh peneliti/penulis Indonesia sendiri maupun oleh peneliti/penulis Barat (orientalis). Ditemukan ada banyak tulisan, tidak hanya berasal dari hasil kajian mendalam/penelitian semata, namun juga dari hasil pengamatan, bahkan sekedar refleksi dan lain sebagianya. Tidak hanya berupa artikel yang telah dipublish di jurnal, buku-buku referensi, namun juga berupa tulisan lepas, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, penulis berusaha menyajikan beberapa tulisan terkait dengan kajian/penelitian yang dilakukan oleh para pengkaji/peneliti, pengamat, pemikir Muslim, dan lainnya tersebut, sehingga diketahui secara jelas mengenai distingsi dari penulisan artikel ini di samping tulisan/kajian yang telah dibahas/ditulis oleh pengkaji lebih awal terkait

dengan pembahasan Pancasila dan Islam atau hubungan di antara keduanya.

Ada satu karya yang ditulis oleh Abdul Azis Thaba tentang "*Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*" yang ditulis pada tahun 1996. Tulisan ini membahas tentang perdebatan pembentukan dasar Negara antara kaum nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler dan berbagai hal menyangkut situasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Karya Thaba ini menjadi rujukan para penulis setelahnya, karena disajikan secara komprehensip tentang sejarah pembentukan dasar Negara (Pancasila).[1] Ahmad Syafii Maarif juga menulis tentang *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante.* Syafii memberikan gambaran situasi pembentukan dasar-dasar Negara, khususnya pada masa awal pencarian dasar Negara, yaitu Pancasila sebagai ideologi yang digali dari kultur masyarakat Indonesia, sehingga memiliki pengaruh dalam kehidupan umat Islam Indonesia yang mayoritas adalah penganut Islam.[2]

Sebuah karya lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dedek Sulaiman tentang "*Deideologi Politik Islam (Kajian Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakuan Azas Tunggal)*" tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian tugas akhir (skripsi) dalam menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syahid Jakarta. Penelitian ini mengupas seputar keberpihakan rezim Orde Baru pada azas tunggal Pancasila, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga tidak bisa dilepaskan dari perdebatan tentang hal tersebut di kalangan umat Islam Indonesia pada saat itu. Sebab dinamika yang berkembang sangatlah beragam antara yang pro dan yang kontra.[3] Nurcholish

---

[1] Lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

[2] Baca Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985).

[3] Baca Dedek Sulaiman, "*Deideologi Politik Islam (Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakukan Azas Tunggal)*", dalam *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syahid Jakarta, 2008).

Madjid juga menulis tentang "*Cita-cita Politik Kita*". Madjid ingin melihat cita-cita politik umat Islam adalah sejalan dengan cita-cita kemanusiaan itu sendiri, sebab apa yang dirumuskan di dalam Pancasila juga mengandung cita-cita kemanusiaan sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah itu sendiri.[4]

Beberapa karya di atas, menunjukkan bahwa pembahasan tentang hubungan Pancasila dan Islam di Indonesia telah menjadi diskursus yang selalu mengalami dinamika seiring dengan perkembangan sejarah kebangsaan Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu dalam sejarahnya yang panjang—yang berusia 70an lebih ini —bangsa Indonesia telah berada pada ujian dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Oleh kaena itu, kajian tentang hubungan Pancasila dan Islam menjadi selalu menarik untuk dikaji, sehingga senantiasa selaras dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia yang sejahtera, beradab, dan berkeadilan. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi menarik untuk disajikan dalam perspektif baru, tentunya berbeda dengan penelitian atau kajian yang telah lewat, lebih khusus pada kajian tokoh Muslim Indonesia yang mewakili dua elemen/komunitas masyarakat Indonesia, yaitu elemen pesantren —yang direpresentasikan oleh K. H. Abdurrahman Wahid dan K. H. Achmad Siddiq— dan elemen akademisi -yang direpresentasikan oleh Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Harun Nasution. Oleh karena itu, elaborasi yang peneliti sajikan tentu berbeda dari kajian/penelitian yang telah dilakukan lebih awal.

---

[4] Lihat Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Kita: Aspirasi Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Leppenas, 1983).

BAB II

KAJIAN TEORITIK ISLAM *VIS A VIS* PANCASILA

Pada bab berikut akan disajikan beberapa kajian teoritik perihal dinamika Islam dan Pancasila dalam konteks ke-Indonesia-an, baik menyangkut aspek kesejarahan, konstruksi ideologis, landasan epsitemologis, hingga dinamika sosial-budaya yang melingkupinya, sehingga wajah Islam di Indonesia dan kaitannya dengan pembentukan Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* bangsa Indonesia dapat diketahui secara komprehensip. Aspek kajian pada bab ini membahas seputar diskursus hubungan Pancasila dan Islam yang sejalan dengan konsep Piagam Madinah (*Shahifah Madinah*) yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW, Islam dan Pancasila pra-kemerdekaan, Islam dan Pancasila pasca-kemerdekaan, Islam dan Pancasila era-reformasi, hingga pada dinamika gerakan de-ideologisasi Pancasila di Indonesia pada dekade terakhir.

A. PIAGAM MADINAH; SUMBER INSPIRATIF HUBUNGAN DIALEKTIS PANCASILA DAN ISLAM

Islam dalam konteks sejarahnya yang panjang, pada dasarnya senantiasa berhubungan dengan aspek sosiologis, politik, dan budaya yang melingkupinya. Islam akan senantiasa berdialog dan berdialektika dengan zaman dan tempat di mana

Islam itu berkembang dan berdinamika. Pada titik ini, Islam akan tampil ke permukaan dengan wajah yang berbeda-beda sesuai dengan dimana dan kapan dia berdinamisasi. Dalam konteks implementatif, akan didapati wajah keberagamaan yang ditampilkan akan berbeda-beda. Sebagai contoh, Islam di tanah Arab Saudi akan tampil dengan wajah ke-Arab Saudiannya, Islam di Pakistan akan tampil dengan wajah ke-Pakistanannya, Islam di Mesir akan tampil sesuai dengan wajah ke-Mesirannya, Islam di Barat akan tampil dengan wajah ke-Baratannya, Islam di India tentu akan berbeda pula dengan wajah keberagamaan di tempat lain; demikian juga seterusnya. Demikian pula Islam di Indonesia akan tampil ke permukaan dengan wajah yang khas Indonesia, bukan wajah yang lainnya. Hal demikian terjadi mengingat Islam tidak bisa dilepaskan dari akar konteksnya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam akan terus berdinamika bagaikan bola salju (*snow ball*). Dia akan menggelinding mengikuti irama zaman dan tempatnya, di mana Islam dalam perjalanan berikutnya akan menampilkan wajah yang tidak sama sebagaimana wajah bola salju itu, di mana dia berhenti menggelinding, maka di situlah wajah Islam akan tampil dan tampak seperti apa.

Wajah Islam dalam konteks Indonesia dianggap sebagai wajah keberagamaan yang menampilkan sisi inklusifitas yang lebih toleran dibanding dengan wajah Islam di Timur tengah yang lebih bersifat normative karena wajah Arab yang menonjol. Demikian juga wajah keberagamaan (Islam) di India yang cenderung tampil lebih ekstrim, karena situasi masyarakat yang melingkupinya secara umum sulit menghindar dari berbagai konflik antar agama dan atau antar kelompok masyarakat yang sering terjadi.[1] Apa

[1] Contoh konflik antar umat beragama, khususnya antara Islam dan Hindu di India, dapat dilihat pada Thoha Hamim, *"Problematika Hubungan Antar Umat Beragama; Tinjauan tentang Hubungan Antagonistik Hindu-Muslim dan Implikasinya terhadap Rendahnya Mobilitas Minoritas Muslim di India"*, dalam *Akademika*, Volume 05, No. 1 (September 1999), 1-14.

yang terjadi di Indonesia tidak sama dengan di Negara-negara lainnya. Keberagamaan (Islam) di Indonesia lebih kompetibel dengan budaya dan tradisi lokal, misalnya tradisi tingkeban, slametan, kenduren, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat Indonesia yang memiliki sikap lebih toleran dan menerima terhadap perbedaan, bahkan sikap demikian jauh sebelum Islam datang pun telah ditunjukkan olehnya. Sikap inilah yang kemudian menjadi karakter keberagamaan (Islam) di Indonesia yang jauh dari tindak kekerasan.[2]

Berbeda dengan kelompok-kelomok keagamaan sempalan dan atau radikal[3] lain, yang dianggap sebagai kelompok keagamaan *import* (trans nasional) karena menampilkan keberagamaan (Islam) yang bukan asli karakter Indonesia, sehingga tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Bahkan cenderung tidak popular dan sebaliknya, dilihat sinis jika melakukan aktivitas keagamaannya. Walaupun pada dekade terakhir ini mereka mendapatkan tempat di hati sebagian masyarakat Indonesia, namun hal itu tidak lebih disebabkan oleh karena adanya kepentingan politik sesaat, apalagi menjelang PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) dan pemilu Nasional. Penerimaan Islam dengan karakter toleran oleh masyarakat Indonesia, menurut Azyumardi Azra disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama,* agama Islam yang mdatang kemudian berkembang di Indonesia adalah secara damai, tidak pernah terjadi ekstrimisasi,

---

[2] Lihat Muniron dkk. ,*Studi Islam di Perguruan Tinggi,* (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 127.

[3] Kelompok keagamaan sempalan dan atau radikal adalah sebagai kelompok yang mengorganisir diri atas nama agama yang dianutnya dengan aktifitas, identitas, bentuk gerakan, dan karakter keagamaan yang khas. Berbeda dengan kelompok yang lazim ada, baik simbol-simbol maupun doktrin pemahamannya. Kelompok ini cenderung minoritas dan militansinya tinggi, bahkan radikal, sehingga seringkali disebut sebagai kelompok fundamentalis radikal. Lihat Mohammad Daud Ali, "*Fenomena Sempalan Keagamaan di PTU: Sebuah Tantangan bagi Pendidikan Agama Islam*", dalam *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi; Wacana tentang Pendidikan Agama Islam,* Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (Ed.), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 250-251; Agus Afandi, "*Melihat Sisi Kelompok Kegamaan di Perguruan Tinggi Umum*", dalam *Paramedia,* Volume 1, No. 2 (Juli 2000), 114.

berbeda dengan Islam yang datang dan berkembang di timur tengah. *Kedua,* masyarakat Indonesia cenderung lebih akomodatif – jika tidak disebut sinkretik –, sehingga ekstrimisme dan radikalisme tidak popular. *Ketiga,* Pancasila yang dijadikan ideologi sejak awal kemerdekaan dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam. *Keempat,* Pemerintah Indonesia lebih toleran terhadap kelompok-kelompok yag dianggap radikal, lebih dikategorikan sebagai *soft regim* dibanding dengan pemerintah yang ada di Timur Tengah. *Kelima,* Sejak pemerintah Orde Baru hingga tahun 1980-an pemerintah yang lebih cenderung bersikap *hostile* (berhadap-hadapan) terhadap kelompok dan kaum Muslimin, namun pada dekade awal 1990-an pemerintah berubah haluan kepada perlakuan *approachment* (lebih terbuka) kepada gerakan Islam dan kaum Muslimin, sehingga disebut sebagai *honeymoon.*[4] Kalaupun kemudian akhir-akhir ini dijumpai adanya gerakan keberagamaan yang cenderung radikal, adalah bagian dari akibat konstelasi global yang mempengaruhi dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia, misalnya saja pengaruh fenomena ISIS di Timur Tengah, dan atau karena dominasi Barat –yang dimotori oleh Amerika Serikat– yang sangat menonjol, sehingga cenderung diskriminatif terhadap kaum Muslim di Timur Tengah –seperti perlakukan terhadap Palestina yang tidak adil, terhadap Syuriah, dan lain-lain. Bahkan pada saat yang lain Barat telah mempertontonkan dua wajahnya; maka tidak berlebihan kiranya, muncul analisis bahwa fenomena kekerasan atau radikalisme yang mucul di belahan dunia ini merupakan skenario besar dari Barat yang dikomandani oleh Amerika Serikat demi menancapkan hegemoninya yang tidak ingin disaingi oleh Negara-negara lainnya di dunia.

Jika dilihat ke belakang Islam hadir pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di tanah Arab, juga tidak keluar dari akar

---

[4] Lihat Azyumardi Azra, "*Kelompok Sempalan di Kalangan Mahasiswa PTU: Anatomi Sosio-Historis*", dalam *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi; Wacana tentang Pendidikan Agama Islam,* Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (ed.), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 233-235; Muniron dkk. , *Studi Islam,* 128.

sejarahnya, yaitu konteks zaman dan tempat. Di sini Islam selalu hadir sebagai solusi atas berbagai problem yang dihadapi umat. Nabi SAW adalah sebagai solusi *maker*nya. Ketika Nabi mengalami problem/kendala dalam menyelesaikan problem keumatan, maka Nabi senantiasa berkonsultasi kepada Allah SWT sebagai penentu segalanya. Al-Qur'an sebagai pedoman atas jawaban Nabi ketika menghadapi persoalan di tengah umatnya, ketika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan jawaban atas problem yang dihadapi Nabi, maka Allah akan memberikan jawaban. Itulah yang kemudian disebut sebagai *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya al-Qur'an). Demikian halnya yang terjadi pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang memiliki *asbab al-wurud* (sebab-sebab turunnya hadis). Hal demikian sekaligus memberikan petunjuk bahwa sebenarnya Islam yang dihadirkan oleh Allah SWT melalui Nabi SAW di tengah-tengah umat senantiasa berdialog dan berkomunikasi dengan zaman dan tempatnya. Dengan demikian, Islam hadir atau dihadirkan bukan dalam ruangan yang kosong. Islam hadir pada situasi dan kondisi masyarakat yang sebelumnya memang sudah terisi dengan tradisi-tradisi, budaya-budaya, dan keyakinan-keyakinan yang melingkupinya. Masyarakat pada titik ini bukan berarti tidak memiliki standard nilai dalam bersikap dan berperilaku, namun standard nilai yang dipegangi dan pedomani bisa jadi mengalami penyimpangan (*deviation*), sehingga pada saatnya diperlukan pembenahan dan pembinaan. Dalam konteks inilah Nabi SAW datang untuk membenahi dan membina standard nilai yang dianggap menyimpang tersebut dengan membawa standard nilai ideal menurut Islam (*makarim al-akhlaq*).[5]

Nabi SAW dalam konteks ini tidak hanya membawa misi profetis (kenabian) semata, namun juga membawa misi keumatan (sosiologis) yang humanis. Dengan kata lain, Nabi SAW ditugaskan

[5] *Ibid.*, 125.

oleh Allah SWT ke dunia tidak hanya memiliki kepentingan teologis semata, namun juga membawa misi sosiologis bahkan juga politis sekaligus. Hal tersebut telah dibuktikan dengan tampilnya Nabi tidak hanya sebagai sosok seorang yang membenahi aspek tauhid semata, namun juga membangun peradaban umat manusia—sebagiamana dalam Hadisnya "*Inna ma buitstu liutammima makarim al-akhlaq* (sesungguhnya saya diutus ke jagad ini adalah untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia)". Lebih khusus lagi ketika Nabi telah melaksanakan hijrah dari kota Mekkah ke Madinah -yang sebelumnya bernama kota Yatsrib.[6] Di sini Nabi tampil tidak hanya sebagai kepala agama namun juga secara politis, tampil sebagai kepala Negara, bahkan pada saat tertentu Nabi juga tampil sebagai seorang panglima perang yang sangat tegas terhadap musuh-musuhnya pada saat berperang. Demikian juga Nabi menjadi pebisnis/pengusaha sukses yang banyak bergaul dan berinteraksi dengan berbagai pihak lainnya.

Secara geografis dan sosiologis, penduduk Yatsrib sangat beragam. Di sanaterdapat berbagai suku. Suku yang paling banyak yang menghuni kota Yatsrib adalah Suku Aus, Khazraj, Qainuqa, Quraidlah, dan Bani Nadzir. Agama di sana juga sangat beragam, ada Islam, Yahudi dan sedikit Kristen Najran. Di dalam umat Islam sendiri juga terdapat dua kelompok, yaitu kaum migran yang disebut sebagai *Muhajirin* (dari beberapa suku asal Mekkah dan sekitarnya) dan penduduk lokal, yang biasa disebut kaum *Ansharin* (yang dihuni oleh Suku Aus dan Khazraj sebagai suku paling dominan). Sedangkan umat Yahudi lebih banyak berasal dari Suku Nadzir, Qainuqa, dan Quraidlah. Bukti kelihaian Nabi SAW adalah keberhasilannya dalam membangun peradaban dengan melakukan interaksi-interaksi dan kerjasama dengan

---

[6] Nama Yatsrib dipakai mengingat orang pertama yang datang dan membangun kota tersebut bernama Yatsrib bin Amliq ibn Laudz ibn Syam ibn Nuh. Baca Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006), 27.

berbagai pihak. Nabi sendiri tidak pernah berlaku diskriminatif terhadap salah satu pemeluk agama dan kelompok yang ada di sana, termasuk terhadap Islam sendiri. Nabi selalu membangun dasar-dasar akan pentingnya landasan etik dan moral dalam membentuk umat yang berperadaban, dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan sama di mata hukum. Untuk mewujudkan ini maka dibentuklah sebuah "Negara Madinah". Konsep ini kemudian tertuang dalam "*Shahifah Madinah* (Piagam Madinah)" yang memuat landasan etik dan moral tersebut. Di sini Nabi SAW secara *sharih* (jelas dan tegas) telah menanamkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, egalitarianisme, menjunjung tinggi perbedaan, saling hormat-mengormati antar pemeluk agama, antar etnis dan suku, serta kelompok-kelompok yang ada.[7]

Piagam Madinah kemudian dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang paling otentik dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pada tataran nilai-nilai kesepakatan yang terkandung di dalamnya oleh umat Muslim dinyatakan sebagai landasan tidak hanya otentik namun juga penting dalam mengatur tata hubungan antara masyarakat yang berbeda-beda. Piagam Madinah seringkali disebut sebagai kitab/*shahifah*, walaupun kedua istilah tersebut pada dasarnya menunjukkan makna yang memberikan konsekuensi pemahaman berbeda, namun kedua istilah tersebut pada dasarnya menunjukkan pada hal yang sama, yaitu menunjuk pada keotentikan nilai-nilai yang ada di dalamnya yang dianggap sangat penting dan di dalamnya mengandung susunan yang disusun secara serius dan dicatat dalam urutan logis (tidak acak). Hal itu sekaligus menunukkan bahwa Piagam Madinah itu bersifat mengikat dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal tersebut juga menegaskan bahwa Piagam Madinah sebagai

---

[7] Ibid. , 29. Baca juga pada Said Agil Siraj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 209-211.

perjanjian hukum pertama tertulis yang ditandatangani oleh beragam komunitas dalam sejarah umat manusia, khususnya di Madinah.[8] Isi dari butir-butir kesepakatan tersebut kemudian diimplementasikan dalam kehidupan yang plural di Madinah.[9]

Keteladan Nabi Muhammad SAW dalam menjalin komunikasi dan hidup berdampingan dengan tetangga yang beragam menjadi bukti baik secara teologis maupun historis telah ditemukan akarnya. Poin-poin penting yang dirumuskan dalam Piagam Madinah (*Shahifah Madinah*) memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi setiap umat Muslim di seantero jagad tentang pentingnya membangun dialog dan komunikasi dengan masyarakat yang beragam, yang harus dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Tentu al-Qur'an dan al-hadis adalah menjadi rujukan paling awal dan utama, di samping Piagam Madinah tersebut. Yang lebih menarik untuk menjadi bahan diskusi selanjutnya adalah bahwa Piagam Madinah tidak ditemukan term-term/teks apapun yang menunjukkan adanya simbol-simbol Islam secara *sharih* (jelas), seperti kata "Islam, ayat al-Qur'an atau pun syari'at Islam", dan atau perlakukan khusus terhadap umat Islam. Kata Yatsrib pun diganti nama menjadi Madinah yang berarti "peradaban". Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan yang ada di Madinah menjadi pesan utama pada Piagam Madinah tersebut, tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan kehidupan yang berperadaban (*tamaddun*). Di antara contoh sikap dan perilaku Nabi adalah ketika ada kabar seorang penduduk Madinah beragama Yahudi

---

[8] Meskipun sebelum Piagam Madinah, disinyalir ada dokumen sejenis seperti Samuel di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama, Artha-sastra oleh Kautilya dan Manusmrti dalam tradisi Hinduisme, dan Athenaion politeria (Konstitusi Athena) oleh Aristoteles. Akan tetapi semua itu hanyalah berupa saran kepada raja atau ratu. Tak satu pun ada yang menyebut sebagai konstitusi nasional. Lihat Zakiyuddin Baidhawy, *"Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara"*, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid dkk. ,*Fikih Kebinnekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Bandung: Maarif Institut-Mizan, 2015), 131.

[9] *Ibid.* , 129-130.

terbunuh, Nabi SAW secara cepat memobilisasi dana masyarakat untuk kemudian diberikan kepada keluarganya. Nabi bersabda: "Barang siapa yang membunuh non-Muslim, maka dia akan berhadapan dengan saya". Demikian elegan sikap Nabi yang ditunjukkan kepada rombongan Yahudi yang membawa jenazah tersebut.[10]

Pola jalinan komunikasi *(ukhuwwah) madaniyah* yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini benar-benar menjadi pesan teologis dan moral bagi seluruh umat Islam, bahwa pada dasarnya menjalin hubungan antar umat yang beragam adalah sebuah keniscayaan, asalkan di antara kedua belah pihak ada saling mempercayai dan menjaga komitmen bersama. Kontrak sosial yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah menandaskan tentang pentingnya menjaga kesepakatan bersama dalam wadah kesatuan dalam hidup. Konsep satu umat (umatan wahidah) dalam konteks ini tidak berarti hanya menunjuk pada umat Islam semata, namun juga semua umat yang memiliki tujuan sama dalam membentuk kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, sehingga di dalamnya ada banyak warga yang terlibat —termasuk umat yang berlainan agama, suku, golongan/kelompok, dan lainnya. Dalam Piagam Madinah satu persatu kelompok disebutkan, seperti Yahudi dan kelompok lainnya. Di sini diajak oleh Nabi untuk membangun kontrak sosial demi kepentingan bersama dengan saling jujur, menasehati yang baik, dan tidak saling berkhianat. Yudi Latif mengutip pendapat Robert N. Bellah (sosiolog Amerika) yang menyatakan, contoh paling baik dan pertama kali faham nasionalisme modern dapat ditemukan pada sistem masyarakat Madinah masa Rasulullah SAW dan para khalifah yang melanjutkannya. Bellah melanjutkan, sistem yang telah dibangun Muhammad SAWtersebtmerupakan *"a better model for modern national community building than might be imagined"* (contoh bentuk bangunan komunitas nasional modern yang terbaik dariapa yang dibayangkan). Komunitas nasional

[10] Baca Siraj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*, 29.

tersebut disebut "modern" sebab ada jalinan keterbukaan di dalam partisipasi seluruh anggota komunitas, juga didukung adanya kesediaan dari para pemimpinnya untuk dapat saling menerima penilaian berdasarkan kemampuan masing-masing.[11]

Sintesa Bellah yang dikutip Yudi Latif di atas bukanlah tanpa argumen. Argumen tersebut dapat dilihat pada kata *"ummah"* pada Piagam Madinah. Kata *ummah* memiliki makna tidak hanya menyangkut umat Islam, namun juga umat lainnya seperti Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Walaupun dalam konteks ini terjadi perdebatan yang tidak kunjung selsesai dalam memberikan interpretasi tentang konsep umat yang satu (umatan wahidah). Dalam kaitan ini, paling tidak ada dua kelompok, yaitu: Pertama, yang menolak pendapat bahwa kata umat yang satu bukan berarti menunjuk pada umat lainnya seperti Yahudi, namun khusus untk umat Islam. Pendapat ini seperti yang dipegangi oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Akan tetapi menurut Hamidullah—seperti dikutip Zakiyudin Baidlawy—bahwa umat yang disebutkan dalam Piagam Madinah adalah juga menyangkut selain umat Islam, sebab yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah semua umat. Di samping itu, secara teologis, umat Yahudi juga mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Satu, sehingga Tuhan Yahudi juga sama dengan Tuhan Islam. Untuk memperjelas pernyataan di atas, berikut sedikit kutipan dari isi Piagam Madinah yang secara jelas menyatakan tentang konsep satu umat.

> Pasal 1: *"Atas nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah dokumen (piagam) dari Muhammad Nabi SAW antara orang-orang beriman dan orang-orang yang memeluk Islam dari Quraisy (Muhajirin) dan penduduk Yatsrib (Anshar dan Yahudi / non-Muslim) dan siapa pun yang mengikuti mereka dan termasuk dalam kelompok mereka dan berjuang bersama mereka*

[11] Yudi Latif, *"Tafsir Sosiologis atas Piagam Madinah"*, dalam Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana (ed.), *Islam, Ham, dan Keindonesiaan: Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama*, (Jakarta: Ma'arif Institut, 2007), 23

(aliansi mereka)".

Pasal 2: *"Bahwa mereka (penduduk Madinah) adalah satu umat; berbeda dari yang lain"*.

Pasal 25: *"Kaum Yahudi dari Bani Auf merupakan satu umat dengan kaum Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin juga agama mereka. Kebebasan ini (juga) berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang dzalim dan jahat. Inilah yang akan merusak diri dan keluarga"*.

Butir-butir perjanjian tersebut menunjukkan tentang realitas sejarah Nabi yang dapat hidup secara berdampingan di antara komunitas yang berbeda-beda, tidak hanya berbeda dalam soal agama namun juga berbeda dalam suku, dan budaya. Dengan demikian, pengertian satu umat dalam Piagam Madinah menunjuk tidak hanya kepada satu umat Muslimin saja, namun di dalamnya juga menunjuk pada umat non-Muslim. Konsep inilah yang kemudian dianggap sebagai fondasi dalam membangun keberagamaan dan kebangsaan dalam masyarakat yang pluralistik.

Dalam konteks Indonesia, formula kebangsaan telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai landasan normatif dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan *ijtihad* dan *jihad* dari seluruh pendiri bangsa—termasuk di dalamnya adalah para ulama yang tidak diragukan komitmennya dalam mengawal dan merumuskan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk ideologi Pancasila yang dipilih tersebut—dalam merealisasikan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pancasila merupakan titik kulminasi dari perjuangan dan perjalanan panjang sejarah Indonesia yang pada awalnya digali dari nilai-nilai luhur tradisi, budaya, adat-istiadat, sikap, dan perilaku leluhur bangsa Indonesia yang demikian luhur dan berperadaban, sehingga akar sejarah Pancasila tidak akan tercerabut dari *indigenouse* (keaslian) bangsa

Indonesia itu sendiri.

Dengan demikian, jika dalam perkembangan mutakhir saat ini ada upaya de-ideologisasi terhadap Pancasila sebagai *common platform* dan ideologi bangsa, hal ini sama halnya sebagai upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama oleh para pendiri bangsa tersebut. Tidak dapat dinafikan memang, bahwa dijumpai sekelompok kecil yang berupaya untuk merongrong eksistensi Pancasila dan NKRI sebagai platform bersama, khususnya pasca reformasi (1998-an) —tentu dengan berbagai argumen yang diajukan yang jauh dari pertimbangan rasional dan empiris, misalnya munculnya argumen yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan manusia yang jauh dari pesan al-Qur'an, dan demokrasi Pancasila yang selama ini dijalankan di Indonesia adalah produk barat dan *thaghut* (sesat), dan tidak sejalan dengan syari'at, sehingga harus ditinggalkan; dan kembali kepada sumber orisinalnya, al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka melupakan bahwa aspek-aspek al-Qur'an dan al-Sunnah dalam realitas sejarahnya juga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-budaya yang mengiringinya—, khususnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pembela Islam (baca: Islam kanan), dengan mengusung syariatisasi dalam segala hal. Padahal yang demikian kontras dengan kondisi sosial-budaya bangsa Indonesia. Faham dan gerakan seperti ini tentu bukanlah muncul secara tiba-tiba, namun hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aspek sosiologis dan politik, baik yang bersifat lokal maupun global saat ini. Contoh paling nyata adalah fenomena ketidakstabilan/disharmoni yang terjadi di sebagian belahan dunia Muslim, yang saat ini telah mengalami degradasi yang sangat luar biasa, khususnya di Timur Tengah sedang berkonflik antar saudara seiman dan sebangsa yang hingga kini belum tampak ujungnya. Apakah hal ini muncul sebagai akibat dari persolaan intern yag dihadapinya dalam negaranya, ataukah memang fenomena ini muncul sebagai akibat dari fenomena

global karena tuntutan keadilan yang tidak sesimbang. Ataukah memang sengaja dipicu oleh sentimen keagamaan lainnya. Hal ini tentu memerlukan kajian mendalam.

Piagam Madinah yang dirumukan oleh Nabi SAW bersama seluruh komunitas di Madinah di atas, merupakan dokumen sangat penting dalam sejarah tata pergaulan dan kehidupan umat manusia dalam membangun harmoni kehidupan antar warga. Piagam Madinah yang dirumuskan Nabi SAW bersama berbagai komunitas berbeda waktu itu dalam perkembangan sejarah kehidupan umat manusia telah membawa implikasi mendasar dalam mengatur kehidupan tata pergaulan umat tidak hanya menyangkut hubungan intern umat Islam semata, namun juga hubungan antar seluruh umat manusia di dunia tanpa adanya batas-batas agama, keyakinan, etnis, suku, kelompok, aliran, dan lainnya, berdasar atas komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama tersebut. Hal ini menunjukkan betapa Nabi SAW. telah memberikan contoh apik dalam membangun harmoni kehidupan umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, semua pihak mengakui bahwa Piagam Madinah dianggap sebagai piagam otentik pertama di dunia yang dihasilkan oleh umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat yang egaliter, inklusif, dan kosmopolitan dalam tata pergaulan di tengah umat yang plural. Dengan kata lain, Islam sebenarnya menjadi pelopor pertama dalam membangun masyarakat yang demokratis, egaliter, dan berperadaban (*mutamaddin*). Dalam koteks ini, berdasarkan hasil kajian penulis, *founding fathers*—termasuk para ulama Nusantara di dalamnya—dalam merumuskan Pancasila sebagai *common platform* dan ideologi kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sangat kompetibel dengan Piagam Madinah ini.

Dengan demikian, hubungan dialektis Pancasila dan Islam di Indonesia sebenarnya terinspirasi oleh Piagam Madinah tersebut. Hal ini menegaskan juga tentang pentingnya pemahaman

bahwa Islam bukanlah sebuah *nation* dan institusi, namun Islam lebih merupakan fondasi moralitas bagi umat manusia untuk membimbing dan mengontrol seluruh aspek kehidupannya. Yang demikian akan membawa implikasi mendasar tentang pentingnya mewujudkan nilai-nilai *rahmatan li al-'alamin* (rahmat bagi semesta) di muka bumi. Sebaliknya, jika Islam dipahami sebagai nation dan institusi, maka akan bermuara pada kepentingan pribadi, kelompok, dan kekuasaan semata, yang justru kontras dengan misi Islam itu sendiri sebagai agama yang ramah dan rahmat bagi semesta. Pancasila dalam konteks kebangsaan, keberagamaan, dan keberagaman di Indonesia, merupakan pengejawantahan dari misi Islam tersebut.

B. DINAMIKA PEMBENTUKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

Dalam sejarahnya yang sangat panjang, dinamika kePancasila-an di Indonesia ternyata tidak dapat dipisahkan dari kontekstualisasi sosial, politik, budaya, adat-istiadat, dan tradisi yang mengiringinya. Hal demikian yang kemudian oleh para ahli sejarah ke-Nusantara-an —Pancasila— dianggap sebagai pengejawantahan/perwujudan asli (*indigenouse)* dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, dan aspek-aspek lokalitas Nusantara tidak akan terpisahkan darinya, sehingga *local wisdom* sebagai basis pembentukannya akan selalu tampak padanya. Dengan kata lain, Pancasila yang hingga kini masih menjadi kekuatan dan ruh bangsa Indonesia akan senantiasa sesuai dan sejalan dengan irama hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab memang demikian nilai-nilai yang terkandung dari refleksi budaya asli yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Hal inilah yang membedakan faham dan pandangan masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar yang seakan tidak *in-context* dengan *common platform* dan ideologi yang dipegangi, sehingga dalam

proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seakan terus mengalami problem yang seakan tidak dapat ditemukan solusinya. Hal ini juga yang pada dekade mutakhir ini tidak sedikit bangsa-bangsa Islam di luar Indonesia yang ingin belajar banyak tentang pemahaman dan pandangan masyarakatnya terhadap Islam dan Negara yang senantiasa sejalan.

Dalam konteks dinamika ke-Pancasila-an di Indonesia, Pancasila itu sendiri —menurut Bambang Noorsena— sudah dikenal sejak puncak kejayaan kerajaan Majapahit, di mana kata Pancasila itu sendiri diderivasi dari bahasa Jawa Kuno yang diserap dari bahasa Sansekerta dan Pali, yang memiliki arti "sendi dasar yang lima (lima dasar yang kokoh)". Pada awalnya kata "sila" dipakai sebagai dasar kesusilaan atau landasan moral Budhisme yang memuat lima larangan. Kelima sila tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab Tripitaka, yang menyebutkan sebagai berikut:

1) *Panatipata veramani sikkhapadamsamadiyami* (Aku melatih diri untuk menghindari pembunuhan);
2) *Adinnadana veramani sikkhapadamsamadiyami* (Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan);
3) *Kamesu micchacara veramani sikkhapadamsamadiyami* (Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila);
4) *Musavada veramani sikkhapadamsamadiyami* (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, berdusta atau memfitnah); dan
5) *Surameraya majjapamadatthan veramani sikkhapadamsamadiyami* (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan).

Demikian juga dalam karya Mpu Tantular pada bukunya "Kakawin Sutasoma" (ditulis tahun 1384 M) maupun karya Mpu

Prapanca dalam karya sastranya "Kakawin Negara Kertagama" (ditulis tahun 1367 M).[12] Dengan demikian sejak jauh sebelum berdirinya NKRI, istilah Pancasila sebenarnya telah menjadi bagian dari pedoman hidup masyarakat Indonesia yang telah berabad-abad lamanya diterapkan dalam hidup dan kehidupannya.

Proses pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memang sejalan dengan dinamika perjuangan panjang bangsa Indonesia. Menurut Nono Sampono, paling tidak terdapat empat fase dalam proses pembentukan Pncasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Empat fase tersebut, yaitu: Pertama, fase dalam kandungan, yaitu fase di mana bangsa Indonesia yang demikian luas —dengan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, baik pulau kecil dan besar— dan kaya akan sumber daya alamnya (SDA) telah menarik dan menggiurkan para penjajah untuk datang ke Nusantara untuk mengambil kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara. Kedatangan para penjajah satu sisi memang menjadikan tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, religiusitas, dan persatuan. Namun pada sisi lainnya, menjadikan bangsa cerdas dan kritis karena masuknya nilai-nilai demokrasi, humanisme, keadilan yang dibawa oleh kolonialisme; yang kemudian diramu dan dikontekstualisasikan dengan falsafah, budaya dan tradisi masyarakat Nusantara. Usulan Dr. Rajiman W memicu anak bangsa Nusantara untuk melihat kembali kekayaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang telah lama dibawa dan dikembangkan oleh nenek-moyang bangsa.

Kedua, fase pembuahan, di mana pada fase ini dasar-dasar ideologis tidak hanya digali dari budaya asli Nusantara di masa-masa kegelapan namun juga menerobos jauh ke belakang, yaitu masa-masa kejayaan Nusantara. Oleh karena itu, pada konteks ini ada beberapa analisis yang muncul, antara lain:

---

[12] Baca Bambang Noorsena, "*Pancasila: Dari Puncak Kejayaan Majapahit hingga Pidato Bung Karno 1 Juni 1945*", dalam *http://jbohanor. wordpress. com/2018/06/01*, diakses tanggal 3 Juni 2018.

Pada tahun 1924 Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda mulai merumuskan ideologi politik, bahwa tujuan kemerdekaan politik harus berdasarkan pada empat (4) prinsip: Persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Konsepsi ideologi PI merupakan buah sintesis dari ideologi-ideologi terdahulu. Persatuan nasional merupakan tema dari Indische Partij, non-kooperasi merupakan platform politik komunis, dan kemandirian merupakan tema dari Sarikat Islam. Sedangkan solidaritas merupakan simpul yang menyatukan ketiga tema utama itu.

Masih pada tahun 1924 seorang tokoh pejuang, Tan Malaka menulis buku "*New De Republick Indonesia* (Menuju Republik Indonesia), menyatakan bahwa kedaulatan rakyat (demokrasi) memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Karena keperluannya terhadap kenyataan bahwa bangsa Nusantara terdapat golongan mayoritas (Islam) yang kuat, sehingga komunis harus bekerjasama dengan Pan-Islamisme. Hampir bersamaan Hos Tjokroaminoto juga mengidealisasikan suatu sintetis antara Islam, Sosialisme, dan Demokrasi. Dikatakan "Jika kita kaum Muslimin, yang benar-benar memahami dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran Islam, maka kita pasti akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati. "

Ketiga, fase perumusan Pancasila, yaitu fase yang diawali pada sidang BPUPKI (Badan Persiapan Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di mana pada saat sidang BPUPKI initelah bermunculan berbagai friksi, konflik, perbedaan-perbedaan sudut pandang, hingga pada pertentangan politik dan idelogis dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut menyangkut apa dasar Negara Indonesia setelah kemerdekaan sebagaimana pertanyaan yang pernah dilontarkan pertama kali oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat kepada Presiden Soekarno. Kemudian Soekarno memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan

"Lahirnya Pancasila". Bung Karno mengusulkan dasar-dasar Negara, yaitu: *Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi, Dasar Perwakilan, Dasar Permusyawaratan; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa.*[13]

Lain dari lima dasar yang telah disampaikan Soekarno, tanggal 29 Mei 1945 di hadapan sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan lima asas dasar negara, yaitu: *Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat*. Pada tanggal 31 Mei 1945 di depan sidang BPUPKI, Yamin mengatakan: "Memang dalam hal ini terdapat dua faham, yaitu faham dari anggota yang ahli agama, meberikan anjuran agar Indonesia dibentuk sebagai negara Islam; dan ada saran lainnya seperti yang telah disarankan Muhamad Hatta, yaitu bentuk negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan agama (Islam). Artinya, bukan negara Islam".

Oleh karena itu, Prawoto Mangkusasmito memberikan pernyataan bahwa dalam naskah persiapan UUD 1945 jilid I yang disusun M. Yamin hanya mencantumkan tiga pidato yang dianggap penting untuk mewakili para nasionalis sekuler saja, yaitu pidato Soekarno (1 Juni 1945), pidato M. Yamin (29 Mei 1945), dan pidato Supomo (31 Mei 1945). Sedangkan dari anggota nasionalis Muslim, tidak ditemukan satu pun naskah pidato yang dicantumkan.[14] Inilah yang kemudian disinyalir adanya ketegangan perihal perlakuan politis dari nasionalis sekuler terhadap nasionalis Muslim. Pertentangan dua kelompok tersebut terjadi hingga pertengahan tahun 1959.[15] Dalam kontkes inilah, maka para politisi nasionalis Muslim bisa berkaca pada sejarah,

---

[13] Baca Soekarno, *"Lahirnya Pancasila"*, dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi*, (Jakarta: DPA, 1961), 21.

[14] Lihat Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, (Jakarta: Hudaya, 1970), 12.

[15] Heni Wahyu Wadayati, *"Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan"*, *Jurnal Dakwah*, Vol. X No. 2, Juli-Desember 2009, 216.

bahwa untuk masa-masa akan datang jangan sampai hal demikian dapat terjadi kembali.

Keempat, fase pengesahan. Di mana pada fase ini —setelah mengalami perdebatan sengit di antara berbagai kelompok— atas dinamika perpolitikan nasional yang memanas tersebut, maka muncullah upaya dalam menengai ketegangan yang terjadi, dibentuklah tim sembilan yang terdiri dari Soekarno, M. Hatta, A. Subarjo, M. Yamin, A. A. Maramis dari golongan nasionalis sekuler; sementara dari pihak golongan nasionalis Muslim terdiri dari Agus Salim, A. Wahid Hasyim, Abikusno, dan Abdul Kahar Muzakir. Melalui perdebatan panjang, akhirnya upaya kompromi dapat dicapai pada tanggal 22 Juni 1945, yang menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila (lima dasar), dengan menambahkan tujuh patah kata di dalam sila pertama, yaitu: *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya*. Sedang sila-sila selanjutnya sama dengan pancasila yang kita kenal hingga sekarang ini.

Tidak hanya berhenti di situ, sidang BPUPKI terus dilanjutkan dengan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang terdiri atas 15 orang. Golongan nasionalis Muslim dalam kepanitiaan PPKI hanya diwakili oleh dua orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan KH. A. Wahid Hasyim, sehingga representasi kepentingan Islam telah dipatahkan dan selalu kalah dalam persidangan. Bahkan, sehari setelah Proklamasi, tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut berhasil dihilangkan. Hal ini menunjukkan betapa kekalahan polilik Islam dalam pembentukan dasar negara Pancasila.[16] Kenyataan pahit ini memang harus diterima. Bagaimanapun juga terbukti bahwa golongan nasionalis sekuler lebih piawai dalam politik dibanding golongan nasionalis Muslim.

Deliar Noer beranggapan bahwa golongan nasionalis Muslim

---

[16] Thaba, *Islam dan Negara*, 156; K. H. Syaikh Sa'adih Albatawi & Nandang Najmulmunir, *Islam & Restorasi Pancasila*, (Bekasi: Universitas Islam "45" Bekasi, 2016), 48.

bereaksi pasif, tidak memberikan tanggapan atau protes terhadap penghapusan tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan, antara lain: *Pertama,* nasionalis Muslim yang menerima penghapusan tujuh kata dalam sila pertama tersebut adalah atas lobi Muhamad Hatta dalam pembicaraan mereka, yang terjadi pada pagi harinya, 18 Agustus 1945 untuk kepentingan persatuan bangsa, sehingga kata "*Ketuhanan*" ditambah menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Golongan Muslim menganggap "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" adalah nama lain dari *tauhid* yang dikenal dalam Islam. Sebab hanya dalam Islam yang hanya mengenal Ke-Esaan Tuhan (*tauhid*).

Kedua, suhu politik sehari setelah proklamasi kemerdekaan —terutama di Jakarta— mengalami ketegangan yang sangat tinggi. Dalam situasi seperti ini, negara perlu diredam agar situasi dingin menyelimuti Jakarta dan bumi Indonesia, dan Indonesia berada dalam kondisi yang baru saja merdeka untuk mendapatkan konstitusi secara cepat dan cocok bagi semuanya. *Ketiga,* tidak berselang terlalu lama, enam bulan setelah proklamasi keerdekaan Indonesia, golongan Muslim mengusulkan ada pemilihan umum yang diikuti oleh semua pihak (golongan nasionalis). Golongan Muslim sangat optimis bahwa proklamasi kemerdekaan ini akan diikuti oleh stabilitasasi melalui pemilu yang akan dilangsungkan. Golongan Muslim sangat optimis akan dapat memenangkan pemilu, sebab mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah penganut Islam.[17]

Prediksi kalangan Muslim ternyata meleset dengan kekalahan secara politik pada pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Pada era pasca kemerdekaan pertentangan dua kubu –golongan Muslim dan sekuler— nampaknya terus berlanjut pada saat sidang Majlis Konstituante, kalangan Muslim mengusulkan kembali "Islam sebagai dasar negara". Akan tetapi, setelah dilakukan pengambilan

---

[17] *Ibid.* , 157; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* (Jakarta: LP3ES, 1996), 41-43.

suara terbanyak 52% mendukung Pancasila sebagai ideologi negara, dan hanya 48% yang mendukung Islam sebagai ideologi negara. Hal ini menunjukkan kekalahan golongan Muslim dalam perpolitikan nasional pada saat itu.

M. Natsir adalah di antara tokoh golongan nasionalis Islam yang gencar mengusulkan ideologi Islam sebagai dasar negara. Bagi Natsir, Pancasila diambil dari pemikiran dan konsep manusia sekuler, walaupun di dalamnya ada rumusan "Ketuhanan". Sila ini tidaklah berasal dari wahyu Tuhan, Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat Nusantara.[18] Di samping itu, Natsir memiliki argumen bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga hal ini juga didasarkan kepada ajaran Islam mayoritas, sehingga sangat tepat jika Islam dijadikan dasar negara, bukan Pancasila. Alasan lain dari Natsir adalah agama Islam telah sempurna untuk mengatur hajat hidup bernegara dan bermasyarakat dan dapat menjamin hidup semua golongan. Pendapat Natsir di atas terus mendapatkan apresiasi dan dukungan khususnya dari tokoh-tokoh Muslim, antara lain: Kasman Singodimejo (Masyumi), K. H. Masykur, dan K. H. Saefuddin Zuhri (NU).[19] Walaupun kalangan Muslim menelan pahit kekalahan secara politik, namun itulah realitas politik yang harus diterima oleh semua pihak, sehingga Pancasila harus dijadikan idiologi dan *common platform* bersama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia hingga kini.

Dalam perkembangan selanjutnya, M. Natsir dan tokoh-tokoh Muslim lainnya akhirnya juga menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang awalnya sangat getol untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, namun karena secara politik kalah, maka keputusan Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai kesepakatan bersama dan inilah yang dianggap sebagai keputusan final untuk kemaslahatan bangsa

---

[18] Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, 127.
[19] *Ibid.*, 158-160.

Indonesia. M. Natsir pada peringatan Nuzulul Qur'an di bulan Ramadhan 1373H/Mei 1954 M. mengatakan bahwa "*dalam pandangan al-Qur'an, Pancasila akan hidup subur, satu dengan yang lain tidak a priori bertentangan, tapi tidak pula identik (sama)*". M. Natsir melanjutkan, bahwa "perumusan Pancasila adalah hasil musyawarah antara para pemimpin-pemimpin pada saat taraf perjuangan kemerdekaan memuncak pada tahun 1945. Saya percaya di dalam keadaan yang demikian, para pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besarnya adalah beragama Islam, pastilah tidak akan membenarkan sesuatu perumusan yang menurut pandangan mereka, nyata bertentangan dengan asas dan ajaran Islam".[20] Pernyataan M. Natsir ini seakan ingin menandaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dapat berjalan beriringan bersama. Bagaimana mungkin ajaran tauhid bertentangan dengan konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa"; bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an bertentangan dengan konsep "Keadilan Sosial"; bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang menentang kesewenang-wenangan, sistem feodalisme, bisa bertentangan dengan konsep "Kedaulatan Rakyat". Bagaimana mungkin al-Qur'an yang mengajarkan *ishlahu bain al-nas* (berbuat baiklah kepada sesama manusia), dapat bertentangan dengan konsep "Perikemanusiaan"; dan bagaimana mungkin al-Qur'an yang mengajarkan adanya pengakuan terhadap bangsa-bangsa di muka bumi, bisa bertentangan dengan konsep "Kebangsaan".[21] Demikian M. Natsir memberikan argumen dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara yang kompetibel dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Perjuangan panjang bangsa Indonesia selama tiga hari, yaitu 29 Mei-1 Juni 1945, dalam merumuskan dan memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa telah dianggap selesai setelah Bung Karno

---

[20] Lihat M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), 162.

[21] *Ibid.* ,161-162.

menyatakan dan mengesahkannya sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mencantumkannya dalam UUD 1945.[22] Oleh karena itu, melalui proses sejarah yang sangat panjang dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya, perdebatan sengit yang pernah terjadi tersebut, hendaknya diakhiri, dihargai, dijaga, dan diapresiasi, untuk tetap dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, karena yang demikian sudah merupakan kesepakatan final bersama yang harus dijaga, dilestarikan, dan diimplementasikan dalam kehidupan berasyarakat, berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia. Dalam konteks inilah, bangsa Indonesia sebenarnya bisa hidup bertetangga, berkelompok bersama, bekerja bakti bersama, bergaul dalam kehidupan sehari-hari, menempuh pendidikan dalam lembaga yang sama, saling tegur sapa, saling membantu, berolah raga dalam klub yang sama, dan saling menjaga nama baik bangsa dan negara yang mereka cintai ini. Pada masa penjajahan dahulu, mereka juga berjuang bersama untuk mengusir penjajah dari tanah air ini.[23]

Dengan demikian, kata kunci dari nilai-nilai Pancasila adalah toleransi (*tasamuh*). Toleransi atas keberagaman yang ada di bumi pertiwi ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan kepada pluralitas (kebhninnekaan) yang ada. Oleh karena itu, toleransi yang dibangun di atas keyakinan adanya saling menghormati dan menghargai perbedaan, akan dapat menciptakan harmonisasi kehidupan. Harmonisasi kehidupan yang telah terbangun akan dapat menumbuhkan kedamaian di antara warga bangsa. Oleh karena itu, keberagaman (pluralitas/kebhinnekaan) hendaknya dibiarkan secara natural untuk berkembang dan berdialektika dengan kehidupan yang ada, sehingga keotentikan dari nilai-nilai

---

[22] Baca Nono Sampono, "*Revitalisasi Nilai-Nilai Keindonesiaan Dan Ideologi Pancasila Dalam Konteks Sistim Keamanan Nasional Menghadapi Tantangan Global*", Disampaikan dalam *Sarasehan Pusbintal Mabes TNI Cilangkap*, Rabu, 28 Oktober 2015.

[23] Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia?Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2012), 16.

keberagaman tersebut menjadi kekayaan yang dapat mendorong warga bangsa untuk bisa hidup saling berdampingan dan saling membantu dalam membangun bangsa.

C. ISLAM DAN PANCASILA ERA-ORDE BARU

Orde Baru (Orba) pada rezim Soeharto dianggap sebagai era puncak kejayaan Pancasila. Sebab pada era ini Pancasila tidak hanya sebagai nama sebuah ideologi Negara semata, namun jauh lebih dari itu yaitu dijadikan alat kekuasaan yang seakan bersifat magis dan sakral, sehingga setiap derap langkah kekuasaan—yang dipimpin oleh Presiden Soeharto—senantiasa harus bahkan wajib berangkat dari sumber utamanya Pancasila. Pancasila pada eraOrde Baru sekaan menjadi alat kekuasaan yang tak tertandingi, bahkan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam berperilaku dan bersikap bagi umat Islam mayoritas di Indonesia, diabaikan. Semua komponen bangsa dalam melaksanakan aktifitasnya harus senantiasa bersumber kepada Pancasila; mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tertitnggi. Derap langkah Pancasila harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan program andalan pemerintah pada era Orba ini di antaranya adalah prgoram Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) menjadi wajib bagi setiap warga Negara mulai dari kalangan masyarakat bawah (desa) hingga masyarakat perkotaan, mulai dari instansi pedesaan hingga instansi pemerintahan di tingkat kota, mulai dari lembaga pendidikan di tingkat dasar hingga lembaga pendidikan di tingkat tinggi. Bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) penataran dan pelatihan P4 menjadi wajib jika ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pada setiap instansi pendidikan negeri dan swasta, hanyut dalam magis Pancasila, yang pada setiap kegiatan peringatan hari besar nasional senantiasa mengadakan lomba P4 dengan berbagai bentuk dan jenis lomba. Sedemikian magis dan sakral Pancasila tersebut di tangan kekuasaan Orde Baru, sehingga tidak ada

ruang bagi faham lain, apalagi ideologi lain yang tidak sefaham dengan Pancasila.[24]

Bagi para pengkaji di Indonesia dan lainnya, Pancasila di tangan penguasa Orba (Soeharto) ditafsiri secara tunggal, seolah tidak ada yang berhak memberikan tafsir dan warna lain selain pemerintah Orba. Presiden Soeharto dalam penerapan kekuasaan politik dan ekonomi, dan lainnya senantiasa menggunakan jargon Pancasila sebagai ideologi dan platform yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam setiap kesempatan, pemerintah Soeharto senantiasa mengkampanyekan demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, ekonomi yang dikembangkan adalah ekonomi Pancasila, sistem sosial-politik-budaya di Indonesia adalah sistem sosial-politik-budaya Pancasila. Akan tetapi, justru sebaliknya apa yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernagara oleh pemerintah Orde Baru, yaitu membangun sistem politik, ekonomi, sosial-budaya yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Soeharto –dalam kacamata pengkaji– dianggap sebagai penguasa tidak hanya diktator namun juga feodal, yang mengenalkan, mengembangkan, dan mempertahankan kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sebab Soeharto dalam menjalankan kekuasaannya justru sangat otoriter dan feodal. Oleh karena itu, jika selama ini Soeharto selalu membawa Pancasila dengan berbagai programnya, sebenarnya Pancasila dalam arti monolitik Soeharto, bukan pengamalan substantif nilai-nilai Pancasila sebenarnya. Dalam konteks ini, Muridan S. Widjoyo – seperti dikutip Siswanto – mencatat, bahwa semasa pemerintahan Soeharto Pancasila hanya dijadikan sebagai alat kepentingan politik pemerintah. Pancasila dan UUD 1945 tidak pernah diamalkan secara sungguh-sungguh. Pemerintahan

[24] Baca juga A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,* (Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Penerbit Prenada Media Group, 2013), Cet. 10, 26.

Soeharto membangun kekuasaan secara otoriter dan melanggar HAM, namun menamakannya demokrasi Pancasila. Soeharto juga mengembangkan ekonomi liberal, namun menamakannya ekonomi Pancasila.[25] Jelaslah bahwa tafsiran Pancasila pada era Orba adalah tunggal, pemerintah satu-satunya yang dapat menafsirkannya secara benar. Oleh karena itu, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan sebuah rezim untuk mempertahankan oligarki kekuasaan.

Munculnya konsekuensi dari penciptaan suasana ke-Pancasila-an tersebut memang tidak dapat dinafikan, misalnya dengan alasan membangun harmoni dan stabilitas dalam berbagai hal di negeri ini, baik di bidang politik, ekonomi, keamananan, kehidupan sosial-budaya, dan lain-lain. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan darinya adalah menafikan keragaman yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, sehingga segala perbedaan yang ada, apalagi tidak sejalan dengan kemauan dan kebijakan pemerintah, maka keberbedaan yang muncul harus segera diberangus, bahkan tidak jarang orang atau sekelompok masyarakat yang bersikap lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian membawa akibat dijebloskannya ke dalam penjara dengan argumen telah menciptakan kagaduan, disharmoni, dan instabilitas dalam masyarakat. Hal ini sekaligus membawa konsekuensi terhadap eksistensi paham lainnya yang tidak akan bisa hidup dan tumbuh secara bebas di bumi Indonesia selama Orde Baru.

Sepanjang pengalaman rezim Orde Baru, tidak satu pun faham, aliran, ideologi, madzhab, kepercayaan, dan agama lain apapun yang dapat hidup di bumi Indonesia sepanjang tidak sepaham dengan ideologi Pancasila. Hal tersebut di satu sisi

---

[25] Lihat Siswanto, *"Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan"*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1 Juni 2017, 56; Muridan S. Widjojo (ed), *"Wacana Politik Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998"*, Muridan S. Widjojo (ed), *Penakluk Rezim Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 248-249.

sebenarnya membawa dampak terhadap eksistensi Pancasila yang menjadi ideologi mapan tak tertandingi oleh zaman, namun di sisi lainnya, justru membawa dampak tertutupnya kran demokrasi, kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, dan bersikap. Padahal ruh dari demokrasi Pancasila adalah terbukanya kran kebebasan tersebut. Golkar (Golongan Karya) sebagai kendaraan politik pada masa Orde Baru menjadi tak tertandingi oleh partai politik manapun, sehingga Golkar dikenal sebagai *single mayority*. Inilah yang membawa Soeharto bertahan untuk memimpin Indonesia selama 33 tahun lebih. Pada masa Orde Baru pelaksanaan Pancasila didasarkan pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), merupakan amanat dari TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. Walaupun akhirnya di era Reformasi TAP MPR tersebut dicabut melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II. Dengan alasan materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, sehingga perlu dicabut.[26] Hal ini sekaligus membawa konsekeuensi tidak berlakukanya P4 lagi.

Pancasila tumbuh subur di tengah kehidupan masyarakat—pada masa Orde Baru—hanya merupakan alat legitimasi kekuasaan, sehingga sosialisasinya bersifat sangat tertutup dan tidak rasional. Masyarakat pun tidak memiliki ruang untuk mendiskusikan dan mengkritisi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga melenceng dari tujuan substantif Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. P4 yang berada di bawah pembinaan BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) telah disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi hasilnya justru bukan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, masyarakat justru

26 Siswanto, "*Transformasi Pancasila*", 61.

merasa berada dalam tekanan yang luar biasa dari pemerintah, karena sosialisasi Pancasila dilaksanakan secara instruktif, bukan didasarkan kepada kemauan yang bersifat natural (alami dan wajar) dari masyarakat itu sendiri.

Sekedar kilas balik dari dinamika panjang hubungan antara pemerintah Orde Baru dan umat Islam di masa-masa awal kemerdekaan— yang diwakili oleh partai Islam dan organisasi keagamaan, seperti Parmusi (eks-Masyumi), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, HMI — dapat diceritakan, bahwa pada pemilu pertama di masa Orde Baru tahun 1971 merupakan kesempatan baik bagi kalangan Muslim untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap rezim ini. Organisasi keagamaan Islam yang paling keras memberikan kritik adalah NU. Tokoh NU yang paling keras adalah Subchan ZE, yang menyerang Golkar dan tokoh utama di balik Orde Baru, yaitu Ali Murtopo dan Amir Mahmud. Pada masa ini banyak sekali intimidasi dari pemerintah dan angkatan bersenjata terhadap para pemilih untuk memilih partai Orde Baru "Golkar". Akhirnya partai Golkar pun menjadi pemenang dengan memperoleh suara signifikan 62,8 %, dan NU mendapat 18,7 % meningkat sedikit dibanding dengan pemilu tahun 1955 yang memperoleh suara 18,4 %. Kemudian pada tahun yang sama NU mengadakan muktamar ke-25 dengan tersingkirnya Subchan ZE dari ketua umum yang sebelumnya dijabat oleh Idham Chalid, sebagai akibat intervensi pemerintah untuk menggagalkan Subchan ZE dari pencalonannya sebagai ketua umum NU karena Subchan dianggap sangat kritis kepada pemerintah Orde Baru. Keberhasilan pemerintah mengintervensi NU dengan terangkatnya kembali Idham Chalid sebagai ketua umum merupakan keberhasilan Orde Baru untuk mempertahankan legitimasi politiknya di mata umat Islam, khususunya di kalangan warga Nahdliyyin.[27]

---

[27] Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 93-94.

Pada tahun 1968 berdiri Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), yang merupakan pengganti dari Partai Masyumi yang berdiri di tahun 1955 adalah partai politik Islam terbesar yang pernah mendapat suara besar 20% pada pemilu 1955, kemudian dibubarkan Presiden Soekarno pada tahun 1960.[28] Partai Parmusi yang didirikan oleh eks-Masyumi ternyata bernasib sama dengan NU yang tidak mendapat dukungan secara politik dari pemerintahan Orde Baru, sehingga pada pemilu di tahun 1971 pun mengalami kemerosotan yang cukup tajam dengan mengantongi suara hanya 5,4% suara, jauh di bawah NU 18,7 %. Kondisi inilah yang kemudian merubah haluan dari politik praktis ke gerakan dakwah yang mengajarkan nilai-nilai Islam. Demikian juga yang dilakukan NU. Gerakan dakwah Islamiyah seakan memberikan nuansa baru yang mendapatkan respon positif dari masyarakat Muslim Indonesia. M. Natsir yang pada saat itu menjadi wakil ketua Liga Dunia Islam (*Rabithah al'Alam al-Islami*), mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indoensia (DDII) yang mendapat sambutan baik dari kalangan Muslim Indonesia. DDII dalam konteks dakwahnya seringkali dianggap dekat dengan faham wahabi, karena kedekatan Natsir dengan Arab Saudi saat itu. DDII juga dianggap sebagai Islam puritan yang dekat dengan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin di Mesir. Natsir sangat keras mengkritik pemerintah Orde Baru, sehingga menyulitkan posisinya. Pada konteks inilah eks-Masyumi menjadi terpecah, antara yang pro Natsir dan pro pemerintah.

Masih pada tahun 1971 antara NU dan Muhammadiyah

---

[28] Perihal Partai Masyumi sebagai partai Islam terbesar, dan dalam perkembangan selanjutnya mengalami perpecahan setelah di dalamnya muncul faksi-faksi, khususnya faksi tradisonalis yang domotori NU, ada Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) di Sumatra Barat, *al-Jami'ah al-Washliyah dan al-Ittihadiyah* di Sumatra Utara, *Mathla'ul Anwar* dan Persatuan Umat Islam Indonesia di Jawa Barat, serta *Nahdlatul Wathan* di Lombok, adalah organisasi kecil dan bersifat lokal. Kaum modernis terdiri dari Muhammadiyah, dan sebagian kecil dari Persis, al-Irsyad, dan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2009) Cet. IV, 94-95.

memiliki sikap berbeda, NU tetap menjadi partai politik, dan Muhammadiyah menjadi organisasi umat yang bergerak di bidang dakwah. Suara eks-Masyumi pun ada yang menyebar ke NU dan ada juga yang bergabung di Golkar. Kondisi politik di awal-awal Orde Baru dapat membantu usaha-usaha dakwah bisa berjalan lebih efektif,[29] karena tidak ada ikatan dengan pihak pemerintah, walaupun pemerintah selalu mengawasi setiap gerak langkah gerakan dakwah setiap organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Pada tahun 1980-an pemerintah melakukan tindakan lebih represif kepada semua pihak yang tidak sejalan/menentang pemerintah. NU adalah di antara korban represif pemerintah yang diminta untuk memilih oposan atau pendukung pemerintah. Hal ini terjadi mengingat NU adalah kelompok yang sangat kritis terhadap pemerintah —dengan peristiwa *"walk out"*nya NU dari siding MPR 1978 ketika pemerintah mengusulkan adanya aliran kepercayaan yang sejajar dengan agama-agama resmi, dan upaya indoktrinasi ideologi Pancasila (menurut tafsiran Orde Baru) secara massal—,[30] sehingga dianggap sangat mengganggu stabilitas yang dibangun oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Soeharto menyerang semua pihak yang tidak mendukung Pancasila, tapi justru memilih kepada ideologi-ideologi yang menjadi saingannya seperti komunisme, marhaenisme, atau agama-agama lainnya, dan Soeharto mengancam akan menurunkan angakatan bersenjata untuk memukulnya. Pada tahun-tahun berikutnya Soeharto berulang kali mengatakan: "kesetiaan kepada ideologi-ideologi lain selain Pancasila dianggap sebagai tindakan subversi". Konsekuensinya adalah di tahun 1983 dan diaundangkan tahun 1985 "semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan diharuskan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologis (asas tunggal) –yaitu dengan mengesampingkan Islam dan pandangan-pandangan

---

[29] *Ibid.*, 97-99.
[30] *Ibid.*, 106.

dunia lain. Langkah Soeharto ini membuat umat Islam marah di hampir seluruh Indonesia, namun kemarahan umat Islam tidak membuahkan hasil kaena kuatnya rezim Soeharto, bahkan hingga terjadi peristiwa Tanjung Priok Jakarta (September 1984) dengan ditembakinya umat Islam oleh angkatan bersenjata di bawah komando Soeharto. Kejadian ini dianggap efektif untuk membungkam perlawanan terhadap Pancasilaisasi, dan akhirnya semua organisasi besar mengikuti kemauan pemerintah.

NU adalah organisasi besar pertama yang mengikuti kemauan pemerintah, yang berarti melepaskan diri dari oposisional yang dimainkan pada periode sebelumnya. Tepat pada Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama di Situbondo, Desember 1983 dan Muktamar ke-27, NU secara resmi menyatakan dukungan kepada Ideologi Pancasila dan menarik diri dari politik praktis -keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[31] Tentunya keputusan ini tidak berjalan mulus, sehingga muncul faksi-faksi di tubuh NU antara yang setuju dan menolak. Akan tetapi di bawah kendali dua tokoh yang memiliki pengaruh besar dan visi yang sama, yaitu K. H. Abdurrahman Wahid -sebagai ketua Tanfidziyah— dan K. H. Achmad Siddiq[32] -sebagai Rais Syuriah— PBNU (Pengurus Besar Nahdaltul Ulama), maka prokontra di dalam NU dapat diselesaikan dengan baik.[33] Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi politik dan massa seperti Muhammadiyah dan lainnya telah mengikuti jejak NU untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam masa-masa berikutnya NU dan Muhammadiyah —sebagai dua organisasi

---

[31] Terkait tentang dinamika kesejarahan NU, mulai dari masa-masa sebelum pendirian, masa pembentukan, masa pergolakan, hingga masa perkembangan mutakhir, baik sebagai organisasi keagamaan maupun politik, dan kembali ke khittahnya, secara khusus dapat dibaca pada Nur Khalik Ridwan, *NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

[32] Perihal kepiawaian dua tokoh Muslim tersebut dalam mengartikulasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akan didiskusikan lebih lanjut pada Bab III.

[33] *Ibid.*, 112-114.

terbesar di Indonesia – telah memainkan peranan penting dalam memantapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* yang tak tergoyahkan. Ijtihad dua ormas itu yang kemudian membawa implikasi luar biasa dalam memantapkan idelogi bangsa Indonesia di masa-masa berikutnya.

Dengan demikian, Pancasila dalam dinamika kebangsaan berikutnya pelan tapi pasti telah melebur menjadi bagian dari proses keberagamaan dan keberagaman di Indonesia, dan hubungan Pancasila-Islam sudah tidak lagi selalu konfrontatif, namun bisa saling melengkapi. Pancasila dalam konteks selanjutnya telah dapat dan mampu mengantisipasi dan membentengi Indonesia dari faham-faham dan ideologi radikal dan liberal, di saat radikalisme dan leiberalisme telah menjalar ke berbagai belahan dunia –termasuk dunia Islam. Untuk menyikapi hal tersebut, berbagai *caption* muncul di medsos (media sosial) misalnya ungkapan Buya Syafi'i Ma'arif melalui *caption* yang sering menjadi viral di medsos –facebook, wa (whatshaap), twiter, instragram, telegram, dan lain-lain yang menyatakan: "*Jika pertahanan Muhammadiyah dan NU sampai bobol dimasuki oleh teologi kebenaran tunggal (wahabisme) ini, maka Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi akan berubah menjadi ladang pertumpahan darah, dan di ujung negeri ini akan masuk museum sejarah karena eksistensinya telah dibinasakan oleh anak-anaknya sendiri yang tergiur oleh* 'misguided Arabism' *(Arabisme yang kesasar jalan) dalam bentuk radikalisme dan terorisme*". *Caption* itu muncul antara lain sebagai respon atas berbagai gerakan dan tindakan sebagian/ sekelompok orang yang berfaham radikal/puritan dengan mengatasnakan agama untuk kembali kepada syari'at Islam (syari'atisasi), dan menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia karena dianggap tidak bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga keberadaan Pancasila adalah bertentangan dengan syari'ah, karenanya harus ditolak.

D. ISLAM DAN PANCASILA DI ERA-REFORMASI

Era Reformasi dianggap sebagai era yang dapat melepaskan belenggu kediktatoran. Era reformasi menjadi harapan semua pihak untuk menjadikan Pancasila betul-betul dapat diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan secara baik. Semenjak reformasi bergulir pada tahun 1998 dengan tumbangnya rezim Soeharto yang dipelopori oleh mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyerukan agar Soeharto segera meletakkan jabatannya sebagai penguasa Indonesia, menjadi momen menentukan dalam menata kembali tentang pilar-pilar kebangsaan yang pada saat itu pilar-pilar penting kebangsaan hanya dimonopoli oleh penguasa semata dengan atas nama pelestarian dan pengamalan Pancasila. Masyarakat tidak punya peran sama sekali, sehingga yang muncul adalah kediktatoran dan tirani minoritas, berikut korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela; yang kuat memangsa yang lemah, dan seterusnya. Rakyat menjadi terbodohkan dan potret rakyat Indonesia seperti wayang yang tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh sang dalang. Dengan lengsernya rezim Orde Baru, seakan rakyat Indonesia keluar dari sarang harimau yang sewaktu-waktu menerkamnya. Itulah yang kemudan disebut sebagai era reformasi.

Era reformasi menjadikan era baru Indonesia karena terbebas dari belenggu yang selama lebih dari 30 tahun berada dalam genggaman otoritarianisme rezim Orde Baru. Era reformasi menuntun ke arah kebebasan berpendapat dan bersikap telah menemukan momentumnya. Kebebasan yang didapat rakyat Indonesia bagaikan jebolnya tanggul dari air bah yang tiada satupun yang dapat membendungnya. Dalam situasi seperti ini, muncul berbagai faham, aliran, sekte, ideologi, bahkan agama baru, yang selama ini tidak berani muncul ke permukaan atau penyebarannya secara sembunyi-sembunyi (laten), bahkan tanpa *reserve*. Mereka seakan berada dalam situasi uforia yang telah sekian lama dipendamnya. Seiring dengan era reformasi

ini Indonesia dihadapkan kepada situasi yang sulit, satu sisi runtuhnya rezim otoriter, sehingga rakyat bisa lebih terbuka dan kritis; dan di sisi lainnya memberikan ujian bagi bangsa Indonesia terhadap munculnya disintegrasi, distabilitas dan disharmoni di berbagai daerah. Misalnya lepasnya Timor-Timur dari genggaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tuntutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk lepas dari NKRI, disusul lagi oleh Gerakan Papua Merdeka (GPK). Sejalan dengan gerakan separatis tersebut, muncul konflik-konflik komunal akibat perbedaan primordialisme dan agama, seperti konflik etnis di Sambas Kalimantan, konflik agama di Ambon Maluku, hingga munculnya aliran, faham, ideologi yang tidak sepaham dengan semangat Pancasila, bahkan secara terang-terangan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.[34]

Dalam konteks ini, Indonesia telah dihadapkan pada ujian yang bertubi-tubi yang datang dari berbagai arah. Demokrasi – yang pada rezim Orde Baru – diterjemahkan hanya oleh pihak Negara dengan menamakan demokrasi Pancasila, di era Reformasi demokrasi sedang menemukan momentumnya menuju penataan demokrasi yang lebih substantif. Akan tetapi yang terjadi adalah demokrasi yang seakan tanpa arah, demokrasi yang diterjemahkan oleh warga bangsa sebagai demokrasi yang bebas tanpa filter dari nilai-nilai keadaban, kemanusiaan dan keadilan. Dalam situasi seperti inilah kemudian muncul beragam pendapat dari berbagai kalangan, sehingga muncul dua kelompok pemahaman, antara lain: Kelompok pertama, demokrasi Pancasila harus tetap dijalankan sebagai pengejawantahan dari sikap dan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia untuk dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di bumi Indonesia dengan melihat, mengkritisi, dan memahami secara proporsional terhadap demokrasi Pancasila yang disalahartikan

[34] Lihat Ubaedillah & Rozak, *Pancasila*, 26-27.

oleh rezim sebelumnya (Orba). Dalam konteks ini demokrasi Pancasila dianggap masih tetap relevan dalam membawa kehidupan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Kelompok kedua, melihat bahwa demokrasi Pancasila adalah sudah usang dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Demokrasi Pancasila harus dirubah dan diganti dengan sistem demokrasi yang lebih baik, karena demokrasi Pancasila yang selama ini diterapkan oleh rezim Orde Baru tidak dapat menjamin kehidupan warga bangsa sebagai warga yang adil, makmur dan sejahtera. Anggapan kelompok kedua tersebut memang tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab trauma psikologis dan sosial selama demokrasi berada di tangan rezim Orba telah menjadikan masyarakat berada dalam tekanan yang luar biasa.

Oleh karena itu, tidak sedikit para ahli berpandangan terhadap pentingnya menafsirkan ulang terhadap Pancasila sebagai landasan berdemokrasi di Indonesia. Azyumardi Azra menggulirkan gagasannya —dalam konteks era reformasi— tentang pentingnya "revitalisasi Pancasila" dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bagi Azra, Pancasila harus didekonstruksi melalui model-model pengajaran dan pendidikan dengan pendekatan kritis (*critical thinking*) bagi pengajar dan peserta didik. Pancasila harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan. Pancasila merupakan kekayaan luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan diimplementasikan secara baik dan benar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Yudi Latif, juga mengeluarkan gagasan "radikalisasi Pancasila", yaitu adanya revolusi gagasan untuk menjadikan Pancasila tetap tegar, eksis, efektif, dan sebagai petunjuk bagi kehidupan kebangsaan secara benar. Oleh karena itu, Kuntowijoyo memberikan lima langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap

Pancasila, yaitu:

1) Pancasila dikembalikan sebagai ideologi Negara;
2), Mengembangkan Pancasila dari sebagai ideologi menjadi ilmu;
3) Mengupayakan Pancasila memiliki konsistensi dengan produk perundang-undangan, koherensi antara sila, dan korespondensi dengan realitas sosial;
4) Manjadikan Pancasila —yang awalnya hanya melayani kepentingan vertical (Negara)— sebagai Pancasila melayani kepentingan horizontal (masyarakat); dan
5) Menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.[35] Dengan demikian, Pancasila harus dipahami, dihayati, dan dipraktekkan secara jujur, benar, dan bertanggungjawab.

Dalam konteks tata kelola sosial, politik, dan hukum Negara -menurut seorang budayawan, Abdul Hadi WM sebagaimana dikutip A. Ubaedillah dan Abdul Rozak— harus disesuaikan dengan *pertama,* azas legalitas atau legitimasi hukum yang dijalankan di NKRI yang berdasarkan Pancasila. Kedua, disahkan dan dijalankan secara demokratis. Ketiga, dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip moral. Moh Hatta pernah mengatakan, "Negara harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan agar tidak masuk ke jurang Negara kekuasaan (*machtsstaat*).[36] Jika bangsa Indonesia dapat menalankan prinsip-prinsip ini secara baik dan bertanggungjawab, maka Indonesia sebenarnya telah menjalankan apa yang telah digariskan oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena di dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan.

Di kalangan MPR sendiri ada kegelisahan dalam melihat keberadaan Pancasila,sebab MPR secara institusional selama ini dianggap sebagai pengawal empat pilar kebangsaan, yaitu

---

[35] Ibid. , h. 31.
[36] Ibid. , h. 32.

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, dan NKRI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai berikut:

> *"Kalau seluruh rakyat Indonesia mau memegang Pancasila, niscaya Indonesia akan menjadi Negara maju. Sayangnya saat ini justru kebanyakan kita malah meninggalkan Pancasila". "... kalau bangsa Indonesia memegang teguh Pancasila, maka negara akan aman dan damai. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang digali dari bumi Indonesia sendiri. " "Kalau kita bersengketa, Pancasila mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Kalau ada rakyat kesusahan, sakit, kelaparan atau tidak bisa sekolah Pancasila mengamanahkan keadilan sosial."*[37]

Era refomasi adalah sebuah era yang menandai jatuhnya sebuah rezim pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 32 tahun. Pada era reformasi ini juga sekaligus sebagai penanda jatuhnya rezim Orde Baru. Era reformasi dianggap sebgai momentum tepat dalam melahirkan ide, gagasan ataupun ekspresi dari berbagai faham, aliran, ideologi maupun partai politik —yang selama ini dimonopoli oleh pihak pemerintah. Dalam konteks Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah -yang dianggap sebagai representasi warga Muslim terbesar Indonesia — tidak lagi menjadi dwi-tunggal yang mengundang perhatian banyak pengamat asing. Padahal dalam dinamika organisasi keberagamaan di Indonesia selain NU dan Muhammadiyah, ada Persis atau Perti, al-Irsyad, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI), dan lain-lain. Organisasi-organisasi keagamaan itulah yang selalu menghiasai dalam dinamika kebergamaan di Indonesia. Organisasi keagamaan yang lahir pada era reformasi antara lain: Front Pembela Islam (FPI), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia),

---

[37] Niken Widya Yunita, , *"Ketua MPR Bicara Soal Pancasila yang Mulai Ditinggalkan,"* 29 April 2017, https://news. detik. com/berita/d-3487755/ketua-mpr-bicara-soal pancasila-yang-mulai-ditinggalkan, diakses pada 20 Mei 2017.

Forum Komunikasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan Laskar Jihadnya, dan lain-lain. Kelompok organisasi keagamaan yang lahir belakangan ini dianggap sebagai organisasi yang tidak/kurang merepresentasikan umat Islam Indonesia, sebab aktifitas gerakan dakwahnya dianggap berbeda dengan mainstream gerakan dakwah yang dilakukan oleh organisasi kegamaan yang terlebih dahulu terbentuk. Gerakan dan pendekatan dakwahnya banyak tidak sejalan (*unincontext*) dengan sosio kultur bangsa Indonesia. Lebih khusus lagi, dianggap menyimpang dari *common platform* dan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ditambah lagi dengan gerakan dakwahnya yang tidak/kurang menghargai pihak lain, bahkan sebaliknya, suka memaksakan kehendak dan mengklaim kebenaran tunggal.

Selain sangat kental dengan symbol-simbol agama, gerakannya juga lebih mengandalkan unjuk kekuatan fisik dalam menghadapi perbedaan. Slogan yang selalu dipakai adalah kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Suara lantang yang selalu didengar adalah kata "*jihad*". Jihad dalam kamus mereka tidak lagi dapat didialogkan dengan fenomena keberagamaan yang senantiasa kontekstual dengan zaman dan tempat. Jihad dimaknai tunggal dan yang memiliki otoritas dalam memaknai jihad itu sendiri juga tunggal —yaitu mereka sendiri—, sehingga ketika pihak lain memaknai jihad dengan arti yang berbeda, maka dianggapnya telah menyimpang dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, tidak jarang dijumpai dalam tata pergaulan sosial di Indonesia, adanya tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh organisasi keagamaan seperti FPI (Front Pembela Islam). Wacana dan gerakan yang mengikutinya adalah penerapan syariat Islam. Di berbagai daerah yang basis umat Islamnya kuat, hampir selalu muncul adanya tuntutan syariatisasi dalam berbagai hal. Hal ini terjadi karena memang era reformasi menjamin adanya kebebasan utnuk tiap-tiap daerah mengatur hajat hidup daerahnya masing-masing. Hal itu bagi kelompok Islam

non-mainstream menjadi semakin menemukan momentumnya di saat diundangkannya Undang-undang Otonomi Daerah (Otoda) pada masa pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid.

Di samping itu era reformasi ternyata tidak hanya menarik bagi organisasi keagamaan yang selama ini mengalami pemasungan oleh Orde Baru, namun bagi aktivis politik juga menemukan momentumnya untuk mendirikan dan/hanya sekedar mengekspresikan ide dan gerakannya. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu di awal-awal era reformasi tahun 1999 —termasuk di dalamnya adalah partai Islam. Ada sejumlah partai politik Islam yang pernah berada pada peringkat 10 besar partai politik di Indonesia, yang muncul pada kurun waktu 1998-1999, yaitu PBB (Partai Bulan Bintang), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) —yang awal pendiriannya hanya PK (Partai Keadilan)—, PAN (Partai Amanat Nasional), dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Kelima partai Islam (PBB, PPP, PKS, PAN, dan PKB) tersebut dianggap sebagai representasi dari kalamgan Muslim Indonesia baik secara ideologis, kultural maupun prakmatis. Oleh karena itu, era reformasi dianggap oleh mereka sebagai era yang sangat menntukan dalam meraih cita-cita dan harapan besar masyarakat Muslim Indonesia yang selama masa Orde Baru tidak dapat memberikan kontribusinya karena berada dalam tekanan yang luar biasa. Perjuangan umat Islam melalui partai politik yang dididrikan dalam perkembangan selanjutnya tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita awal, sehingga partai-partai Islam itu pun tidak pernah meraih suara signifikan. Akan tetapi pengalaman menariknya adalah, bahwa koalisi yang pernah mereka bangun melalui kaukus "Poros Tengah" dapat menghalangi tampilnya aliran dan kelompok nasionalis dan koalisinya, sehingga dapat memunculkan beberapa tokoh utama Muslim pada posisi-posisi strategis di lembaga eksekutif dan legistatif. Seperti tampilnya Amin Rais sebagai ketua MPR-RI dan K. H. Abdurrahman

Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden.[38] Walaupun kemudian terjadi dinamika politik yang mengantarkan Gus Dur diimpeach (dilengserkan) oleh MPR-DPR dari kursi kepresiden dengan alasan *bulog gate*, yang hingga kini tidak dapat dibuktikan secara hukum.[39]

Terlepas dari dinamika politik yang berkembang, tampilnya tokoh-tokoh Islam itu membuka kran politik Indonesia semakin cair, terbuka, dan demokratis. Geliat perubahan faham dan gerakan keagamaan yang digerakkan oleh tokoh-tokoh Muslim pada masa reformasi ini sebenarnya mennjukkan hal positif, karena dapat membangun masyarakat yang adil, beradab, dan kritis. Bahkan peradaban Islam semakin maju dengan munculnya ormas-ormas Islam yang dapat mengembangkan dirinya, dengan kembali ke Islam dan tidak terkekang oleh salah satu asas saja.[40] Walaupun seiring dengan perjalanan waktu, ormas-ormas Islam tersebut ada yang kebablasan untuk menolak azas Pancasila sebagai ideologi, dan memaksakan untuk kembali kepada syari'at Islam, sehingga dalam perkembangan selanjutnya justru membuat repot seluruh warga bangsa.

Ekses-skses lainnya sebagai konsekuensi dari hadirnya era reformasi adalah munculnya partai-partai politik Islam pasca reformasi yang memiliki dua aliran/pandangan berbeda dan saling bertentangan. Aliran pertama,berpegang pada simbolisasi syariat dalam berbagai hal kehidupan, termasuk penerapan dalam pemerintahan. Partai yang masuk pada aliran pertama ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan

---

[38] H. Asyari dkk,*Pengantar Studi Islam,*(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005),295-296.

[39] Kejadian tersebut berjalan dramatik dan tragis, khususnya bagi kalangan Nahdliyyin (NU) yang hingga kini nampaknya tidak mudah untuk dapat dilupakan, apalagi penggerak impeachment itu adalah tokoh Muhammadiyah, Amin Rais yang pada itu menjabat sebagai ketua MPR RI. Kejadian ini menjadi trauma dalam sejarah perpolitikan Nasional, sehingga sedikit atau banyak akan berpengaruh kepada dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia. Sebab antara NU dan Muhammadiyah selama ini dianggap sebagai representasi umat Islam terbesar di Indonesia.

[40] Abu Bakar dan Istianah,*Sejarah Peradaban Islam,*(Malang: UIN Malang Press, 2008), 20.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Aliran kedua, menganggap sombol syari'at bukanlah hal utama, yang paling penting adalah maksud ditegakkannya syari'at Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik secara lahir maupun batin yang tetap dalam cita-cita bersama dalam wadah NKRI. Oleh karena itu, kelompok kedua ini berpendapat bahwa tidak perlu adanya syari'atisasi dalam pemerintahan. Kelompok kedua diwakili oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).[41]

Era reformasi telah membawa dampak kepada partisipasi masyarakat yang lebih dinamis dan luas. Kaum intelektual akademisi dan ulama yang pada era sebelumnya tidak dapat/ memang sengaja tidak diberi kesempatan dalam keiukutsertaanya dalam berpolitik secara langsung, pada era reformasi justru sebaliknya, peran para inteketual akademisi dan ulama/kyai justru memiliki peran signifikan dalam perpolitikan nasional di awal-awal reformasi, tahun 1999-nan. Dari kalangan ulama NU misalnya tampil K. H. Abdurrahman Wahid yang memelopori lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari kalangan intelektual Muhammadiyah misalnya Amin Rais yang membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN), Yusril Ihza Mahendra-eks Masyumi yang mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), dan aktifis Muslim kampus juga ikut ramai-ramai mendirikan Partai Keadilan (PK).

Kehadiran para ulama dan intelektual muslim dalam perpolitikan Indonesia mestinya dapat memberikan kontribusi positif, yaitu pada bangunan struktur politik yang bermoral, karena mereka adalah simbol moral itu sendiri. Akan tetapi ketika mereka sudah terpolarisasi dengan kepentingan politik sesaat dengan tidak mengindahkan kepentingan yang lebih besar dan luas untuk kepentingan bangsa dan negara, maka yang terjadi

---

[41] R. Sukma & C. Joewono (ed.), *Islamic Thought and Movements in Contemporary Indonesia, Centre for Strategic and International Studies*, 2007, 148-152.

adalah saling konfrontasi anatra ulama satau dengan lainnya, antara intelektual Muslim satu dengan lainnya karena pilihan politiknya yang berbeda. Hal demikian justru merugikan Islam dan umat Islam akan terpecah, bahkan tidak jarang dimanfaatkan oleh kepentingan politik yang bersumbu pendek, yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.[42] Kebebasan sebagai akibat dari dinamika perubahan dari Orde Baru ke era reformasi memang memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan di Indonesia, namun kebebasan yang ada tersebut harus dilihat dan disikapi dengan bijak dan kritis, sehingga cita-cita luhur reformasi dapat diimplementasikan secara baik dan benar.

Pancasila dalam konteks kebangsaan era reformasi, sebagai sumber nilai yang bersifat relatif reformatif, artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa relatif mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan zaman, yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Akan tetapi nilai-nilai esensialnya bersifat tetap yaitu "Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan" sebagaimana yang terdiskripsikan sila-silanya dalam Pancasila.

Terlepas dari kelemahan masa-masa sebelumnya, mengacu kepada konsensus dasar dari kedirian bangsa ini, Pancasila harus tetap dijadikan ideologi kebangsaan. Pancasila harus tetap menjadi dasar dari penuntasan persoalan kebangsaan yang kompleks seiring dengan arus globalisasi yang seakan mendikte dan menekan semua pihak, munculnya krisis ekonomi dengan berbagai dampaknya, dinamika politik lokal masih belum stabil, dan meletupnya intoleransi yang sewaktu-waktu bias muncul ke permukaan atau segregasi sosial dan konflik komunalisme yang masih rawan. Dalam kaitan ini, maka yang diperlukan

---

[42] Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,), 89-91.

saat ini adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[43]

Pancasila dengan dinamikanya yang berkembang hingga perjalanan reformasi di abad ini semakin menunjukkan eksistensinya, bukan hanya kepada warga bangsa Indonesia, namun juga kepada warga dunia, bahwa Pancasila dianggap ideologi Negara paling ideal jika dibanding dengan ideologi lainnya yang ada di nerara-negara lain di dunia. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai problem komunal yang terjadi hampir di sebagian besar belahan dunia—baik di dunia Islam maupun non-Muslim—seakan tidak ada alat/instrument paling baik yang dapat menyelesaikan semua problem yang muncul tersebut, justru Indonesia telah mampu menangkal problem-problem tersebut. Saat ini Indonesia menjadi model negara damai[44] dengan ideologi Pancasila yang tidak bertentangan dengan Islam sebagai ajaran mayoritas bangsa Indonesia. Inilah yang kemudian menarik bagi dunia luar untuk memperbincangkan perihal harmonisasi yang berjalan baik, di mana Indonesia yang mayoritas penduduknya penganut Islam justru dapat berjalan secara baik dan harmonis bersama demokrasi yang konon adalah

---

[43] Lihat "*Nilai-nilai Pancasila pada Masa Reformasi-Sekarang*", dalam https://muhammad mukhyar. blogspot. com/2014/01/nilai-pancasila-pada-masa-era-reformasi. html, diakses 16 Agustus 2018.

[44] Indeks Perdamaian Global (*Global Peace Index* [GPI]), mencatat kawasan Timur Tengah sebagai kawasan paling berbahaya tingkat keamanannya, karena saat ini sedang menghadapi peperangan/konflik, yaitu: Suriah, Libya, Yaman, Irak dan sekitarnya. Ada 162 negara menurut GPI yang paling rendah tingkat keamanannya, antara lain Negara Suriah, Irak, Afgahanistan, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah. Suriah dianggap sebagai Negara paling berbahahaya. Sedangkan Indonesia, berada pada urutan ke-46 negara terdamai (kategori damai tinggi), menjadi satu kelompok dengan Perancis, Italia, Inggris, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Malasyia, dan sejumlah negara lainnya. Adapun Negara Eslandia, Denmark, Austria, Selandia Baru, Swiss, Finlandia, Kanada, Jepang, Australia dan Ceko, berurutan sebagai Negara paling damai di dunia (kategori damai sangat tinggi). Baca Syamsun Ni'am & Anin Nurhayati, *Tasawuf Kebhinnekaan Perspektif Sufi Nusantara*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2018), 2.

produk Barat (non-Muslim). Dengan kata lain, bagi umat Islam Indonesia, pandangan tentang Islam dan Negara adalah satu dan bisa dipertemukan, tidak perlu dan tidak harus dikonfrontasikan.

E. FENOMENA GERAKAN DE-IDEOLOGISASI PANCASILA DI INDONESIA

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang menjadi landasan dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini segala perilakuwarga bangsanya tidak boleh kontras dengan aturan-aturan dan keputusan-keputasan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam dinamika sejarah perjalanannya yang sangat panjang, Pancasila telah mengalami ujian yang luar biasa. Sebenarnya bibit-bibit pertentangan tentang peletakan dasar Negara pada masa-masa awal perjuangan hingga kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah sudah mulai terlihat,misalnya munculnya gerakan NII (Negara Islam Indonesia) merupakan ancaman serius dalam merongrong eksistensi kebangsaan Indonesia yang plural dan multikultural. NII adalah kelompok gerakan yang ingin mengawali dengan menawarkan syari'at Islam dalam tata hidup kebangsaan.

Secara politis di awal kemerdekaan, tahun 1945 terbentuk partai masyumi yang dibidani oleh tokoh-tokoh —oleh Andar Nobowo disebut— Muslim demokrat yang akan memilih gagasan demokrasi Islam, bukan Negara Islam. Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, karena ada pengaruh dari Muslim politik ortodoks, Masyumi nampaknya cenderung kepada nalar syari'atik dengan mendukung adanya tujuh kata dalam Piagam Jakarta "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Akan tetapi dukungan Masyumi ini kemudian ditentang oleh kelompok nasionalis dengan mengedepankan argument bahwa, jika tujuh kata tersebut diterapkan dalam kehidupan kebangsaan,

maka hal ini sama saja dengan pengkhiantan terhadap pluralitas dan multikulturalitas yang sudah sekian lama dimiliki dan diterapkan oleh bangsa Indosneia. Tokoh Muhammadiyah dan Masyumi seperti Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh Muslim lainnya akhirnya menerima masukan dari kelompok lainya dengan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut pada 22 Juli 1945.[45]

Keputusan inilah yang kemudian memunculkan pertentangan di kalangan umat Muslim saat itu, khususnya perihal apakah dasar Negara diatur secara sekuler atau secara agama. Muhammad Roem sebagai tokoh Masyumi menghendaki untuk tetap berpegang pada Piagama Jakarta, sementara tokoh Muslim demokrat berargumen bahwa tiada satu pun ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang secara terang-ternagan memerintahkan untuk membentuk Negara Islam. Dalam konteks inilah kemudian melahirkan dua kelompok/faksi politik. Faksi pertama adalah faksi syari'atik, yang mengehendaki syari'at Islam dijadikan landasan dalam mengatur tata kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara faksi kedua adalah faksi Islam radikal, yang menginginkan terwujudnya Negara Islam yang dipelopori oleh SM Kartosuwiryo, pendiri Negara Islam Indonesia (NII).[46]

Islamis-politik semakin kecewa ketika partai Masyumi dibredel oleh Soekarno pada tahun 1960 dengan alasan karena adanya tokoh Masyumi yang terlibat dalam Pemberontakan PRRI/Permesta, sehingga Soekarno melakkan pemasungan

---

[45] Dalam merespon situasi seperti itu, Soekarno melakukan pidato di hadapan para tokoh Muslim dengan mengatakan: "Saya minta, suadara Ki Bagus Hadikusumo dan suadara-saudara Islam lain: Maafkan saya memakai perkataan, kebangsaan ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakana bahwa pada dasar pertama buat Indonesia adalah dasar kebangsaan. Lihat Safroedin Bahar dan Nani Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 92.

[46] Baca Andar Nobowo, "Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi", *Jurnal Keamanan Nasional Vol. I*, No. 1 2015, 62-63.

terhadap tokoh-tokoh Masyumi. Setelah Orde Lama tumbang dengan digantikan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto, sebenarnya tokoh-tokoh Masyumi tersebut ingin namanya direhabilitasi, namun Soeharto juga tidak berkenan dengan alasan yang sama, yaitu keterlibatan mereka pada PRRI/Permesta pada tahun 1958. Kondisi ini kemudian mebawa dampak kepada munclnya radikalisasi pada tokoh-tokoh eks-Masyumi tersebut dengan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) tahun 1967 yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Melalui sebuah majalah Media Dakwah, mereka melakukan propaganda terhadap mistik kejawen, Amerika dan Yahudi.

Kehadiran DDII dianggap sebagai pemicu lahirnya gerakangerakan dakwah dan politik lainnya yang cenderung lebih radikal di Indonesia. Kelompok-kelompok radikal tersebut dapat dilihat dari pengiriman para pelajar/mahasiswa Muslim untuk belajar ke Arab Saudi dan Negara Timur Tengah lainnya dengan beasiswa yang disponsori oleh DDII yang bekerjasama dengan Rabithah Alam Islami. Konsekuensinya adalah tidak sedikit hadirnya para pemimpin baru dari kelompok radikal Islam tersebut alumni dari Timur Tengah. Kelompok-kelompok radikal ini kemudian diikuti oleh faham radikal lainnya di awal tahun 1980, yaitu Wahabisme, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir, yang secara sembunyi-sembunyi melakukan kaderisasi terhadap generasi muda Islam melalui pendidikan di pesantren dan sistem usroh di kampus-kampus.[47] Kelompok-kelompok inilah yang kemudian dianggap sebagai cikal-bakal lahirnya faham radikal di Indonesia yang sangat kontras dengan kultur dan sistem sosial-politik di Indonesia. Karena itu kelompok-kelompok ini dianggap sebagai faham yang diimpor dari luar Indonesia, sehingga disebut sebagai kelompok trans nasional.

Kelompok-kelompok radikalis dalam perkembangan selanjutnya telah merongrong kewibawaan Pancasila berikut

---

[47] *Ibid.*, 64.

atribut yang melekat padanya, misalnya pilar-pilar kebangsaan seperti Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI dianggapnya sebagai pilar yang menyalahi syari'at Islam dan harus diganti dengan sstem khilafah. Karena empat pilar kebangsaan tersebut di mata kelompok radikalis dianggap sebagai produk kaum kafir (*thaghut*), sehingga keberdaannya harus ditolak. Kelompok paling getol—khususnya yang muncul di era reformasi—adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin, dan lain-lain. Jika dirunut ke belakang, kelompok-kelompok radikalis tersebut sangat *uncontext* dengan kultur sosial-politik di Indonesia. Jelas mereka adalah organisasi massa yang trans nasional (hasil impor) dari luar Indonesia. Gerakan inilah yang kemudian disinyalir sebagai embrio munculnya gerakan de-ideologisasi Pancasila.

Belakangan juga muncul gerakan yang berusaha mendelegitimasi Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan yang membuat galau banyak kalangan adalah muculnya gerakan deideologisasi pancasila dan radikalisme di kalangan para pelajar dan mahasiswa. Ditemukan sejumlah survei yang hasilnya cukup mencengangkan. Laporan Saiful Mujani misalnya menyebut bahwa radikalisme di kalangan remaja Indonesia sudah berada dalam tahap mengkhawatirkan. Menurut Mujani, sebanyak 6,12 % menyatakan setuju pada pengeboman yang pernah dilakukan Amrozi cs, dan itu merupakan perintah agama; 40,82 responden menjawab "bersedia", dan 8,16 % responden menjawab "sangat bersedia" melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam; dan sebanyak 9,2 % responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.

Sementara Wahid Foundation —seperti dikutip Khofifah Indar Parawansa— memberikan laporan terdapat 7,7% responden bersedia melakukan tindakan radikal jika ada kesempatan, dan sebanyak 0,4 % pernah melakukan tindakan radikal. Walaupun tercatat kecil, namun hal tersebut merupakan bahaya yang mesti

diantisipasi, mengngat konsekuensi lanjutan yang di timbulkan dalam kelangsungan hidup kebangsaan lebih luas, baik sosial, politik, budaya, dan lainnya. Usia pelajar adalah masa-masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga mudah sekali berubah dan dimungkinkan radikalisme akan tumbuh membesar jika lingkungan hidup dan kehidupannya memang mendukung ke arah tersebut.[48]

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya radikalisme tersebut, antara lain karena guru atau pengajar yang memang berafiliasi atau bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional, melalui indoktrinasi ajaran kepada anak-anak muda untuk mendukung khilafah. Selain itu, muncul dan tumbuhnya radikalisme adalah karena pengaruh derasnya arus informasi melalui media sosial (medsos) dan intermet yang sedemikian dahsyat. Dalam konteks ini, akan sulit memfilter dampak negative dari derasnya arus informasi tersebut.[49]

Radikalisme terjadi karena adanya pemahaman tidak hanya menyangkut agama dan lainya secara sempit, namun juga tidak dinafikan adanya faktor lain yang memang memungkinkan untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai dan ajaran radikal. Oleh karena itu, siapapun akan memiliki kesempatan dan dapat berbuat radikal/kekerasan dengan alasan yang berbeda-beda. Dalam konteks kehidupan kebangsaan di Indonesia, pemahaman agama secara sempit bukanlah satu-satunya faktor pemicu munculnya radikalisme, namun juga faktor lainnya, seperti keadilan yang

---

[48] Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan dalam membendung arus radikalisasi atas nama apapun di Indonesia, misalnya melalui pendidikan—apakah menyangkut mataeri/kurikulum, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Baca Elva Yohana, "*Pendidikan Multikultural dan Ikhtiar Menangkal Paham Radikal*", dalam Saiful Mustofa (Peny.), *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI,* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), 13-24.

[49] "Survei: 40,82 Persen Pelajar Bersedia Menyerang Orang yang Menghina Islam", dalam http://www. tribunnews. com/nasional/2017/07/17/survei-4082-persen-pelajar-bersedia-menyerang-orang-yang-menghina-islam.

masih belum merata, kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak terdistribusikan secara baik, dan lain-lain. Kondisi inilah yang kemudian menjadi penyebab timbulnya ketidakpuasan dari kelompok lain, sehingga pelampiasannya dapat diartikulasikan melalui tindakan yang bersifat ideologis dan juga pragmatis.

De-ideologisasi Pancasila yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan di antaranya adalah disebabkan oleh kondisi dan situasi tersebut. Gerakan menuju ke sana sudah mulai tampak sejak awal reformasi berjalan hingga saat ini. Hal itu terjadi katrena Pancasila -selama Orde Baru— hanya ditafsiri dan dipahami secara mono penafsiran dan mono pemahaman, dan menafikan kontribsi kritis dari pihak lain selain pemerintah Orde Baru, sehingga Pancasila tidak dapat membumi secara efektif. Pancasila hanya dijadikan kedok stabilitas dan harmonisitas sebuah rezim. Di samping itu, juga tidak dapat disalahkan jika adanya pendapat yang mengatakan bahwa upaya de-ideologisasi Pancasila itu dapat berkembang, karena memang ada pembiaran —bahkan dininabobokan— dari pihak pemerintahan, khususnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono selama dua periode. Oleh karena itu, puncak dari gunung es yang kemudian cair untuk melakukan gerakan de-idelogisasi Pancasila, anti NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada pemerintahan setelahnya adalah getah dari seluruh kondisi yang telah tercipta secara baik pada masa-masa sebelumnya.

Ada beberapa hasil survey yang penting utnuk dicermati dalam merespon adanya upaya de-ideologisasi Pancasila di Indonesia. Hasil Survey Saiful Mujani Research and Conculting (SMRC) melaporkan, ada 79,3% responden yang menyatakan setuju terhadap NKRI dan terbaik bagi bangsa Indonesia hingga saat ini, dan 9,2% responden setuju NKRI diganti denga system khilafah, sementara 11,5% responden lainya mengaku tidak tahu/ tidak menjawab. Demikian juga hasil survey yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang gerakan intoleransi.

Ada 76% setuju dengan tetap menggunakan Pancasila dalam tata kebangsaan dan 84% sepakat dengan adanya NKRI beridiologi Pancasila. Sedangkan bagi yang sepakat dengan inspirasi ajaran Islam sebanyak 22,8%.[50] Dengan demikian, survey tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa memang ada potensi nyata terhadap eksistensi NKRI dan Pancasila yang telah dibangun selama sekian lama di Indonesia.

Gerakan politik yang sangat kencang dalam rangka deidelogisasi Pancasila adalah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI sangat getol dalam memperjuangkan Negara khilafah yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jika dilihat sedikit ke belakang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah satu organisasi politik keagamaan yang tidak bisa dilepaskan dari Hizbut Tahrir (HT) yang muncul pertama kali di Palestina, pendirinya adalah Taqiyuddin al-Nabhani pada 1953. Sistem politik yang ingin dibangun adalah *khilafah al-Islamiyah.* Gerakan politik ini yang awalnya hanya di Palestina, kemudian merangsek ke berbagai Negara di dunia, termasuk ke Indonesia di awal tahun 1980-an.

Tujuan Hizbut Tahrir dapat dilihat dari konsep politiknya yang mengkalim dirinya dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, dan telah diartikulasikan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga jatuhnya kekaisaran Turki Usmani (abad 18 M).[51] Taqiyuddin menyebutkan dalam dua karyanya, *Daulah*

---

[50] Lihat Abd Khair Wattimena, *"Upaya Penegasan Islam Kebangsaan: Kajian Perppu UU No. 2 Tahun 2017"*, dalam Saiful Mustofa (Peny.), *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI,* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), 40.

[51] Tuntutan *khilafah* yang didengungkan HT (Hizbut Tahrir) di seluruh dunia, merupakan tindakan fiktif dan tidak ada dasar hukumnya dalam Islam secara jelas (*sharih*) baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Oleh karena itu, perintah khilafah merupakan hasil *ijtihad* dari ulama Islam, sehingga hal tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diberlakukan dalam konteks pemerintahan. Baca Nadirsah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No: Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa al-Rasyidin hingga Umayyah,* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), Cet. III, 34-46.

Islam dan *Mafahim Hizbut Tahrir* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI (hizbut Tahrir Indonesia) Press sejak 2004 dan 2007, "generasi umat Islam saat ini sudah tidak tertarik dengan konsep khilafah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam". Generasi sekarang tidak pernah memiliki gambaran, sehingga umat Muslim lebih memilih falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Taqiyuddin berpendapat, bahwa kondisi seperti ini merupakan kemunduran besar bagi kaum Muslimin. Taqiyuddin menyebtunya dengan *ghazwu al-tsaqafi* (invasi budaya) yang menyebabkan kaum Muslimin tidak mau memakai syari'at Islam pada sistem pemerintahannya.

Dalam konteks Indonesia, HTI adalah gerakan yang sangat membahayakan NKRI dan Pancasila sebagai ideloginya. Oleh karena itu, keberadaan HTI harus ditolak secara bersama-sama. Kelompok yang sangat getol dalam menolak gerakan anti NKRI dan Pancasila yang dilakukan HTI adalah Nahdlatul Ulama (NU) dengan berbagai afiliasinya. Hal ini terjadi mengngat HTI semakin massif dan berani dalam memperjuangkan khilafah di Indonesia. Apalagi disinyalir –secara politik– ada yang membackupnya, sehingga HTI semakin berani dan leluasa dalam mengembangkan misinya. Bagi kalangan NU, HTI dianggap sebagai benalu yang sudah meresahkan kehidupan kebangsaan, yang selama ini telah terjalin secara baik dan harmonis. Bagi NU, NKRI adalah harga mati, Pancasila adalah sebuah ideologi yang tidak dapat ditawar dan diutak-atik keberadaanya, bhinneka dianggapnya sebagai *sunnatullah* yang tidak dapat diberangus begitu saja, karena dengan memberangus kebhinnekaan sama halnya mengingkari kemajemukan yang diciptakan oleh Allah SWT. Justru kebhinnekaan itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia.[52] Karena itu, mengutak-atik dan menolak kebhinnekaan

[52] Lihat Ni'am dan Nurhayati, *Tasawuf Kebhinnekaan*, 176-177.

dan Pancasila, sama saja dengan mengkhianati segala ijtihad dan jihad para founding fathers (pendiri bangsa) –termasuk di dalamnya adalah para ulama Nusantara yang tidak diragukan integritasnya– dalam mempertahankan NKRI dan memilih Pancasila sebagai ideologinya.

Di antara contoh paling update terkait dengan gerakan HTI untuk memperjuangkan konsep khlafahnya dan para penentangnya, misalnya yang terjadi di Tulungagung, ada sekelompok rombongan aksi yang menamakan diri Kirab Panji Rasulullah melewati perbatasan Trenggalek-Tulungagung, Jawa Timur yang dihadang oleh masyarakat sekitar.[53] Rombongan dengan jumlah hanya puluhan orang dengan atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dihentikan paksa oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) setempat.

Ada juga aksi yang sama di Maluku Utara, tanggal 20 April 2017, yaitu terdiri dari organisasi pemuda, masyarakat, serta LSM yang mendeklarasikan penolakan terhadap keberadaan HTI. Melalui ketua Nahdlatul Ulama Kota Ternate, Dr. Adnan Mahmud menyatakan bahwa masyarakat Maluku Utara menolak seluruh kegiatan dan ajaran ideologi HTI di daerah Ternate. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Ketua GP Anshornya, Abdul Muis juga melakukan hal yang sama. Gerakan khilafah HTI dinilai sudah sangat massif dan terang-terangan dengan membentangkan berbagai atribut dan poster besar di beberapa ruas jalan di sepanjang Kota Kupang dan sekitarnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Koalisi Pemuda Bangsa Penjaga Benteng NKRI di Sulawesi Tengah, hingga pembatalan acara Tabligh Akbar HTI di Makassar, Sulawesi Selatan dan Bantul, Yogyakarta.

---

[53] Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 April 2017, pada pagi hari sekitar pukul 7. 00. Adu mulut terjadi karena anggota Banser meminta seluruh rombongan melepaskan atribut HTI maupun bendera-bendera yang dibawapeserta aksi yang awalnya menolak dan kukuh tidak akan melepaskan atribut. Situasi menjadi terkendali setelah aparat keamanan datang dan berhasil memediasikeduanya.

Tindakan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di hampir menyeruak di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena bentuk ketidaksimpatikan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya organisasi/kelompok-kelompok radikal apapun yang merongrong NKRI dan Pancasila, termasuk HTI.

Tampilnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2015 sebagai pengganti Susilo Bambang Yudoyono adalah titik kulminasi dari pertentangan politik dan ideologis bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI dan Pancasila. Fenomena di atas merupakan respon spontan dari kalangan masyarakat Indonesia yang selama ini sangat gelisah terhadap keberadaan kelompok/organisasi yang merongrong Pancasila sebagai ideologi bangsa dan NKRI sebagai wadah dalam hidup satu rumah tangga Indonesia. Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden merasa punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kesepakatan yang telah diikat dalam sumpah dan janji para *founding fathers* tersebut.

Dalam kaitan ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi, antara lain pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo membuat video singkat yang menyatakan "Saya Pancasila". Berlatar bendera merah putih, Jokowi mengakhiri video 34 detik itu dengan kalimat, "Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila". Gerakan "Saya Pancasila" demikian cepat menyebar melalui media sosial (medsos). Video yang sempat viral di medsos tersebut, membuat munculnya pendapat beragam, antara yang pro dan kontra. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, video Jokowi sebenarnya dapat menjadi pengingat dan penting bagi semua kalangan untuk melawan arus anti Pancasila dan NKRI yang semakin nyata. Pernyataan presiden Jokowi ini muncul dua hari menjelang hari lahir Pancasila, 1 Juni, seiring penyelenggaraan pekan Pancasila, tepatnya tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2017. Apa yang dilakukan Jokowi kemudian diikuti oleh seluruh pejabat pemerintah dan berbagai kalangan masyarakat Indonesia, semua

kompak menyuarakan tagar "Saya Pancasila" dalam berbagai cuitan pada akun media sosial. Tindakan Jokowi tersebut paling tidak memberikan dampak terhadap *image building*, bahwa seluruh masyarakat Indonesia masih tetap berpegang teguh pada kesepakatan para *founding fathers* dalam melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindakan nyata dari pemerintahan Jokowi adalah pembubaran HTI pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut secara resmi status badan hukum organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30. AH. 01. 08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028. 60. 10. 2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Surat pencabutan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.[54]

Ada tiga argumen utama yang diajukan pemerintah dalam pembubaran HTI yaitu; *Pertama*, sebagai ormas (organisasi massa) yang berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. *Ketiga*, aktivitas HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, upaya de-ideologisasi Pancasila dari manapun datangnya harus ditolak bersama demi menjaga NKRI.

---

[54] Wattimena, "*Upaya Penegasan Islam Kebangsaan*", 37-38.

Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun juga seluruh elemen bangsa. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kekayaan yang sangat luar biasa di saat dunia luar mengalami krisis kemanusiaan karena tidak ada ideologi yang dapat menjadi filter dan perisai dalam menghadapi arus globlalisasi yang demikian hebatnya. Paling tidak Pancasila telah membuktikan kehebatannya dalam mengarungi berbagai ujian dan cobaan dalam mempertahnkan persatuan dan kesatuan. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah terus menjaga, melestarikan, dan mengimplementasikan secara konsekuen nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan yang plural dan multicultural ini. Bukan tidak mungkin akan muncul HTI-HTI gaya baru dengan modus dan strategi baru untuk mendistorsi dan mendelegitimasi Pancasila di bumi Indonesia setelah dilakukan pembubaran oleh Pemerintah dengan PERPPU tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan, saat ini HTI dan berbagai ormas yang berafiliasi dengannya justru menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu akan melakukan tindakan makar lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber atau data-data kepustakaan yang memiliki kaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, ada empat persoalan penting yang perlu dikemukakan, yaitu: Sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pendekatan.

A. SUMBER DATA

Setiap penelitian, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber data primer (*primary resources*) maupun sekunder (*secondary resources*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya asli dari empat tokoh Muslim kontemporer Indonesia, khususnya yang menyangkut pemikiran hubungan Pancasila dan agama. Selain dari karya-karya tersebut, —termasuk tulisan orang lain mengenai sejarah pemikiran, praktek, dan gerakan keagamaan dan kebangsaan tokoh Muslim kontemporer Indonesia, atau sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini— bisa dikategorikan sebagai sumber data sekunder.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik documenter dan *in-depht interviews* (wawancara mendalam). Teknik documenter digunakan untuk menelusuri pemikiran, ajaran dan konsepsi keagamaan dan kebangsaan melalui tulisan-tulisan empat tokoh Muslim Indonesia yang telah terpublikasikan atau tidak, seperti catatan pribadi/ harian, rekaman pidato, catatan pengajian, dan sebagainya.

C. ANALISIS DATA

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara diskripsif analitis. Cara ini digunakan melalui langkah-langkah, yaitu mendiskripsikan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan pemikiran, ajaran dan praktek kebergamaan dan kebangsaan empat tokoh Muslim kontemporer, seperti: dasar pemikirannya, genealogi intelektual, ajaran dan praktek keberagamaan dan kebangsaan yang dikembangkan, dan implikasi ajaran, pemikiran dan praktek keberagamaan dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langkah berikutnya, dilakukan analisis terhadap pemikiran, ajaran penting, dan praktek keberagamaan dan kebangsaan tersebut. Dalam analisis ini juga digunakan analisis kritis dan komparatif. Analisis kritis digunakan untuk menilai dan mengkritisi pemikiran, ajaran, dan praktek keberagamaan dan kebangsaan empat tokoh Muslim kontemporer Indonesia dari segi kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya analisis komparatif dipakai untuk membandingkan pemikiran, ajaran, dan praktek kebergamaan dan kebangsaan empat tokoh Muslim Indonesia dengan tokoh-tokoh Muslim dunia lainnya yang hidup lebih awal; sehingga dari analisis tersebut dapat ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti, yaitu pemikiran, ajaran, praktek dan implikasi yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, beragama, dan bernegara.

D. PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-sosiologis. Pendekatan ini digunakan mengingat material penelitian ini berkaitan dengan pemikiran tokoh melalui karyakaryanya di masa lalu, dengan melihat situasi dan kondisi historis dan sosiologis yang melatarbelakangi kehidupannya. Pendekatan ini dipakai, dalam rangka untuk menggali data yang terkait langsung dengan perkembangan sosio-politik, yakni perkembangan kekuasaan, pemikiran dan aliran yang berkembang di dunia, khususnya di Indonesia. Dari perkembangan sosiopolitik itulah, diharapkan dapat mempertajam penelitian ini, sehingga ditemukan spesifikasi pemikiran, ajaran dan praktek keberagamaan dan kebangsaan empat tokoh Muslim kontemporer Indonesia, yang kelak berimplikasi pada pandangan dunia tentang visi Indonesia ke depan dalam membangun Indonesia yang lebih bermartabat, adil, makmur dan sejahtera dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI).

E. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu: Bab satu terdiri dari pendahuluan yang mencakup: Konteks penelitian, rumusan dan pembatasan penelitian, tujuan penelitian, target penelitian, dan penelitian terdahulu. Sedangkan pada bab dua dibahas tentang kajian teoritik Islam *vis a vis* Pancasila yang memuat: Piagam Madinah; sumber inspiratif hubungan dialektis Pancasila dan Islam, dinamika pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa, Islam dan Pancasila era Orde Baru, Islam dan Pancasila era Reformasi, dan fenomena gerakan de-ideologisasi Pancasila di Indonesia. Kemudian pada bab tiga dijelaskan seputar

metode penelitian yang mencakup hal-hal: Sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan, dan sistimatika pembahasan.

Adapun pada bab empat membahas perihal temuan dan pembahasan yang mencakup: Pandangan tokoh Muslim Indonesia tentang hubungan Pancasila dan Islam, dan upayanya dalam membendung deideologisasi Pancasila (K.H. Achmad Siddiq, K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Harun Nasution, dan Prof. Dr.Nurcholish Madjid), dan implikasi dari pandangan tokoh Muslim Indonesia tersebut mengenai hubungan Pancasila dan Islam terhadap kehidupan kebangsaan.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dielaborasi poin-poin penting dari pandangan empat tokoh Muslim Indonesia tentang hubungan agama dan negara, lebih khusus lagi hubungan Islam dan Pancasila, baik dari aspek sejarah pemikiran politik Islam, maupun aspek sosial-budaya yang melingkupi, sehingga terbentuknya Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia semakin eksis di tengah adanya upaya dari sekelompok orang/organisasi yang ingin mempersoalkan Pancasila (de-ideologisasi Pancasila). Hal yang sangat penting juga untuk disebutkan pada bab ini adalah implikasi yang ditimbulkan dari pandangan empat tokoh Muslim tersebut.

A. PANDANGAN TOKOH MUSLIM INDONESIA TENTANG HUBUNGAN PANCASILA DAN ISLAM, DAN UPAYANYA DALAM MEMBENDUNG DE IDEOLOGISASI PANCASILA

1. K.H. Achmad Siddiq

a. Kelahiran, Pendidikan, Perjuangan, dan Karir

K.H. Achmad Siddiq (selanjutnya disebut Kyai Siddiq) seorang ulama kharismatik NU (Nahdlatul Ulama) lahir di Jember pada 10 Rajab 1344 H/24 Januari 1926 M), dan meninggal dunia

pada 7 Rajab 1411 H/23 Januari 1991,[1] Kyai Siddiq adalah putra bungsu ke-25 Kyai Muhammad Siddiq, pendiri Pondok Pesantren Islam *"as-Siddiqi Putra (Astra)"*.dari istri keduanya, Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam) binti K.H. Yusuf.[2]

Dikisahkan, K.H. Muhammad Siddiq menikah sebanyak lima kali, masing-masing dengan Nyai Masmunah, Nyai Siti Aminah, Nyai Siti Zakiah (Nyai Maryam), Nyai Mardliyah, dan Nyai Siti fatimah. Dari dua istri (Nyai Siti Aminah dan Nyai Siti fatimah) tidak dikaruniai keturunan, sedangkan dari ketiga istri yang lain dikaruniai 25 anak putra-putri, namun yang hidup hingga dewasa sebanyak 10 orang.[3] Sedangkan Kyai Siddiq lahir dari istri ketiganya, yaitu Nyai Zakiah.

Dikisahkan, kehidupan masa kecil Kyai Siddiq telah diuji dengan meninggalnya Ibu tercintanya di Laut Merah pada saat perjalanan pulang haji dari tanah suci, Mekah. Ketika itu Kyai Siddiq masih berusia 2 tahun. Tidak hanya berhenti di situ ujian yang dialami olehnya. Jika dilihat kisah perjuangan hidupnya, Kyai Siddiq mengawalinya dengan keprihatinan yang mendalam. Kyai Siddiq mengatan: *"Saya pernah menjual baju-baju di pasar"*.[4]

---

1 Afton Ilman Huda, *Biografi Mbah Siddiq*, (Jember: Pon. Pes. Al-Fattah, Tt.), 179; Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membeumikan Tasawuf*, (Jakarta: Erlangga Press, 2009); Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS. (Ed.), *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta: Logos, 1999), Cet. I; "Kyai Achmad", dalam *AULA: Risalah NU*, (Surabaya: PWNU Jatim, Pebruari 1991), No. 02, Tahun XIII, 11.

2 Hairus Salim HS.dan Ridwan Fakla AS., *"K.H. Achmad Siddiq: Pemikiran Keagamaan dan Kenegaraannya"*, dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS. (Ed.), *Biografi 5 Ra`is 'Am Nahdlatul Ulama: K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syansuri, K.H. Ali Ma'shum, dan K.H. Achmad Siddiq*, (Yogyakarta: LTN-NU-Pustaka Pelajar, 1995), Cet. I, 141; Lihat juga Huda, *Biografi Mbah Siddiq*, 179.

3 Abdul Halim Soebahar (Selanjutnya disebut Soebahar), *"Arsitek Pemikiran Islam Indonesia (Catatan Biografi K.H. Achmad Siddiq)"* dalam *Penelitian*, (Jember: Juli 2001), 11. Ada juga yang mengatakan bahwa K.H. Muhammad Siddiq pernah menikah tiga kali, masing-masing istrinya adalah Nyai Masmunah, Nyai Maryam, dan Nyai Mardliyah. Dari ketiga istri ini menurunkan 27 anak, namun yang sampai pada usia dewasa hanya 10 orang. Lihat *"Kyai Achmad"*, dalam *AULA*: Risalah NU, (Surabaya: PWNU Jatim, Pebruari 1991), 10. Juga Salim, *"K.H. Achmad Siddiq*, 141; Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS., (Ed.) (selanjutnya disebut Noeh), *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta: eLSAKU-Logos, 1999), Cet. I, 31-32.

4 *"Selamat Jalan Cucu Joko Tingkir"*, dalam *Berita Buana*, 24 Januari 1991.

Itu pun hasil pekerjaannya hanya bisa digunakan untuk membeli rokok. Kyai Siddiq adalah anak yang gigih dalam mengarungi samudra kehidupan, sehingga ujian yang dialami pun dilaluinya secara baik dan penuh ketabahan. Pada 23 Juni 1947, Kyai Siddiq mempersunting seorang gadis bernama Sholihah, berasal dari desa Mangunsari, Tulungagung, Jawa Timur. Kyai Siddiq mengatakan *"jangankan membiayai pernikahan, untuk ongkos ke Tulungagung saja, saya pinjam uang Rp. 200,-. Karena itu, ketika kawin, saya tidak bisa mengenakan jas"* sebagaimana layaknya pengantin baru. Nasibnya agak membaik di saat Kyai Siddiq diangkat menjadi juru tulis pribadi gurunya, K.H. A. Wahid Hasyim, pada saat itu menjabat Menteri Agama.[5] Pada tahun 1955 istri yang selalu dicintainya telah meninggal dunia.kemudian pada tanggal 22 September 1955 Kyai Siddiq menikahi adik nomor tiga dari istri yang pertama, yaitu Hj. Nihayah. Hal ini dilakukan karena putra-putri Kyai Siddiq dengan Nyai Solihah sangat dekat dengan adiknya yang kemudian menjadi istri keduanya tersebut.

Secara genealogis kekerabatan (kekeluargaan) Kyai Siddiq dapat dilihat dari jalur silsilahnya, yaitu putra Kyai Muhammad Siddiq, bin Kyai Abdullah (Lasem), bin Kyai Muhammad Sholeh Tirtowijoyo, bin Kyai Asy'ari, bin Kyai Adzra'i, bin Kyai Muhammad Yusuf, bin Mbah Sambu, bin Raden Sumonegoro, bin Raden Pringgokusumo (Adipati Lasem II), bin Raden Joyonegoro, bin Pangeran Joyokusumo, bin Pangeran Hadijoyo, bin Pangeran Benowo II, bin Pangeran Benowo I, bin Sultan Hadiwijoyo, alias Joko Tingkir (Mas Karebet/Raja Pajang I). Dari Joko Tingkir ini, Kyai Siddiq termasuk keturunan ke-16.[6] Kemudian dari garis Mbah Sambu tersebut silsilah Kyai Siddiq sampai dengan K.H. Hasyim Asy'ari,[7] pendiri NU dan pondok pesantren Tebuireng Jombang.

---

[5] *"Mengenal K.H. Achmad Siddiq"*, dalam *Zaman*, 2 Pebruari 1985, 43.

[6] *Berita Buana*, 24-Januari 1991.

[7] Aboe Bakar Aceh, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum K.H. A. Wahid Hasyim, 1957), 139; Salim, "K.H. Achmad Siddiq, 142.

Terkait dengan *background* pendidikannya Kyai Siddiq, paling tidak terdapat lima orang menjadi guru darinya, yaitu K.H. Muhammad Siddiq, ayahandanya sendiri; K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang; K.H. A. Wahid Hasyim; K.H. Mahfudz Siddiq, kakak Kyai Siddiq pernah menjabat ketua PBNU di masa penjajahan Jepang; dan K.H. Abdul Hamid Pasuruan[8]. Guru terakhir ini yang kemudian banyak mempengaruhi Kyai Siddiq dalam pejalanan sipiritualnya.[9] Selain itu, tokoh lain yang sering disebut oleh Kyai Siddiq menjadi gurunya adalah K.H. Hamim Djazuli (Gus Miek) yang sering disebut sebagai ulama kontroversial[10], seorang

---

[8] K.H. Abdul Hamid Pasuruan dalam struktur keluarga adalah keponakan, dan beliau diakui sebagai pengayom spiritual Kyai Achmad bersama-sama dengan K.H. Abdul Halim Siddiq, K.H. Achmad Qusyairi, dan K.H. Hamim Djazuli (Gus Miek). Kyai Hamid bersama K.H. Hamid Dimyati dan K.H. Ali Ma'shum dikenal sebagai "Tiga Serangkai" yang ada pada tahun 1932 melakukan pembaharuan di Pondok Pesantren Termas dengan menerapkan sistem madrasi.Contoh pembaharuan mereka adalah dalam hal pemakaian kitab-kitab yang dipelajari di Madraah Termas. Kitab-kitab madrasi semacam *Nahw al-Wadhih, Balaghat al-Wadhihah, Qira`at al-Rasyidah,* dan lain sebagainya mulai dipelajari. Kyai Hamid seringkali menasehati santrinya (termasuk Kyai Achmad dan Prof. DR. H. A. Mukti Ali) untuk menjadikan al-Qur`an sebagai wiridan. Maksud wiridan adalah keharusan membacanya secara rutin, terus-menerus dan ajeg (*istiqamah*), walaupun sedikit. Lihat M. Damami dkk., *"H. A. Mukti Ali: Ketaatan, Kesalehan dan Kecendekiaan" dalam Abdurrahman* (et. al.), *Agama dan Masyarakat,* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), 11; Soebahar, "Arsitek pemikiran Islam", 35; dan Hamid Achmad, *Uswatun Hasanah (Biografi Keteladanan Kiai Hamid),* (Pasuruan: Yayasan Ma'had as-Salafiyah, 2001), Cet. 3.

[9] Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq,* 17-18.

[10] Di antara perilaku Gus Miek yang dianggap kontroversial adalah dia seringkali keluar masuk diskotek dengan ditemani para artis dan gadis cantik lainnya, meminum minuman keras, sering diketahui tidak melaksanakan shalat, dan sebagainya.Hal ini di mata *syari'at* Islam sangat dilarang, karena dianggap telah menyimpang dari ketentuan 'aqidah-*syari'at*-tasawuf.Inilah yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.Bahkan banyak di antara 'ulama` Indonesia, khususnya di Jawa Timur ketika itu —kira-kira tahun 1980-1990-an— yang mengecam dan menganggap Gus Miek sebagai orang mabuk dan gila. Walaupun begitu, fenomena semacam ini, dalam kehidupan sufi juga ada yang menganggapnya sebagai hal biasa dan tidak dianggap sebagai hal yang menyimpang, karena yang lebih dipentingkan adalah hadirnya hati bersama Allah dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Di kalangan sufi masa lalu juga pernah terjadi fenomena semacam itu, bahkan lebih dari itu, misalnya yang dilakukan oleh al-Hallaj, Ibn 'Arabi, Syekh Siti Jenar, dan lain-lain.Sebenarnya *kenylenehan* (keanehan) Gus Miek sudah mulai tampak sejak di usia remaja. Zainal Arifin Thoha melaporkan, bahwa Gus Miek suka *keluyuran* (begadang) ke kota, cangkrukan di terminal, berambut gondrong, dan suka mancing di sungai. Tidak sedikit para

pendiri jama'ah sema'an al-Qur`an, putra dari K.H. A. Djazuli Utsman Ploso Kediri; dan Ir. Soekarno, presiden pertama RI.[11] Bahkan menurut Kacung Marijan, ada beberapa tokoh yang dapat mempengaruhi pemikiran dan gerkan Kyai Siddiq dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa, seperti Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir dan lainnya.[12]

Selepas dari belajar di pondok pesantren Asthra, yang diasuh oleh ayahnya sendiri, Kyai Siddiq kemudian melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dengan pengasuh K.H. Hasyim Asy'ari. Di sinilah Kyai Siddiq mulai terlihat kecerdasannya, sehingga dia diletakkan di kamar tersendiri bersama dengan putra-putra kyai lainnya oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Hal ini menjadi tradisi bagi kalangan pesantren untuk memberikan perhatian khusus terhadap putra-putra kyai karena kelak akan menjadi penerus di pesantrennya masing-masing. Di pesantren Tebuireng, Kyai Achmad belajar kitab-kitab agama pada Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, antara lain *Tuhfat al-Athfal, Fath al-Qarib* (pada tingkat dasar), *Tahrir, Fath al-Mu'in (fiqh), Alfiyah Ibn Malik* (ilmu bahasa Arab), *'Arudl wa al-Qawafi* (sastra), *Jawahir al-Kalamiyah* (teologi), *Waraqat* (ushul fiqh), *Ilmu Falak, Mizan al-Qawim, 'Uqud al-Juman* (sastra), *Tafsir al-Baidlawi* dan *Ihya` 'Ulum al-Din.*[13]

---

saksi melihat, bahwa dalam kelananya itu, Gus Miek kerap berjalan melintas di atas permukaan air sungai, menyeberang dari tepi ke tepi. Pernah juga suatu ketika, K.H Djazuli (ayah dari Gus Miek) membujuk Gus Miek untuk diajak ta'ziyah ke rumah duka K.H. Romli, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang, dengan maksud sekalian memintakan *barakah* dari para kyai yang ada di sana untuk Gus Miek. Tetapi Gus Miek justru menolaknya.Kemudian berangkatlah K.H. Djazuli bersama istri ke Peterongan.Namun baru saja K.H. Djazuli menginjakkan kaki di rumah duka, terlihat Gus Miek telah bersimpuh khusuk di dekat jenazah K.H. Romli. Terkait dengan *kenylenehan* Gus Miek, secara detail dapat dilihat pada Zainal Arifin Thoha, *"Kenylenehan Gus Miek dan Budaya Semaan al-Qur'an"*, dalam *Runtuhnya Singgasana Kiai (NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian tak Kunjung Usai)*, (Yogyakarta: Kutub, 2003), 264-265.

[11] Soebahar, *"Arsitek Pemikiran Islam"*, 21.

[12] Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 18.

[13] Salim, "K.H. Achmad Siddiq", 145; Mujamil Qomar, *NU "Liberal": dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. 1, h. 154; dan *Jawa*

Di pesantren Tebuireng ini juga Kyai Siddiq bertemu dengan K.H. A. Wahid Hasyim, yang kemudian menjadi gurunya. Kyai Wahid membimbing Kyai Siddiq dalam hal ketrampilan menulis, sehingga kelak menjadi skretaris pribdainya di saat Kyai Wahid diangkat menjadi Menteri Agama RI, Ketua MIAI (*Majlis Islam A'la Indonesia*), dan Ketua NU.[14] Lingkungan keluarga dan pendidikan yang kondusif itulah yang menjadi faktor penentu dalam membentuk kepribadian dan intelektualitas Kyai Siddiq untuk masa-masa berikutnya, juga ditopang oleh kecerdasan dan kerajinan yang memang terlihat sejak usia kecil.

Perjuangan Kyai Siddiq dimulai dari GPII (Gabungan Pemuda Islam Indonesia) Jember. Bersama dengan kawan-kawan seperjuangan dan segenerasi, Kyai Siddiq melakukan perlawanan terhadap penjajah di wilayah Jember dan sekitarnya, kemudian pada Pemilu 1955 Kyai Achmad terpilih sebagai anggota DPR Daerah Sementara Jember. Kyai Siddiq juga pernah menjabat sebagai Badan Eksekutif Pemerintah Jember bersama A. Latif Pane (PNI), P. Siahaan (PBI) dan Nazaruddin Latif (Masyumi). Kyai Siddiq juga ikut berjuang dalam barisan pasukan Mujahidin/PPPR (Pusat Pimpinan Perjuangan Rakyat) pada tahun 1947. Di mana Belanda saat itu telah melakukan agresi militer yang pertama. Belanda kesulitan menghadapi pasukan mujahidin, karena terdiri dari para kyai/ulama.

Kyai Siddiq juga pernah menjabat sebagai kepala KUA (Kantor Urusan Agama) di Situbondo dan Bondowoso Jawa Timur. Kemudian meningkat menjadi kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur hingga tahun 1971. Kyai Siddiq juga pernah menjadi anggota DPR RI (1955-1971). Sedangkan karirnya di NU diawali di Kabupaten Jember, kemudian aktif di wilayah NU Jawa Timur. Kemduian pada Mu'tamar NU ke27 tahun 1984 di Situbondo, mengantarkan Kyai Siddiq menjadi Ra'is

---

Pos, 25 Januari 1991; Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 19-20.

[14] Mujamil, *NU "Liberal"*, 154; *Jawa Pos*, 25 Januari 1991.

'Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1984-1989 berduet dengan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Tanfidziyahnya.[15]

Menjelang Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta, kesehatan Kyai Siddiq semakin menurun, sehingga penyakit yang menggerogotinya sejak tahun 1982—kencing manis, jantung, ginjal, hati, saraf, dan osteoporosis, menjadikannnya semakin lemah. Namun para peserta Muktamar tetap mendorongnya untk dapat diplih menjadi Ra'is 'Am yang kedua kalinya. Kyai Siddiq tidak dapat menolaknya tentu dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya pada peristiwa Munas Alim Ulama Indonesia di Jakarta (1990) Kyai Siddiq jatuh sakit, sehingga setahun kemudian (1991), dia terbaring sakit di RS. DR. Soetomo. Tepat pada tanggal 23 Januari 1991, Kyai Siddiq meninggal dunia untuk selamanya. Kemudian Kyai Siddiq dikebumikan di Komplek pemakaman para auliya' (para wali) di Pesantren Ploso, Mojo, Kediri Jawa Timur. Karena memang wasiyat Kyai Siddiq terhadap keluarganya adalah demikian.[16]

b. Karya-karya Kyai Siddiq

Ada sejumlah karya yang ditulis oleh Kyai Siddiq sebagai bentuk artikulasinya terhadap fenomena keagamaan, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kyai Siddiq disebut sebagai seorang tokoh/kyai/ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya, sehingga memberikan dampak posisitif bagi pengembangan pemikiran Islam dan lainnya ntuk pemberdayaan umat lebih luas. Karya-karya Kyai Siddiq tersebut dapat disajikan berikut:

1. Pemikiran Kyai Siddiq yang terkait tasawuf.
   a. *Dzikr al-Ghafilin li Man Ahabba an Yuhsyar ma' al-`Auliya` wa al-Shalihin, Majmu'ah min ba'd Ashab al-Du'a` wa al-Ijazah.*

[15] Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 22-23.
[16] *Ibid.*, 26-27.

Buku ini diterbitkan tanpa tanggal dan tahun, berisi tentang *asma` al-Husna, tawassul bi al-fatihah, shalawat al-muqarrabin,* berbagai do'a, dan lain-lain.[17]

b. *Fungsi Tasawuf,* adalah kumpulan ceramah pada pengajian yang diadakan oleh Pengurus Wilayah Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada tahun 1977, belum diterbitkan. Buku ini berisi *Ruh al-'Ibadah* (memberi jiwa pada ibadah), *Tahdzib al-Akhlaq* (pembinaan karakter), dan *Taqqarrub Ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah swt.).

c. *Sejarah Ringkas Lahirnya Aurad Dzikr al-Ghafilin",* disampaikan pada tanggal 25 Oktober 1986 dalam acara pertemuan rutin khusus keluarga Bani Siddiq pada setiap malam Minggu Manis.

d. *'Uzlah dan Mu'asyarah,* kumpulan ceramah tasawuf pada setiap malam Minggu Manis, tidak diketahui tanggal dan tahunnya; berisi tentang pandangan-pandangan Kyai Achmad tentang 'ulama` hakikat dan 'ulama` *syari'at* dalam melihat kedudukan *'uzlah* dan *mu'asyarah,* dan tentang konsep amar ma'ruf dan nahi munkar.

2. Pemikiran keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

a. *Pedoman berfikir Nahdlatul Ulama (al-Fikrat an-Nahdliyyah),* ditulis dan diterbitkan oleh Forum Silaturrahmi Sarjana Nahdlatul Ulama (FOSSNU) Jatim, 9 Oktober 1969. Buku ini berisi dalil perjuangan, yaitu dasar-dasar pikiran yang dipergunakan imam-imam mujtahid di dalam ber-*ijtihad* atau ber-*istinbath* tentang masalah-masalah hukum agama Islam, terutama imam-imam madzhab Syafi'i. Buku ini juga memuat dalil hukum di dalam menanggapi berbagai hal di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain.

b. *Khittah Nahdliyyah,* (Jember, April 1979). Berisi tentang Garis-garis besar berfikirnya warga NU seputar: ciri-

[17] Noeh, *Menghidupkan Ruh,* 48-49.

ciri jama'ah *diniyyah*, kedudukan 'ulama, ahlussunnah waljama'ah, bahaya-bahaya bagi kemurnian ajaran agama Islam, karakter *at-tawassuth wa al-i'tidal*, pola berorganisasi, konsepsi dakwah, mabarrat, ekonomi, mu'amalah, dan penutup *'izzu al-Islam wa al-Muslimin*.

c. *Islam, Pancasila dan Ukhuwwah Islamiyyah*, wawancara Dr. H. Fahmi D. Saifuddin, Lajnah Ta'lif wa al-Nasr (Jakarta), 25 November 1985. Buku ini berisi tentang garis-garis besar Islam, Islam dan Indonesia, hubungan Pancasila dengan Islam, pengembangan *ukhuwwah Islamiyyah* dan integrasi nasional.

d. *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, adalah kumpulan makalah yang disunting oleh Abu Nahid, Aula (Surabaya) tahun 1992. Buku ini berisi tentang konsepsi 'aqidah, *syari'ah* dan tasawuf, *khittah* NU 26, hubungan agama dan Pancasila, negara RI bentuk final, watak sosial ahlussunnah, serta seni dan agama.

e. *Norma-norma Pancasila menurut Pandangan Islam* (disampaikan pada tahun 70-an), yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, namun karena sesuatu hal, Kyai Achmad tidak jadi berangkat.

f. *Hanya Pribadi Berkualitas yang Mampu Mewujudkan Jam'iyyah Berkualitas*. Tulisan ini disampaikan pada acara halal bihalal, 12 Juni 1989, yang diselenggarakan oleh PCNU Surabaya di gedung Islamic Centre Surabaya, dimuat juga dalam majalah AULA, yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur, No. 10, 06 Agustus 1989.

g. *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar sebagai Langkah Pembinaan Khoiro Ummah dalam Masyarakat Pancasila* (disampaikan pada tanggal 2 Mei 1983, dan mengenai tempat penyampaiannya tidak dijelaskan).

h. *Hubungan Agama dan Pancasila* (disampaikan pada tanggal 14-15 Maret 1985). Sebuah makalah untuk pertemuan

ilmiah "Peranan agama dalam memantapkan idiologi negara", yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI. di Jakarta, pada tanggal 14-15 Maret 1985.

i. *Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama* (disampaikan pada tanggal 13 Desember 1983). Sebuah makalah yang didiskuikan di rumah K.H Masykur, Jl. Imam Bonjol 22 Jakarta, sebagai bahan Munas (Musyawarah Nasional) 'alim 'ulama` di Situbondo Jawa Timur pada tahun 1983.

j. *Pengembangan Ukhuwwah Islamiyyah* (tidak diketahui tanggal, tahun dan tempat penyampaiannya).

k. *Pembinaan Mental Agama di Kalangan Remaja dari Sudut Pandangan Ajaran Agama Islam* (disampaikan dalam rangkaian hari wisuda sarjana muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember, pada tanggal 12 Mei 1973).

l. *Tajdid dalam Islam* (tidak diketahui tanggal, tahun dan tempat penyampaian). Makalah ini Berisi tentang pentingnya melakukan *tajdid* (pembaruan) dalam Islam, pengertian *tajdid* dan syarat-syarat menjadi *mujaddid*.

m. *Bai'ah dan Hijrah* (disampaikan pada upacara pembai'atan anggota baru PMII Cabang Jember 1981/1982).

n. *Kedudukan Seni dan Agama dalam Islam* (makalah diskusi "Apresiasi Seni", diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur pada tanggal 27 Nopember 1982 di Surabaya).

o. *Detik Sejarah Kenabian dan Timbulnya Peradaban Baru yang Merubah Wajah Baru* (disampaikan pada peringatan "Nuzulul Qur`an" oleh Universitas Negeri Jember, pada tanggal 26 Agustus 1978).

p. *Perhatian yang Meningkat terhadap Pesantren* (disampaikan pada musyawarah Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Wilayah Jawa Timur, 10-11 September 1980 di Paiton, Probolinggo).

q. *Peranan Da'i Memasyarakatkan Khittah.* Tulisan ini dimuat dalam majalah AULA, yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur, edisi Pebruari 1987, No. 02 tahun IX. Tulisan ini menjelaskan mengenai khittah NU bagi para da'i, yang dijabarkan ke dalam empat wawasan yang harus dimiliki oleh seorang da'i/da'iyyat. Juga tentang ajaran NU mengenai universalitas ajaran Islam.

Sebenarnya masih banyak sekali karya/tulisan Kyai Siddiq yang masih belum terpublikasikan atau belum diketahui khalayak, yang masih berupa manuskrip-manuskrip tulisan tangan. Bahkan kepingan kaset hasil ceramah Kyai Siddiq pada berbagai forum ilmiah dan pengajian, hingga kini masih banyak yang tercecer dan belum dipindah ke transkripsi secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kyai Siddiq, seorang ulama/kyai pesantren –walaupun tidak pernah mengenyam pendidikan formal secara baik– yang memiliki kompetensi dan kualifikasi kyai modern, karena selalu dapat mengikuti gerak laku zaman dengan menyipakan berbagai solusi jika suatu saat solusi itu penting untuk dikemukakan. Kelebihan dari Kyai Siddiq adalah kepiawaiannya dalam memberikan argumen pada setiap diskusi untuk penyelesaian problem kebangsaan. Hal itu juga diakibatkan oleh karakternya yang suka membaca, dan pergaulannya dengan berbagai tokoh lintas ilmu pengetahuan, tradisi, dan agama.

c. Pemikiran Kyai Siddiq Perihal Hubungan Pancasila dan Islam, dan Upaya Membendung De-Ideologisasi Pancasila.

Kyai Siddiq dikenal sebagai sosok yang dekat dengan berbagai kalangan, tidak hanya kalangan santri, namun juga kalangan umum, tidak hanya kalangan pribumi namun juga kalangan etnis lain, demikian juga dengan kelompok agama non Muslim, partai politik yang berseberangan pun dijadikan sahabat bagi Kyai Siddiq, asalkan memiliki tujuan sama dalam memajukan memberdayakan umat dan bangsa. Kyai Siddiq dianggap sebagai

sosok ulama yang dapat menjembatani (memediasi) berbagai persoalan yang dihadapi umat saat itu, sehingga Kyai Siddiq disebut sebagai ulama populis dan dinamis. Mujamil Qomar membuat kategorisasi tentang sejumlah kyai di tubuh NU, dan Kyai Siddiq dikategorikan sebagai ulama yang memiliki tipologi responsif, yaitu ulama yang memiliki pemikiran yang condong memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat. Ciri dari tipologi responsif adalah cepat tanggap, suka merespons, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial, dan berusaha menawarkan solusi.[18]

Kontribusi besar Kyai Siddiq dapat dibaca dari genuine pemikirannya yang muncul di saat adanya persoalan yang yang menjadi trending topik di tahun 1980-an, yaitu perihal mengemukanya disinterpretasi tentang Pancasila sebagai azas berfikir dan bertindak dalam kebangsaan Indonesia. Kyai Siddiq tampil sebagai sosok ulama yang sangat piawai dalam memberikan argumentasi logis baik dalam persepktif ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Hadis. Kyai Siddiq kelihatan kecerdasannya dalam mengemukakan argumentasi dalam mengurai kebuntuhan berbagai kalangan —khususnyaumat Islam— dalam menginterpretasikan Pancasila dalam konteks keberagamaan dan keberagaman, sehingga Pancasila dapat dijadikan ideologi dan *common platform* dalam mengatur tata hidup dan kehidupan umat dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Situasi pada saat itu memang ada suasana kurang kondusif bagi umat Islam yang merasa curiga te rhadap rencana pemerintah Orde Baru (Orba) untuk menerapkan azas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial

[18] Terdapat Sembilan tokoh NU yang disebut oleh Mujamil Qomar memiliki kategorisasi/ tipologisasi dalam merespon isu-isu keumatan, yaitu: K.H. Achmad Siddiq dan K.H. Abdul Muchith Muzadi disebut memiliki tipologi ulama yang responsif, sementara K.H. Tholchah Hasan disebut sebagai cenedekiawan NU yang antisipatif, disusul K.H. Sahal Mahfudh dan K.H. Masdar Farid Mas'udi disebut sebagai cendekiawan NU yang memiliki tipologi eklektik, kemudian K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Said Agiel Siradj, dan Syechul Hadi Permono disebutnya sebagai tokoh yang memiliki tipologi divergen. Adapun K.H. Ali Yafie ditempatkan oleh Mujamil sebagai tokoh yang berada pada tipologi integralistik. Lihat Mujamil, *NU "Liberal"*, 248-262.

dan politik.[19] Kyai Siddiq dengan kepiawaian dan kelihaiannya dalam berbagai rapat, seminar, simposium, hingga lokakarya, menawarkan gagasannya dengan argumentasi pedagogis dan religius, sampai akhirnya NU berhasil diyakinkan untuk pertamakalinya menerima Pancasila secara tegas sebagai azas dalam berorganisasi, yang kemudian diikuti oleh organisasi keagamaan lainnya. Di antara argumen yang dikemukakan Kyai Siddiq adalah "penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia didasarkan atas prinsip *pertama,* kaum Muslimin Indonesia, melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam merumuskan dan kesepakatan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara ini; dan *kedua,* nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 menjadi Dasar Negara dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, kaum Muslimin Indonesia, secara bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia memikul tanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan bersama itu".[20]

Kyai Siddiq melihat, bahwa hubungan agama dan Pancasila, keduanya dapat berjalan bersama, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan, keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lainnya. Dalam konteks ini, Kyai Siddiq menegaskan, sungguh tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan.[21] Walaupun dalam praksisnya memang tidak mudah untuk menerapkannya.[22]

---

[19] *Ibid.*, 260.

[20] K.H. Achmad Siddiq, "*Hubungan Agama dan Pancasila*", dalam *Makalah untuk Pertemuan Ilmiah "Peranan Agama dalam Memantapkan Ideologi Negara"* yang Diselenggarakan oleh Balitbang Agama Departemen Agama RI. di Jakarta, 14-15 Maret 1985, 12; Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS. (Ed.), *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama`*, (Yogyakarta: LTn-NU dan Pustaka Pelajar, 1995), Cet. I, 173-174.

[21] Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila*, 14.

[22] Diskursus menyangkut hubungan Islam dan Negara jelas tidak dapat dilepaskan

Kyai Siddiq bahkan memberikan ilustrasi yang indah – sebagaimana dijelaskan Mujamil Qomar– sebagai berikut: "Sesungguhnya salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini adalah bagaimana memproporsionalisasikan (*wadl'u syai' fi mahallih*) Pancasila dan agama, sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat berpancasila ini agama dapat diamalkan dengan lebih baik, dan sebaliknya, umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila.[23]

Pandangan Kyai Siddiq tentang hubungan dialektis Pancasila dan Islam, yang kemudian menjadi keputusan resmi dari sikap NU pada Munas (Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo tahun 1983 tentang penerimaan Pancasila merupakan pengejawantahan dari nilai dan prinsip dalam akidah, syari'ah, dan akhlaq Islam ala *Ahlussunnah wal Jama'ah.* Oleh karena itu, implementasi Pancasila tersebut sama halnya dengan pelaksanaan syari'at Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah.* Konsekuensinya adalah NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila, dan pengamalannya secara murni dan konsekuen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi lagi untuk mendirikan Negara Islam (*dar al-Islam*), karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah ter*cover* di dalam Pancasila.[24]

Keputusan tersebut dalam perkembangan selanjutnya memiliki implikasi mendasar dan besar bagi kehidupan kebangsaan umat Indonesia. Penerimaan Pancasila oleh para kyai/ulama sebagai ideologi bangsa tersebut dengan mempertimbangkan

---

dari konsep dasar Islam di satu sisi dan konsep Negara pada sisi lainnya.Oleh karena itu, perbedaan pendapat menyangkut bentuk ideologi Negara apakah yang paling cocok dengan konteks Indonesia menjadi sangat mengemuka di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Terkait hal tersebut, sekedar untuk perbandingan, dapat dibaca pada Cecep Supriadi yang mengulas "*Relasi Islam dan Negara: Wacana Islam dan Keindonesiaan*", dalam *Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015.

[23] Mujamil, *NU "Liberal"*, 261.

[24] Said Aqil Siraj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin*, (Jakarta: LTN NU, 2014), 132-133.

dua hal mendasar. *Pertama,* tidak ditemukan satu sila pun dalam Pancasila yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan sila-silanya sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Kedua,* dari sudut realitas politik, Pancasila ini dapat menjadi payung politik yang menyatukan seluruh komponen bangsa yang sangat plural dan multikultural ini. Para kyai/ulama menyadari jika al-Qur'an dan al-Hadis dipaksakan sebagai asas dan konstitusi Negara Indonesia, maka Indonesia akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik yang tiada henti. Hal tersebut didasarkan oleh khazanah Islam klasik, misalnya adanya kaidah ushul fiqh yang mengatakan, "*dar' al-mafasid muqaddamun ala jalb al-manafi',* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan)". Karena itu, para kyai/ulama NU tidak ragu dang gamang dalam menerima Pancasila sebagai asas dalam bernegara dan bukan asas dalam beragama (Islam).[25]

Argumentasi yang diberikan Kyai Siddiq bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah Agama. Ideologi pada umumnya diartikan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, sasarannya, dan sebagainya. Tak dapat dipungkiri, karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi, sehingga mampu mempengaruhi watak dan tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada yang secara berlebihlebihan menganggap bahwa "ideologi adalah agama". Padahal bagaimana pun hebatnya ideologi yang dibangun, ia tetap hasil pemikiran manusia, dan tidak akan sampai ke derajat agama. Sedangkan Islam adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil pemikiran Rasulullah SAW. Islam adalah *wadl'un Ilahiyun,* ciptaan Allah swt. Oleh karena itu, agama tidak boleh disetingkatkan dengan ideologi. Dengan kata lain, agama bukanlah ideologi. Namun Islam dapat –bahkan

[25] Abdul Moqsith Ghazali, "*Metodologi Islam Nusantara*", dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan,* (Bandung: Mizan, 2015), Cet. II, 109-110.

seharusnya— membimbing manusia merumuskan suatu ideologi yang benar. Islam dapat -dan seharusnya— menilai apakah suatu ideologi itu benar atau salah. Islam menolak ideologi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam, dan hanya dapat menerima ideologi yang sesuai, sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam.[26]

Menurut Kyai Siddiq, umat Islam menerima Pancasila bukanlah sekedar sekedar taktik melainkan didasarkan tiga pertimbangan penting. *Pertama,* umat Islam Indonesia -melalui para pemimpinnya— ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Sembilan tokoh utama bangsa yang terkenal dengan Panitia Sembilan, berhasil menyusun rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak dan akan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara (Piagam Jakarta), yang kemudian diterima dan disahkan dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. *Kedua,* secara substansial, nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. Misalnya, sila *"Ketuhanan Yang Maha Esa"* mencerminkan pengertian *tauhid* (monoteisme murni) menurut akidah Islam (lihat QS. al-Ikhlash). Demikian pula mengenai empat sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama -khususnya Islam. Bahkan urutan-urutan Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka *"amanu wa 'amilu al-shalihat"*. Kalau soal pertama dianggap sebagai pencerminan *amanu,* maka kiranya tidak keliru kalau empat sila berikutnya dapat dianggap mencerminkan *'amilu al-shalihat. Ketiga,* umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya, negara Pancasila, agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi karena pada diri Islam

[26] Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila,* 13.

sendiri memuat dan membawa nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan nasional dan dalam pembinaan hukum nasional.

Dengan demikian, menurut Kyai Siddiq, Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan, tidak boleh mengambil satu sila dan meninggalkan sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pengertian, bahwa pemahaman utuh terhadap Pancasila merupakan sebuah keniscayaan. Kyai Siddiq mengibaratkan: *"Sebuah ramuan, bisa saja terjadi perbedaan peran dari tiap-tiap bumbu, tetapi kelima bumbu harus ada, tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang"*.[27] *Ijtihad* Kyai Siddiq tersebut dalam perkembangan selanjutnya menjadi inspirasi bagi NU untuk memberikan semacam rekomendasi bagi pemerintah yang berupa sebuah deklarasi, yang didasarkan dari pembahasan keagamaan (*bahtsul masa'il*) ulama NU tentang Pancasila sebagai ideologi negara, tentang wawasan kebangsaan, dan posisi Islam dalam negara-bangsa (*nation state*). Poin-poin penting deklarasi tersebut adalah:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. *"Sila Ketuhanan Yang Maha Esa"* sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama (NU), Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk

[27] chmad Siddiq, *"Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam"*, *Makalah* yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an, 4.

menjalankan syari'at agamanya.

5. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama (NU) berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua fihak.[28]

Poin-poin deklarasi terkait dengan hubungan Islam dan Pancasila di atas, memberikan gambaran betapa keduanya dapat saling berjalan bersama dan saling mengisi, Pancasila dan Islam tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya. Pilihan dan keputusan para *founding fathers* terhadap Pancasila sebagai ideologi merupakan pilihan tepat dalam konteks kebangsaan di Indonesia di saat dunia lain telah mengalami krisis stabilitas dan harmoni. Oleh karena itu, secara implisit –dalam konteks modernitas– sebenarnya Kyai Siddiq ingin mengatakan bahwa apapun bentuk dan upaya yang dilakukan oleh siapapun dan apapun namanya tidak akan ada/diberi ruang bagi mereka untuk melakukan distorsi, delegitimasi, bahkan de-ideologisasi terhadap Pancasila. Jika ditemukan orang, kelompok, dan apapun namanya dalam merongrong eksistensi Pancasila sebagai ideologi untuk diganti dengan ideologi lainnya, itu sama saja mereka mengajak untuk bertengkar, mengadu domba, bahkan mencerai-beraikan sesama anak bangsa di negeri Indonesia ini. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada kata lain selain sebutan yang paling pas bagi mereka, sebagai pengkhianat bangsa. Dengan demikian jelas, bahwa Kyai Siddiq jauh-jauh hari sebelum adanya upaya de-ideologisasi Pancasila seperti yang dilakukan HTI dan berbagai afiliasinya hingga saat ini, Kyai Siddiq sebenarnya sudah menolak upaya tersebut, karena dianggapnya dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

---

[28] Varnita Dewi, "*Hubungan Antara Islam dan Pancasila*", dalam *Tugas Makalah yang disampaikan pada Mata Kuliah Pengantar Pancasila*, (Aceh: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2014), h. 11-12.

Sesuai dengan karakter dan tipologi Kyai Siddiq yang responsif, yaitu cenderung memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi umat secara cepat dan disertai solusi jitu. Di samping itu pemikiran ini lebih condong kepada persoalan yang sedang dan telah terjadi. Hal yang menjadi kepedulian dan kejelian Kyai Siddiq pada saat itu –yang kemudian memberikan implikasi nyata hingga saat ini – adalah menyangkut keresahan umat dalam merespon pemerintah yang ingin menerapkan azas Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi organisasi politik dan sosial. Kemudian Kyai Siddiq sangat responsif terhadap problem tersebut, yang kemudian ber-*ijtihad* untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggal dalam berorganisasi dan berpolitik – sebagaimana dielaborasi pada diskursus di atas. Ternyata di kemudian hari *ijtihad* Kyai Siddiq tersebut tidak hanya diikuti oleh warga Nahdliyyin (NU), namun juga oleh seluruh organisasi keagamaan dan masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada lagi kecurigaan terhadap pemerintah.[29]

Jika melihat *background* pendidikan Kyai Achmad, sebenarnya dia tidak pernah megenyam pendidikan tinggi, namun karena pergaulannya dengan berbagai pihak bahkan lintas generasi dan lintas akademis, sehingga pemikiran-pemikirannya dapat melampaui pemikiran kyai/ulama sezamannya merupakan anugerah baginya dan bangsa. Di samping itu lingkungan keluarganya yang kondusif juga mendukung adanya tempaan intelektual Kyai Siddiq, sehingga artikulasi yang disampaikan dalam merespon isu-isu nasional dan global selalu dapat dia ikuti dengan baik sekaligus memberikan solusi tepat. Bahkan di saat Indonesia mengalami situasi dan krisis yang kurang menguntungkan, baik sosial, politik, ekonomi, dan agama. Inilah yang mengantarkan Kyai Siddiq menjadi sosok ulama kharismatik

[29] Mujamil, *NU "Liberal"*, 260-261.

yang disegani dan dihormati oleh semua kalangan.[30] Bahkan generasi muda NU pada perjalanan berikutnya banyak terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Kyai Siddiq, apalagi setelah Kyai Siddiq berduet memimpin NU untuk dua periode bersama K.H. Abdurrahman Wahid. Keduanya memiliki pemikiran yang sama-sama progressif, khususnya menyangkut hubungan Pancasila dan Islam dalam konteks kebangsaan di Indonesia.

2. K.H. Abdurrahman Wahid

a. Masa Kelahiran, Pendidikan, dan Karir

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang lahir pada tanggal 4 Sya'ban 1940 H/ bertepatan dengan tanggal 7 September di Denanyar Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren kakek dari jalur ibunya, yaitu Kyai Bisri Syansuri,[31] adalah sosok fenomenal yang tidak hanya dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia namun juga masyarakat dunia. Kefenomenalannya terlihat dari sepak terjangnya selama menjadi aktifis sosial, intelektual muda NU, mahasiswa, pemikir, aktifispesantren, kyai, hingga menjadi presiden ke-4 Republik Indonesia (terangkat tahun 1999 dan berakhir tahun 2001) karena konsep pemikirannya dan tindakannya yang membuat banyak orang tertegun, was-was, ada yang kagum, ada yang sulit memahami, juga ada yang *sami'na wa atha'na* (percaya dan ngikuti apapun yang dari Gus Dur), bahkan ada juga yang dibuat kecewa oleh setiap apa yang dilontarkan oleh Gus Dur.Oleh karena itu, julukan yang melekat pada diri Gus Dur hingga saat ini adalah sebagai "tokoh yang paling kontroversial" di Indonesia.

Membaca dinamika pemikiran Gus Dur memang tidak akan pernah habis, bagaikan menyelam di dasar sungai yang dalam untuk mencari ikan namun tidak akan pernah mendapatkan ikan

---

[30] Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf*, (Jakarta: Erlangga Press, 2009), 172.

[31] Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), Cet. IX, 25-26.

besar seperti yang diharapkan. Kajian berikut merupakan sedikit dari apa yang dapat ditangkap oleh penulis dalam mengarungi pemikiran Gus Dur yang memiliki pengaruh luas, tidak hanya menyangkut soal-soal keagamaan, namun juga yang berkaitan dengan konsep demokrasi, politik, hubungan agama-negara, hubungan Islam-Pancasila, sosial, pluralisme, dan lain-lain. Dalam konteks inilah, seakan tidak terhitung jumlahnya para pengkaji, pengamat, dan peneliti -baik dari Barat maupun Indonesia sendiri— secara khusus membahas/mengulas tentang Gus Dur dan berbagai hal yang melingkupinya, mulai dari biografi kehidupannya, pemikiran politiknya, konsep demokrasinya, pandangan pluralismenya, hingga pada keanehan -yang banyak orang menyebut tentang kewaliannya—dan sebagainya. Tentu ulasan-ulasan yang disuguhkan mengacu pada perspektif penulisnya masing-masing. Bahkan penulis sendiri pernah menjumpai pada sebuah toko buku, ada sekitar puluhan -bahkan mungkin ratusan— anekdot tentang Gus Dur yang ditulis oleh berbagai kalangan dengan berbagai perpsektif.[32]

Gambaran di atas adalah sedikit profil mengenai sosok Gus Dur yang memang memiliki pengaruh kuat di kalangan umat Indonesia bahkan juga dunia sebagai konsekuensi dari pemikiran-pemikiran dan gerakan yang dilakukan baik selama masih menjadi aktifis sosial, sebagai ketua umum PBNU, tokoh pesantren, hingga menjadi presiden RI ke-4. Gus Dur tumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi lingkungan yang memang mendukung untuk tumbuh secara baik dan kondusif, baik dilihat dalam aspek genealogis kekerabatan (keluarga) hingga pada genealogis intelektualnya. Gus Dur lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga pesantren yang sangat berpengaruh. Dia adalah anak pendiri dan sekaligus perumus dasar-dasar

[32] Di antara buku yang menghadirkan kumpulan anekdot-anekdot Gus Dur adalah buku yang ditulis oleh M. Mas'ud Adnan (ed.), *Presiden Dur yang Gus itu: Anekdot-anekdot K.H. Abdurrahman Wahid,* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).

ideologi bangsa (Pancasila), K.H. Abdul Wahid Hasyim,[33] anak dari Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, peletak dasar-dasar kebangsaan di negeri Indonesia ini.[34]

Dari aspek genealogis intelektual, Gus Dur tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang sangat baik. Dia tidak hanya mengenyam pendidikan pesantren dari kakek buyutnya yang memang adalah keluarga pesantren besar, namun dia juga mengenyam pendidikan pendidikan lintas tradisi. Pertama-tama setelah menamatkan pendidikan di pesantren, Gus Dur kemudian melanjutkan pendidikannnya ke Kairo Mesir, walaupun kemudian tidak lama dia belajar di sana karena ada beberapa pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Gus Dur. Kemudian pindah studi ke Universitas Baghdad dengan memanfaatkan beasiswa. Di sini Gus Dur menyelesaikan pendidikannya selama empat tahun. Setelah dari Universitas Baghdad, Gus Dur melanjutkan ke Eropa (Belanda). Di sinilah pemikiran Gus Dur mulai terasah karena bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Barat. Gus Dur menguasai beberapa bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis,[35] tentunya juga bahasa Arab. Di samping pergaulannya dengan berbagai tokoh lintas ilmu pengetahuan, tradisi, agama, dan lainnya, kecerdasan Gus Dur dan suka membaca, juga ditopang sikap peka dan kritisnya dalam merespon isu-isu yang berkembang menjadi faktor menentukan dalam mengantarkan Gus Dur menjadi sosok yang

---

[33] Terkait dengan sosok dan kiprah perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim, dapat dibaca pada Saiful Umam, "*K.H. A. Wahid Hasyim: Muslim Demokrat Peletak Fondasi Departemen Agama*", Yanto Bashri & Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), Cet. II, 409-433.

[34] Sosok K.H. Hasyim Asy'ari dapat dilihat kiprah perjuangannya dari pesantren hingga menjadi penggerak perjuangan dalam mengusir penjajah, dapat dilihat pada Zamakhsyari Dhofier, "*K.H. Hasyim Asy'ari: Penggalang Islam Tradisional*", Yanto Bashri & Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), Cet. II, 353-373; Muhammad Asad Shihab, *Hadlratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari: Perintis Kemerdekaan Indonesia*, Terjemah KH. A. Musthafa Bisri, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1994).

[35] Lihat Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, 88-112.

disegani, dihormati tidak hanya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim Indonesia, namun juga oleh masyarakat dunia.

b. Karya-karya Gus Dur

Sulit kiranya menghitung karya-karya Gus Dur baik berupa buku, artikel, tulisan lepas, refleksi, maupun kata pengantarnya dalam berbagai buku para pengkaji/peneliti, baik di oleh peneliti/pengkaji dalam negeri maupun luar negeri. Tulisan-tulisan Gus Dur banyak dijumpai pada toko-toko buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan lain lain. Dalam kiatan ini, ada beberapa karya warisan Gus Dur yang masih relevan dengan situasi zaman saat ini, bahkan menginspirasi dunia untuk memajukan peradaban di dunia. Di antara karya Gus Dur yang dapat penulis tampilkan di sini adalah sebagai beikut:

1. *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia,* diterbitkan oleh Rosdakarya, Bandung, tahun 1991.
2. *Sayyid Hoesen: Islam dalam Cita dan Fakta,* ditulis bersama Hasyim Wahid, diterbitkan oleh Lappenas Jakarta, 1991.
3. *Bunga Rampai Pesantren,* diterbitkan oleh CV. Dharma Bakti, 1978.
4. *Muslim di Tengah Pergumulan,* diterbitkan Lappenas Jakarta, 1981.
5. *Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Sebuah Pergumulan Wacana dan Transformasi,* diterbitkan oleh Fatma Press Jakarta, 1989.
6. *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah,* diterbitkan LKiS, Yogyakarta, 1997.
7. *Islam, Negara, dan Demokrasi, Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur,* diterbitkan oleh Erlangga Press, 1999.
8. *Membangun Demokrasi,* diterbitkan Rosdakarya Bandung, 1999.
9. *Prisma Pemikiran Gus* Dur, diterbitkan LKiS Yogyakarta, 1999.
10. *Tuhan Tak Perlu Dibela,* diterbitkan LKiS Yogyakarta, 1999.
11. *Gus Dur Menjawab Tantangan Perubahan,* diterbitkan Kompas Jakarta, 1999.

12. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, diterbitkan Grasindo Jakarta, 1999.
13. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, diterbitkan Desantara Jakarta, 2001.
14. *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, diterbitkan LKiS Yogyakarta, 2001.
15. *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, diterbitkan LKiS Yogyakarta, 2002.
16. *Islamku Islam Anda Islam Kita*, diterbitkan The Wahid Institut Jakarta, 2006.
17. *Teater dan Politik di Indonesia*, Artikel, Tanpa Tahun.
18. *Pribumisasi Islam*, Artikel, Tanpa Tahun.
19. *Pelacur dan Anjing, Kiai dan dan Burung*, Artikel, Tanpa Tahun.
20. *Islam, Ideologi, dan Etos Nasional Indonesia*, Artikel, Tanpa Tahun.[36]
21. *Islam Kosmopolitan: Nilai-niai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. diterbitkan The Wahid Institute Jakarta, 2007.
22. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, diterbitkan oleh The Wahid Institut bekerjasama dengan Ma'arif Institut Jakarta, 2009.

Kiranya masih tak terhitung karya Gus Dur lainnya, baik berupa artikel ilmiah, artikel lepas, refleksi, maupun berbagai pengantar buku yang ditulis oleh para peneliti/pengkaji baik dalam negeri maupun luar negeri.[37] Karya Gus Dur kemudian menjadi mutiara berharga bagi pengembangan kajian pemikiran Islam dan lainnya untuk generasi berikutnya. Barangkali saat ini banyak orang yang merindukan Gus Dur dan pemikiran-pemikirannya di saat bangsa Indonesia dan dunia mengalami problem disharmoni dan

---

[36] Lihat Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 435-441.

[37] Dalam kaitan ini, Gus Dur juga pernah memberikan Kata Pengantar untuk buku yang pernah penulis tulis pada November 2006.Lihat Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, h. xiii-xvi.

disstabilitas dalam berbagai aspek yang tak berkesudahan. Gus Dur selanjutnya layak menjadi Bapak bangsa karena jasanya yang berharga bagi pengembagan dan pemberdayaan umat di dunia. Karena Gus Dur kiranya memahami betul tentang pesan Allah SWT dalam al-Qur'an bahwa misi profetis Nabi SAW adalah sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-'alamin*). Inilah yang kemudian Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralis yang paling disegani di dunia.

c. Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Hubungan Islam dan Pancasila, serta Upaya Antisipatif dalam Membendung Deidelogisasi Pancasila

Mujamil mengklasifikasikan Gus Dur sebagai intelektual NU yang memiliki tipologi "divergen", yaitu pola berfikir yang menjelajah keluar dari cara-cara berfikir konvensional (sebagai mana lazimnya). Akan tetapi tetap mempertimbangkan inovasi dalam pemikirannya. Konsekuensi dari pemikiran tipologi divergen ini adalah cenderung liberal, sehingga membuat masyarakat bingung dan berimplikasi gaduh. Oleh karena itu, pemikiran Gus Dur dalam merespon berbagai persolan hampir selalu membawa implikasi gaduh dan heboh di tengah umat. Di antara pemikiran Gus Dur yang dianggap keluar dari *pakem* kebanyakan umat Islam adalah "*Saya sendiri berpendapat bahwa Islam itu belum tuntas menjadi sumber inspirasi*". Padahal Islam dalam al-Qur'an disebut sebagai agama sempurna dan harus dijalankan secara konsekuen. Di mata Gus Dur Islam harus dimaknai secara substantif dan maknanya akan selalu hidup dan tidak berkeputusan seiring dengan situasi zaman yang terus berubah.[38] Islam harus dimaknai sebagai inspirasi yang membuat umatnya bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian, Gus Dur melihat bahwa memahami substansi ajaran Islam (di balik teks) itu jauh lebih penting daripada teks

[38] Mujamil, *NU "Liberal"*, 254-255.

itu sendiri. Tujuan ditegakkannya syari'at Islam di muka bumi adalah untuk rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-'alamin*).

Tidak sedikit komentar yang bertebaran seiring dengan pandangan-pandangan Gus Dur yang dianggap kontroversial itu. Gus Dur seringkali menjadi bahan cemoohan, umpatan, bahkan hinaan yang dialamatkan kepadanya sebagai buah dari pemikiran dan pandangan kontroversialnya tersebut, khususnya datang dari kelompok Islam yang selama ini disebut sebagai Islam trans nasional. Akan tetapi juga tidak sedikit yang justru memberikan apresiasi dan komentar positif, misalnya adanya pernyataan di saat Gus Dur meninggal dunia tahun 2009, yang mengatakan "*Gus Dur berani membela kepentingan golongan lain yang diyakininya benar...Ia tidak peduli dengan kekurangan fisiknya. Semua tertutupi dengan ide-ide briliannya soal membangun bangsa*".[39] "*Gus Dur adalah guru bangsa terbaik yang kita miliki...selamat jalan Gus, sejujurnya kami sangat kehilangan...*". Demikian headline harian *Jawa Pos*, 2 Januari 2010. "*Gus Dur mengingatkan pada Mahatma Gandhi .Gus Dur dekat dengan hati rakyat banyak bukan hanya karena pandangan keagamaan dan politiknya, melainkan juga pada sikap serta gaya hidupnya*".[40] Franz Magnis-Suseno, seorang Rohaniawan dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara juga memberikan keyakinan, "*Bagi saya, Gus Dur mewujudkan Islam yang percaya diri, positif, terbuka, ramah. Yang dirintis Gus Dur akan berjalan terus. Nevertheless, Gus, we will miss you. Requiescat in peace*".[41] Banyak sekali komentar positif lainnya yang hingga kini pemikiran Gus Dur seakan senantiasa hidup terus walaupun si empunya telah meninggalkan dunia untuk selamanya.

Prisma pemikiran Gus Dur menyangkut hubungan Islam dan Pancasila, sebenarnya dapat dilacak dari basis pemahaman keagamaan Gus Dur yang cenderung akomodatif dan egaliter.

---

[39] Harian *Republika*, 31 Desember 2009.
[40] Harian *Kompas*, 4 Januari 2010.
[41] Komentar Franz Magnis-Suseno, dalam Barton, *Biografi Gus Dur*, Cover belakang.

Dalam konteks agak luas, diskursus hubungan antara agama dan negara sebenarnya menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai hingga kini.Di kalangan para ulama juga terjadi perdebatan sengit, sehingga selalu muncul pandangan berbeda. Satu kelompok Islam mempertahankan pemahaman bahwa agama adalah satu soal dan Negara adalah soal lain. Sementara kelompok lainnya berpendapat, bahwa agama dan Negara adalah satu dan dapat berjalan bersama. Berbeda dengan pandangan di atas, Gus Dur menganggap bahwa Islam tidak memiliki konsep negara Islam baik secara jelas (*sharih*) atau samar-samar tidak pernah disebutkan dalam teks-teks suci dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh karena itu, Gus Dur meyakini bahwa negara Islam adalah ilusi.[42] Pemikiran Gus Dur nampaknya terpengaruh oleh salah satu pemikir Muslim Ali Abdel Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Qawa'idu al-Sulthanan* —sebagaimana dikutip Gus Dur— *Pertama,* al-Qur'an tidak pernah memuat doktrin tentang negara Islam. *Kedua,* Nabi SAW dalam kesehariannya tidak pernah memperlihatkan watak politis, melainkan moral. *Ketiga,* Nabi SAW tidak pernah sekalipun merumuskan secara definitif tentang mekanisme penggantian jabatannya sebagai kepala Negara.[43]

Gus Dur mengutip pendapat madzab Syafi'i dalam membagi negara, yaitu: jenis *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-harb* (negara perang), dan *dar al-shulh* (negara damai). Jenis *dar al-Islam* adalah faham yang menegaskan negara Islam harus dipertahankan dari serangan luar, karena ia merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita kenegaraan dalam Islam itu sendiri, ciri utamanya adalah pemberlakuan syari'ah Islam sebagai undang-undang negara. Kemudian jenis negara perang (*dar al-harb*) atau biasa disebut negara anti-Islam. Jenis ini harus diperangi, karena

---

[42] Keyakinan Gus Dur mengenai negara Islam adalah ilusi di bumi Indonesia, dapat dibaca pada K.H. Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Islam Transnasional di Indonesia,* (Jakarta: The Wahid Institut, 2009).

[43] Abdurrahman Wahid, *"Islam: Punyakah Konsep Kenegaraan?"*, Shaleh Isre (ed.) *Tuhan Tidak Perlu Dibela,* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 1.

berbahaya bagi kelangsungan hidup negara Islam, dan dengan demikian akan mengakibatkan dihilangkannya pemberlakuan syari'ah Islam dari undang-undang negara. Sedangkan negara damai (*dar al-shulh*) harus dipertahankan, karena syari'ah (dalam bentuk hukum agama/fiqh atau etika masyarakat) masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya, walaupun tidak melalui legislasi dalam bentuk undang-undang negara.[44] Demikian juga jika merujuk pada literatur fiqh klasik juga tidak ada pembahasan secara *rigid* mengenai bentuk dan sistem kenegaraan secara ideal. Konsepsi fiqh seperti yang digambarkan oleh al-Mawardi, al-Ghazali, ibnu Khaldun, dan lain-lain barangkali menjadi contoh penting dalam kaitan ini. Hanya al-Farabi secara utopis menyusun Negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*).

Dalam kaitan itulah, Gus Dur berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah negara perang (*dar al-harb*), bukan pula negara Islam (*dar al-Islam*), akan tetapi negara damai (*dar la-shulh/al-salam*) yang mengedepankan kedamaian untuk semesta —khususnya bagi masyarakat Indonesia. Karena Negara Indonesia masih menjalankan syari'at Islam sebagai tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara walaupun tidak secara formal dilegalkan. Ruh dari ajaran Islam itu sendiri adalah cinta kasih, damai, harmoni, adil, makmur, dan sejahtera secara lahir batin.

Dalam kaitan itu, Gus Dur memandang bahwa di Indonesia paling tidak terdapat tiga pandangan tentang hubungan agama dan Negara, yaitu responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif. *Pertama*, responsi integratif, Islam adalah agama, tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan negara. Dialektika hubungannya ditentukan oleh kesepakatan bersama dalam tata kehidupan masyarakat. *Kedua*, sikap responsif fakultatif, secara politik melalui kekuatan parlemen yang mayoritas dihuni

---

[44] Abdurrahman Wahid, "Kata Pengantar" dalam Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 10.

umat Islam, maka di sinilah mereka akan membuat perundang-undangan yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Jika tidak, mereka juga tidak memaksakan, melainkan tetap menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam itu sendiri. *Ketiga*, sikap konfrontatif, sejak awal menolak kehadiran apapun yang dianggap "tidak sesuai dengan ajaran Islam". Dalam konteks itulah menurut Gus Dur, kalangan Nahdliyyin (NU) sejak awal memilih NKRI dalam bentuknya yang ideal yang didasarkan kepada sistem Negara Pancasila, bukan negara Islam. Negara ideal menurut para ulama *Sunni* adalah negara yang mencita-citakan bersama di tengah pluralitas yang ada. Negara yang menjadi cita-cita pelaksanaan syari'at Islam secara substantif, bukan simbolik legal-formal. Gus Dur sepakat, bahwa Pancasila merupakan kesepakatan luhur di antara berbagai golongan yang ada di Indonesia. Akan tetapi kesepakatan luhur tersebut tidak akan ada artinya jika tidak didudukkan pada status yang jelas.[45]

Dari pernyataan Gus Dur tersebut terdapat dua kata penting dalam pembicaraan Pancasila, yaitu kata "kesepakatan luhur" dan "status yang jelas". Kesepakatan luhur dimaknai sebagai kesepakatan bersama para *founding fathers*, dan pilihan terhadap Pancasila merupakan kesepakatan bersama komponen bangsa yang harus disikapi dan diterima sebagai kesepakatan seluruh warga bangsa. Kemudian status yang jelas menurut Gus Dur adalah Pancasila harus dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab. Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan secara berkesinambungan, antara sila satu dengan lainnya tidak boleh dipahami dan diamalkan secara terpisah. Karena dalam lima sila tersebut tertuang poin-poin mendasar dalam mengatur tata pergaulan kebangsaan.

---

[45] Abdurahman Wahid, *"Pancasila sebagai ideologi dalam kaitannya dengan kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", Makalah seminar* yang dilaksanakan oleh kelompok studi Pengembangan Pemikiran Pancasila dan UUD 1945 BP-7 Pusat pada tanggal 24-26Oktober 1989 di Jakarta. Dibukukan Oetojo Oesman dan Alfian (penyunting), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), Cet. 2, 163.

Oleh karena itu, hubungan Pancasila dengan Islam sebenarnya hubungan dialektis yang dapat dipertemukan, tidak dipertentangkan. Gus Dur memahami bahwa konfrontasi Pancasila dengan Islam tidak dapat dibenarkan, sebab hal tersebut sama halnya dengan melakukan penghadapan sesuatu yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus. Jika hal demikian yang dilakukan, maka aspek rasionalitas diabaikan dan lebih mementingkan aspek emosional dalam menentukan arah hidup bangsa ini.[46] Universalitas Islam yang bersifat umum dapat seajalan dengan kekhususan Pancasila di Indonesia. Pancasila yang kemudian dipilih sebagai ideologi dan falsafah bangsa adalah jalan tengah di tengah krisis dalam menentukan dasar-dasar kebangsaan saat itu, sehingga dengan berbagai pertimbangan matang para *founding fathers* memutuskan Pancasila sebagai ideologi ideal di tengah pluralitas Indonesia.

Pemahaman Gus Dur tentang hubungan agama dan Pancasila, nampaknya tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah NU (Nahdlatul Ulama) dalam menentukan sikap dan arah perjuangannya yang tidak setuju dengan pendirian Indonesia sebagai negara Islam, namun sebagai negara yang tetap dapat menjalankan ajaran agamanya secara konsekuen, sekaligus menyetujui Indonesia sebagai nagara bangsa (*nation state*). Hal tersebut diputuskan oleh NU pada Muktamar di Banjarmasin pada tahun 1935 M –ada yang menyebut tahun 1936 M. Inilah yang kemudian melandasi sikap NU dalam berideologi, politik, dan pemerintahan[47] –termasuk apa yang menjadi pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang hubungan Pancasila dan Islam. Al-hasil sepuluh tahun setelahnya, para tokoh Muslim Indonesia menerima konsep Negara Pancasila yang ditawarkan

---

[46] Baca Abdurahman Wahid, *Negara Berideologi Satu, Bukan Dua,* dalam Buku *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 90.

[47] Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila,* 5.

oleh Soekarno. Tentu hal ini didasarkan kepada aspek pluralitas dan multikulturalitas bangsa yang di satu sisi merupakan kekayaan budaya yang luar biasa, dan pada sisi lainnya merupakan ujian terhadap keberagaman, sehingga sewaktu-waktu bisa saja konflik akibat perbedaan yang ada tersebut muncul ke permukaan. Pancasila dipilih sebagai ideologi adalah sudah tepat dan *in-context* dengan keragaman (kebhinnekaan) Indonesia.[48]

Pengalaman sejarah panjang pasca kemerdekaan menjadi catatan tersendiri bagi Gus Dur dalam memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Munculnya DI/TII di awal-awal perjuangan Indonesia adalah catatan pahit dalam sejarah bangsa Indonesia. Gerakan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam adalah catatan sejarah pahit yang tidak dapat dilupakan oleh semua warga bangsa. Mereka yang bersikukuh untuk mendirikan negara Islam dengan sistem *khilafah* sebenarnya tidak memahami kultur sosial masyarakat Indonesia secara baik dan menyeluruh. Gerakan mereka terbaca sangat emosional tanpa mengindahkan rasionalitas kebangsaan yang ada. Apapun dapat mereka lakukan dengan dalih tuntutan syari'atisasi Islam, sehingga pihak yang tidak setuju atau menolak gerakan khilafahnya, dianggap sebagai bukan orang Islam (kafir). Gerakan mereka bahkan sudah sejak lama pasca Orde Baru dan beralihnya era-reformasi dianggap sebagai momen penting dalam membuat gerakan *khilafah* tersebut. Berbagai upaya dilakukan melalui infiltrasi ke berbagai lini, mulai dari infiltrasi terhadap organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU, lembaga pemerintahan, partai politik, gerakan dengan alasan dakwah ke kampus-kampus –khususnya perguruan tinggi umum—, hingga ke pelosok-pelosok desa, telah meluas sedemikian rupa. Bahkan disinyalir gerakannya terbilang massif dengan merebut masjid-masjid dan musolla-musolla yang dikelola dan dihuni oleh

[48] Wahid, *Ilusi Negara Islam*, 16-17.

kelompok Islam *mainstream* (NU dan Muhammadiyah).[49]

K.H. Muadz Thahir, Ketua PCNU Pati Jawa Tengah - sebagaimana dikisahkan Gus Dur— menceritakan tentang kelompok garis berhasil masuk ke dalam masjid-masjid NU dengan kedok memberikan pelayanan *cleaning service* secara gratis. Sejumlah anak-anak muda dengan suka rela melakukan bantuan tersebut, ditambah dengan keaktifan dan keringanannya dalam merawat dan memakmurkan masjid melalui *adzan* dan *iqamah*, kemudian dengan berjalannya waktu ketika telah mendapatkan waktu cukup lapang untuk mengelola, mereka melakukan kegiatan di luar sepengetahuan takmir dengan menjadwal kegiatan-kegiatan rutinitas keagamaan dalam masjid, lambat laun mereka mengundang jamaahnya untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Sampai akhirnya mereka menentukan jadwal pengajian, imam, khatib shalat Jum'at, hingga muadzinnya, sehingga peran takmir tergeser. Bahkan mereka dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam perspektif ideologi keras mereka. Modus semacam ini mereka lakukan pelan tapi pasti. Jika sudah terkoordinasikan secara baik di antara mereka, maka akan timbul kesulitan bagi takmir untuk mengusirnya. Memang salah satu misi mereka adalah merebut masjid-masjid milik Nahdliyyin (NU) tersebut. Jika sudah gaduh di tengah masyarakat, maka mereka mengajukan argument dengan mempertanyakan surat-surat kepemilikan tanah dan masjid waqaf dan semacamnya, dan hal ini memang sebagian besar adalah menjadi problem bagi masjid-masjid milik warga NU yang tidak diurus tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan masjid dan musolla tersebut, sehingga NU selalu kalah oleh mereka dengan alasan legalitas ini. Kasus di Pati merupakan satu contoh yang seringkali dilakukan oleh kelompok garis keras yang diwakili oleh PKS dan

[49] *Ibid.*, h. 23.

HTI di berbagai daerah.

Dalam merespon situasi seperti ini Gus Dur melalui PBNU secara tegas melakukan konsolidasi jama'ahnya jangan sampai kegiatan garis keras tersebut dikasih kesempatan untuk menyusup ke masjid dan musolla yang menjadi tanggungjawab kalangan nahdliyyin. PBNU melarang secara tegas gerakan Islam transnasional seperti al-Qaidah, Ikhwanul Muslimin –yang direpresentasikan PKS – dan Hizbut Tahrir merupakan gerakan berbahaya karena bertentangan dengan faham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* dan memiliki potensi memecah belah bangsa Indonesia. Sementara gerakan yang menuntut adanya sistem *khilafah* untuk mengganti sistem Pancasila yang selama ini dilakukan HTI, Majlis Bahtsul Masail NU memutuskan, *khilafah Islamiyah* tidak ada rujukan teologisnya, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.[50]

Sejalan dengan gerakan Islam trans nasional tersebut, Gus Dur mengaku seringkali mendapatkan hujatan dengan sebutan sebagai kafir dan murtad, karena Gus Dur dianggap sebagai tokoh muslim yang memiliki dan mengembangkan pemikiran liberal dan sama sekali tidak mendukung gerakan anti Pancasila tersebut, bahkan sebaliknya justru Gus Dur yang menyerang balik terhadap gerakan anti Pancasila tersebut melalui pemikiran dan gerakan kulturalnya. Sepanjang sepak terjang Gus Dur selalu mendapat kecaman dari kelompok Islam garis geras (tekstualis) ini.[51] Gus Dur

---

[50] Abdurrahman Wahid, "*Musuh dalam Selimut*", dalam Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam*, 29-30.

[51] Penulis menyebut varian kelompok Islam garis keras (Islam tekstualis) semata-mata untuk memudahkan dalam melihat dua/lebih kelompok yang memang saling berseberangan. Sebab dalam konteks saat ini varian-varian itu justru lebih mudah untuk melihat sejumlah gerakan apakah pemahaman keberagamaan (Islam)nya itu arah dan tujuannya hanya sekedar dakwah ataukah memang menyembunyikan agenda politik tertentu di Indonesia. Oleh Gus Dur kelompok garis keras itu disebut dengan Islam transnasional.Di samping itu, di Indonesia sudah lebih dulu ada Islam yang dianggap memiliki pandangan lebih pluralis (kontekstualis) seperti NU dan Muhammadiyah.Walaupun sebagian pengkaji ada yang menyebut NU sebagai kelompok Islam tradisonalis dan Muhammadiyah disebut sebagai kelompok Islam modernis.Sekali lagi penulis dalam kaitan ini tidak dalam mendikotomisasikan bahkan mempertentangkan antara kelompok-kelompok Islam yang ada, namun

tidak pernah surut langkah dalam memperjuangkan demokasi Pancasila selama hal itu berimplikasi positif dalam pemberdayaan masyarakat. Kata kunci yang selalu mendapat perhatian Gus Dur dalam setiap pemikiran dan gerakan kulturalnya adalah keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi semua umat. Itulah yang menjadi genuine pemikiran Gus Dur, yang hingga akhir hayatnya konsisten dengan faham pluralistiknya. Oleh karena itu, siapapun yang merasa dan terasa tertindas akan mendapatkan perlakuan pembelaan dari Gus Dur, tidak dilihat apakah yang dibela adalah itu non-Muslim, etnis lain, kepercayaan lain, dan mungkin atheis sekalipun. Satu contoh adalah ketika kelompok kepercayaan Konghucu tidak mendapatkan perhatian selama Orde Baru untuk merubah statusnya menjadi agama Konghucu, Gus Dur bersuara lantang —seperti dikutip Mujamil Qomar— dengan mengatakan *"Kalau pemerintah tidak mengakui Konghucu sebagai agama, itu adalah antihistoris. Saya melihat apa adanya dari perkembangan sejarah selama ini"*.[52]

Upaya delegitimasi dan de-ideologisasi Pancasila hingga kini terus dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang dipelopori oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama organisasi keagamaan yang berafiliasi dengannya dengan kedok menjalankan tuntutan syari'at Islam. Padahal dalam kenyataan di lapangan mereka telah nyata hanya merongrong, mereduksi, dan mendelegitimasi Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Gus Dur jauh hari telah mengingatkan dan merespon gerakan HTI dan afiliasinya ini dengan terus melakukan kewaspadaan terhadap bahaya yang ditimbulkan. Bagi Gus Dur harmoni dan keadilan menjadi kata kunci dalam hidup keberagamaan di tengah keberagaman umat. Penyerobotan dan pengalihan status hak masjid dan musolla menjadi pelajaran berharga bagi warga

hanya pertimbangan teknis untuk memudahkan penyebutan dalam pembahasan selanjutnya.

[52] Mujamil, *NU "Liberal"*, 255.

nahdliyyin untuk selalu waspada dan siaga, jangan sampai kasus di Pati tersebut terulang kembali. Responsi Gus Dur atas fenomena de-ideologisasi Pancasila yang dapat merusak tatanan kehidupan kebangsaan di Indonesia telah mendapat respon positif oleh warga Nahdliyyin (NU). Melalui badan-badan otonom NU telah melakukan konsolidasi secara baik, dan NU melalui gerakan kulturalnya juga melakukan hal sama. Oleh karena itu, hingga saat ini organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang paling depan dalam upaya membendung arus gerakan transnasional adalah NU dengan dukungan seluruh badan otonom di bawahnya. Slogan yang menjadi andalan NU adalah "NKRI harga mati dan Pancasila jaya".

3. Prof. Dr. Harun Nasution

a. Masa Pertumbuhan, Masa Belajar, dan Karir

Menurut Coleridge —seperti dikutip Rene Wellek & Austin, dan juga Nurisman—bahwa setiap riwayat hidup (biografi) seseorang jika diceritakan secara jujur akan menarik, walaupun kadangkala ada bagian-bagian yang dianggap tidak penting dari lingkup kisah perjalanan hidupnya.[53] Simuh juga memandang penting menelisik biografi seperti Harun Nasution ini.[54] Karena pemikirannya telah memiliki pengaruh luas dalam melandasi bangunan pemikiran Islam atau kajian Islam di Indonesia.

Dalam dunia akademik (kampus) di Indonesia, Harun Nasution (selanjutnya disebut Harun) dikenal sebagai sosok yang berhasil mendobrak tatanan pemikiran yang selama ini dianggap mengalami ke*jumud*an (statis) di kalangan akademisi. Harun adalah sosok intelektual muslim terkemuka dan memiliki pengaruh luas tidak hanya di kalangan akademisi Indonesia namun juga di dunia, karena sepak terjangnya pada kajian

[53] Rene Wellek & Austin Warren, *Teori Kesusasteraan*, (Jakarta: Gramedia, Tt.), 82.

[54] Nurisman, *Pemikiran Filsafat Islam Harun Nasution: Pengembangan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 23.

pemikiran Islam — khususnya teologi dan filsafat. Harun adalah orang pertama yang dianggap berhasil oleh berbagai kalangan, sebagai pendobrak pemikiran Islam di Indonesia melalui kampus-kampus agama Islam (PTKI: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang dirintisnya. Kontribusi besar Harun dalam dunia pemikiran Islam adalah keberhasilannya dalam membangun dan mengembangkan institusi Pascasarjana (S2 dan S3) di lingkungan PTKIN. Melalui program Pascasarjana yang dirintisnya tersebut Harun secara leluasa dapat merubah pola pikir mahasiswa dengan terus mendalami agama Islam secara kritis dan komprehensip. Penekanan Harun dalam proses pembelajaran yang diterapkan di Pascasarjana adalah konsep pembelajaran dengan mengedepankan pendekatan sejarah (*historical approach*).[55] Misi Harun semakin mantap ketika dia ditunjuk oleh Kementerian Agama (waktu itu bernama Departemen Agama) sebagai Direktur untuk Program Pascasarjana di PTKIN seluruh Indonesia.

Secara genealogis kekerabatan (kekeluargaan), Harun lahir dari lingkungan keluarga yang sangat religius, lahir di Pematangsiantar, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada hari selasa, 23 September1919. Dia anak ke empat dari lima bersaudara. Ayahnya adalah seorang ulama dari Mandailing bernama Abdul Jabbar Ahmad. Dilihat dari aspek ekonomi, keluarga ayahnya terbilang keluarga yang serba kecukupan. Ayahnya juga seorang *qadi*, penghulu, kepala agama, hakim agama dan seorang imam masjid di Kabupaten Simalungun. Sedangkan ibunya yang berasal dari Tanah Bato, putri seorang ulama Mandailing, yang pada masa mudanya pernah bermukim di Mekkah dan mahir berbahasa Arab. Dengan demikian, Harun sebenarnya hidup dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, yang kemudian mengantarkannnya menjadi intelektual Muslim yang berpengaruh di Indonesia.

[55] Kenyataan ini berdasarkan pada pengalaman penulis selama menjadi mahasiswa Pascasrjana (S2) di IAIN Syarif Hidayatullah selama dua semester pada tahun 1997-1998.

Walaupun antara Harun dan orang tuanya ada perbedaan dalam menyikapi soal fanatisme.[56]

Harun pertama-tama belajar pada *Hillands Inladsche School* (HIS), dan diselesaikan pada tahun 1943. Kemudian Harun berkeinginan untuk melanjutkan studi ke *Meer Uitgebreid Lager OnderwijsI* (MULO), tapi tidak direstui oleh orang tuanya, dan memilihnya pada sekolah Islam, *Moderne Islamietische Kweekschool* (MIK) di Bukittinggi selama 3 tahun.Harun juga pernah belajar ilmu agama kepada Abdul Malik Jambek, seorang ulama moderat dari Bukittinggi.[57] Di sinilah Harun mulai terlihat sikap kritisnya terhadap hukum Islam yang selama ini dipraktekkan oleh lingkungan keluarganya. Satu contoh adalah sikapnya dalam melihat orang Islam yang melarang pegang al-Qur'an sebelum berwudlu, namun oleh Harun itu dibolehkan sebab ada madzhab lain yang membolehkan. Karena itulah kemudian Harun dilarang oleh kedua orangtuanya untuk belajar ke sekolah guru Muhammadiyah di Solo. Harun kemudian dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk studi di Mekkah agar menjadi orang benar walaupun hanya ditempuh oleh Harun satu setengah tahun. Menurut Harun studi di Mekkah dianggapnya kurang tepat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, sehingga Harun pindah ke Universitas al-Azhar Mesir pada tahun 1938 M ketika dia berusia 21 tahun dan dapat diselesaikannya pada tahun 1940 M.[58]

Ada tiga pertimbangan bagi Harun untuk memilih belajar di Mesir, yaitu: *Pertama,* di Mesir banyak perguruan tinggi - Universitas al-Azhar, Universitas Cairo, Universitas Helwan, dan Universitas Ain Syam. Ada satu lagi universitas swasta di Mesir, yaitu Universitas Amerika. Di Universitas al-Azhar, Harun

---

[56] Aqib Suminto, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70tahun Harun Nasution,* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1989), 4.

[57] Nurisman, *Pemikiran Filsafat Islam*, 44.

[58] *Ibid.*, 49.

memilih Fakultas Usuluddin dengan bekal ijazah Ahliah, semacam ujian persamaan di al-Azhar, karena Harun hanya memiliki surat keterangan selesai kelas tiga di MIK. Yang dikeluarkan oleh *Qism al-'Am* (bagian umum) yang berpusat di masjid al-Azhar Cairo Mesir.[59] Pada Fakultas Usuluddin ini Harun telah mempelajari filsafat, etika, ilmu jiwa, bahasa Inggris dan Perancis.Harun kemudian dapat menyelesaikannya secara baik.Harun juga seringkali berkunjung ke perpustakaan milik Universitas Amerika di Mesir.

Setelah Harun tamat dari Universitas al-Azhar Mesir, dia melanjutkan studi di Universitas Amerika tersebut untuk mengambil studi ilmu sosial, dan mendapat gelar sarjana muda (BA) pada tahun 1952. Pada saat itu pemikiran Harun sudah mulai tampak dengan kekritisannya dalam menyikapi berbagai persoalan yang melanda negerinya. Landasan normatif Islam rasionalnya telah menjadi awal dari kegelisahannya dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul saat itu. Di samping itu Harun bersama kawan-kawan seperjuangannya juga terlibat aktif dalam perkumpulan para aktivis politik. Harun memiliki hubungan persahabatan dengan pemimpin politik dari Partai *Wafd* (Liberal) hingga Partai *Misr al-Fatat* (Partai Nasional Sosialis) maupun dengan *Ikhwanul Muslimin*. Oleh karena itu, di sinilah Harun mulai mengerti tentang kehidupan politik di dunia Islam di tahun 40-an dan 50-an.

Untuk pertama kali Harun tergabung sebagai pegawai negeri pada Konsulat Belanda di Kairo sebagai diplomat (*diplomatic service*), tepatnya pada tahun 1949, dia ditunjuk sebagai atase. Kepala kantorya adalah H.M. Rasyidi. Harun pernah mengalami kesulitan keuangan, sehingga dia bekerja juga pada perusahaan Phillips SA, perusahaan lampu dan radio, juga juru tulis militer Inggris. Kemudian Harun mempersunting gadis Mesir, Sayyedah

---

[59] Lihat Komaruddin Hidayat & Hendro Prasetyo, "*Menilik Dinamika IAIN: Sebuah Pengantar*", dalam *Problem & Prospek IAIN*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), vii.

Taufik. Pada tahun 1953, Harun kemudian kembali ke Indonesia dan mendapat tugas di Departemen Luar Negeri di Jakarta sebagai seksi Arab. Salah seorang mitra kerja Harun adalah Munawir Sadzali, yang kemudian diangkat menjadi Menteri Agama (1983-1993). Pada saat itulah Harun telah memiliki gelar diplomatik sekretaris II. Sesuai dengan jabatannya sebagai seksi Arab, Harun bekerja untuk membaca surat kabar terbitan Timur Tengah. Harun mendapat tugas untuk meneliti dan mengamati perkembangan, jika sewaktu-waktu terdapat informasi yang sangat penting untuk dilaporkan kepada atasan. Pada tahun 1954 Harun mendapat tugas ke Saudi Arabia dalam urusan haji. Pada tahun 1955 Harun ditugaskan berangkat ke Brussel, Belgia, sebagai sekretaris duta besar. Di sinilah Harun menjadi terperanjat terhadap berbagai kemajuan yang ada di negara tersebut. Setelah situasi politik di Jakarta yang tidak kondusif karena pengaruh komunis terhadap Soekarno dianggap kuat, dan Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 1959, Harun kemudian berhenti sebagai sekretaris duta besar, dan mengakhiri karir diplomatnya pada tahun 1960. Karena Harun memang tidak menyukai gerakan komunis dan pengaruhnya terhadap Soekarno.

Semangat intelektualnya menjadikan Harun ingin belajar kembali ke Mesir dengan mengambil *al-Dirasat al-Islamiyah.* Dosennya saat itu adalah Abu Zahrah, seorang ulama tersohor di Mesir. Direkturnya adalah Muhammad Arabi.Kemudian pada saat bersamaan ada informasi bahwa Harun –atas rekomendasi H.M. Rasyidi, yang dulu pernah menjadi atasannya—untuk melanjutkan studi ke McGill University. Di Universitas ini Harun memperoleh dua gelar kesarjanaan, yaitu Magister dengan mengambil tesis tentang sejarah Indonesia, *The Islamic State in Indonesia: The Rise of The Ideologi, The Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi* pada tahun 1965, dan Doktor dengan mengambil judul disertasi "*The Placeof Reason in 'Abduh's Theologi: Its Impact on His Theological System and Views*", yang diperoleh

Harun pada Juni 1968 dalam usia 49 tahun. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, ia kembali ke Indonesia.Harun disebut sebagai pengagum dan pengembang pemikiran Abduh. Hal ini terlihat dari karya-karya Harun yang bercorak rasional dan cenderung Muktazilah.[60]

Setelah kembali ke Indonesia, Harun kemudian mencurahkan perhatiannya pada pengembangan kajian pemikiran Islam melalui IAIN. Diawali sebagai dosen biasa di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian diangkat menjadi Wakil Rektor bidang akademik, yang waktu itu rektornya adalah Thaha Yahya Umar. Setelah Thaha meninggal, Harun diangkat menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga dua periode (1974-1982). Pada saat itulah Harun memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kultur akademik yang kritis dan berfikir Islam secara komprehensip. Harun adalah perintis program Pascasarjana untuk studi Islam di IAIN Jakarta, dan menjabat direktur Pascasarjana di IAIN Jakarta pertama kali -setelah tidak menjabat sebagai rektor— hingga dia dipanggil oleh Allah SWT untuk selamanya pada tahun 1998 di saat perjalanan pulang dari mengajar di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan usia kurang lebih 79 tahun. Dia meninggal 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-80.

Dalam konteks pembaruan Islam melalui IAIN, Harun -sebagaimana dikutip Nurisman— membuat tiga langkah mendasar, yaitu: *Pertama,* meletakkan pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam itu dibagi menjadi ajaran pokok (dasar) yang bersifat absolut, dan ajaran yang bersifat relatif, yaitu ajaran yang merupakan pengembangan. *Kedua,* melakukan perubahan kurikulum di IAIN. Hal ini telah dilakukan oleh Harun Nasution sejak menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta. *Ketiga,* bersama Menteri Agama RI

---

[60] MB. Hooker, *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial,* (Bandung: Jakarta, 2002), 59; Nurisman, *Pemikiran Filsafat Islam,* 54-59.

mendirikan program Pascasarjana untuk melahirkan pemimpin yang berfikir rasional dan memahami filsafat.[61] Pascasarjana yang kemudian berkembang pesat saat ini di seluruh PTKI di Indonesia adalah warisan berharga bagi bangsa Indonesia berkat tangan dari Harun Nasution. Bahkan penulis berani mengatakan, "tanpa tangan dingin Harun Nasution, pascasarjana di lingkungan PTKI di Indonesia, mungkin tidak akan pernah ada". Implikasi besar yang dapat dirasakan adalah produk dari buah pemikiran yang berhasil sebagai akibat dari dinamika pemikiran Islam yang dikembangkan pada program Pascasarjana tersebut, yang hingga saat ini sangat terasa pengaruhnya, yaitu pemikiran rasional dan lebih terbuka.

b. Karya-karya Harun Nasution

Tidak sedikit karya Harun yang hingga kini menjadi bacaan dan referensi akademis, menyangkut pembaruan pemikiran-pemikiran Islamnya. Beberapa karya Harun tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan,* yang ditulis pada tahun 1972. Dalam buku ini disuguhkan kajian kalam dalam persepktif sejarah dan filsafat. Menurut Harun kajian kalam selama ini hanya menggunakan pendektan normatif, belum menyentuh pada akar dari kalam itu sendiri yang sarat nuansa sejarah dan filsafatnya.
2. *Filsafat Agama,* yang diterbitkan pada tahun 1973 oleh Penerbit Bulan Bintang. Buku ini merupakan kumpulan kuliah, ceramah, dan diskusinya di berbagai kampus dan tempat-tempat lainnya.
3. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam,* yang ditulis dan diterbitkan pada tahun 1973. Jika buku sebelumnya kajian filsafatnya lebih luas, maka buku ini kajiannya menyangkut filsafat Islam dan tasawuf semata.

---

[61] *Ibid,* 74.

4. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1-2*, yang menjelaskan berbagai hal mulai dari sejarah, ibadat, ritual, spiritual, moral, kebudayaan, hingga soal kemasyarakatan.
5. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, yang diterbitkan pada tahun 1975.
6. *Akal dan Wahyu dalam Islam*, yang diterbitkan pada tahun 1982, adalah kumpulan isi ceramah pada IAIN Jakarta pada 23 September 1978.
7. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, yang diterbitkan pada tahun 1987. Buku inilah yang merupakan buku yang dianggap sebagai *trademark* Harun sebagai rsionalis, Mu'tazilis, dan Abduhis.
8. *Islam Rasional*, yang diterbitkan pada tahun 1995, merupakan karya Harun dari makalahnya yang dikumpulkan kemudian diedit oleh Saiful Mujani, yang diterbitkan Mizan Bandung.[62]

Sebenarnya masih banyak lagi karya Harun yang tidak terpublikasikan secara baik, ada yang berupa artikel yang termuat di berbagai jurnal, majalah, dan disampaikan dalam berbagai forum ilmiah lainnya. Demikian warisan berharga Harun yang hingga kini menjadi bahan dan inspirasi pembaruan pemikiran Islam yang dapat mewarnai dinamika kajian pemikiran Islam di Indonesia.

c. Pandangan Harun Nasution tentang Pancasila *Vis a vis* Islam dan Upayanya dalam Membendung Gerakan DeIdeologisasi Pancasila

Harun Nasution dikenal sebagai tokoh pembaharu Muslim Indonesia yang memiliki pemikiran rasional.Pemikiran yang pertama kali dibangun adalah mengenai posisi akal dan wahyu. Menurut Harun, selama ini mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut faham teologi Asy'ariyah yang seringkali dianggap sebagai faham yang mewakili golongan Islam tradisional, dan

[62] *Ibid.*, 104.

Mu'tazilah diklaim mewakili kelompok Islam rasional. Harun ingin mengenalkan pemikiran Mu'tazilah ke Indonesia. Harun memang sangat terinspirasi oleh pemikiran tokoh gerakan modernisme Islam di Mesir, seperti Muhammad Abduh (1849-1905), penganut teologi rasional Mu'tazilah. Menurut Abduh, sikap *jumud* (statis) dalam berfikir umat Islam menjadi penghambat majunya Islam dan peradaban yang dibangun. Oleh karena itu, *mindset* umat Islam harus dirubah.[63] Harun sependapat dengan Abduh bahwa sumber utama ajaran Islam adalah akal manusia. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi sehingga Islam adalah agama yang rasional.[64]

Menurut Harun, akal menjadi dasar dalam beragama Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna jika tidak didasarkan pada akal. Islam sangat menjujnung tinggi kedudukan akal. Akal dalam perspektif Harun, harus ditempatkan yang tinggi jika umat Islam ingin maju dalam segala hal. Sebab sumber ilmu pengetahuan adalah akal itu sendiri. Di sinilah persinggungan antara akal dan *sunnatullah* menjadikan titik temu keduanya. Kedua-duanya bersumber dari Allah. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan, demikian pula sebaliknya. Harun dalam berbagai kesempatan seringkali mengatakan bahwa perpaduan pemikiran Abduh dan konsep Mu'tazilah mampu membawa masyarakat menjauh dari kekacauan, bahkan tanpa turunnya wahyu sekalipun. Namun, bukan berarti Harun menentang konsep wahyu dalam meyakini Islam dan ke-Ilahian Tuhan. Akan tetapi Harun justru menganggap bahwa perpaduan wahyu dan akal dua hal utama yang dapat saling melengkapi. Harun meyakini, bahwa al-Qur'an sebagai wahyu Allah memandang akal sebagai sesuatu yang sangat penting. Bagi Harun, akal sangat berguna bagi manusia untuk membedakan antara baik dan buruk. Yang demikian juga

---

[63] Aqib Suminto,.*Refleksi Pembaharua*, 174.

[64] Warkum Sumitro dan Kawan-kawan dalam *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, (2014), 38.

dijelaskan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, Harun tidak sepakat dengan ulama yang berfaham taklid buta, sehingga mengebiri akal. Bagi Harun, hal semacam ini justru dianggapnya bertentangan dengan pesan al-Qur'an dan al-Hadis itu sendiri.

Konsekuensi dari buah pemikirannya tersebut, Harun dikategorikan sebagai tokoh Muslim Indonesia yang memiliki faham liberal. Dalam hal ini tidak sedikit tokoh Muslim lain termasuk para kyai pesantren dan ulama lainnya mengecam pemikiran Harun, bahkan Harun disebut sebagai seorang murtad, bahkan sebutan kafir yang dialamatkan ke Harun adalah hal biasa terjadi. Padahal jika dilihat dari aspek pemikiran Harun, sebenarnya dia tidak berfaham liberal sebagaimana yang dianut di Barat/Eropa, namun liberalitas Harun masih pada tataran yang bisa ditoleransi, sebab dia masih mendudukkan al-Qur'an sebagai sumber utama. Akal bagi Harun memiliki kedudukan sejajar dengan wahyu di saat wahyu tidak memberikan penjelasan secara konkrit (*sharih*), sehingga di sinilah akal diperlukan untuk menjelaskannnya. Dalam kaitan itulah, Harun membagi dua ajaran Islam, yaitu ajaran absolut (mutlak kebenarannya) sebagaimana dalam al-Qur'an dan al-Hadis, dan ajaran yang tidak absolut (bersifat *nisby*/relatif), yaitu ajaran dari pemahaman teks-teks suci tersebut yang bersifat *ijtihady* (*istinbath*y/penggalian). Harun masih melihat wahyu sebagai sumber utama. Jika ditemukan akal dalam memahami persoalan bertentangan dengan wahyu, maka Harun pun menolaknya. Akal bagi Harun memiliki kedudukan tinggi, namun tidak boleh mengganti kedudukan wahyu. Dengan demikian, bagaimanapun kedudukan dan peranan akal dalam ajaran Islam untuk memperoleh pengetahuan, tidak boleh bergerak dan berjalan tanpa bimbingan wahyu. Wahyu itu dapat dijelaskan oleh akal, jika ditemukan dalam wahyu hal-ihwal yang memerlukan penjelasan. Karena itulah Allah SWT menurunkan petunjuknya dalam bentuk wahyu.[65]

---

[65] Mulyadi Kartanegara, *Pengantar Epistemologi Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), 19.

Dasar pemikiran rasional Harun menjadi pijakan dalam memahami dan menyikapi berbagai persoalan, baik menyangkut keberagaman, keberagamaan, hingga soal-soal sosial, budaya, dan politik yang berkembang di Indonesia. Harun sebagai tokoh yang sangat diperhitungkan dalam dinamika pemikiran Islam di Indonesia memiliki pengaruh kuat, terutama di kalangan akademisi (kampus). Terkait dengan hubungan Pancasila dan Islam, secara filosofis, Harun Nasution memberikan pandangan tentang interrelevansi antara Pancasila dengan ajaran Islam. Menurut Harun, Pancasila tidaklah bertentangan dengan Islam, melainkan dapat berjalan beriringan dengan Islam. Pancasila jika dilihat kandungan isinya merupakan pengejawantahan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Islam itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing sila dalam Pancasila. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Pancasila dalam sejarah pembentukannya, para *founding fathers* kemudian menerima sebagai ideologi dan common *platform* walaupun terdapat konflik-konflik sebagai dinamika pembentukannya. Penjelasan penting Harun mengenai hubungan Pancasila dan Islam adalah sebagai berikut:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah ajaran dasar yang pertama dalam Islam. *Syahadat* pertama kali bagi umat Islam adalah ungkapan "Tiada Tuhan selain Allah SWT".Inilah yang dalam Islam dikenal dengan "tauhid". Tauhid melandasi setiap amaliah umat Muslim. Prinsip dasar dalam tauhid adalah mengEsakan Allah SWT, tidak mempersekutukan dengan lainnya, tidak boleh dan ada yang meminta, memohon, memuja, dan bergantung kepada selain Allah SWT.Semua amal perbuatan harus disandarkan kepada Allah SWT. Prinsip tauhid ini tidak bertentangan atau berbeda dengan prinsip yang ada pada sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, sila pertama sebenarnya merupakan landasan ideal sebagai Muslim yang sejati. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa sila pertama dalam Pancasila sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam itu sendiri.

Sila kedua,Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, merupakan konsekuensi dari tauhid. Sebab tauhid mengajarkan juga tentang berbuat adil dan beradab kepada siapa pun. Keadilan dan keadaban inilah yang menjadi pesan moral yang harus dijalankan oleh setiap Muslim di manapun dan hingga kapanpun. Di dalam Islam juga dikenal adanya prinsip bahwa semua ciptaan Allah adalah makhluk. Al-Qur'an juga mengajarkan tentang pentingnya menjalin persaudaraan antar seluruh umat manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, mengapresiasi, dan menghormati. Satu kata dalam Islam adalah *ukhuwwah* (persaudaraan) untuk menjaga persatuan. Di sinilah pentingnya berbuat adil dan beradap kepada sesama manusia, agar terjalin persaudaraan sebagai basis persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ini pun dipandang oleh Harun sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menjunjung tingi persatuan. Sebab tanpa adanya persatuan, maka NKRI sebagai cita-cita bersama akan musnah. *Hubb al-Wathan* sebagai adagium ulama nusantara merupakan sinyalemen pentingnya membangun persatuan di antara warga bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bangsa, etnis, bahasa, ras, agama, dan bahkan kepercayaan, jika persatuan ini tidak diwujudkan, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Islam sangat mengajarkan pentingnya persatuan ini. Di siilah diperlukan saling membantu, saling menolong, gotong-royong, dan saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia. *Hubb al-Wathan* menurut Harun, sebagai bagian dari sila ketiga yang sejalan dengan ajaran Islam. Manusia satu tanah air, merupakan satu lingkaran kecil dalam lingkaran besar, yaitu lingkaran umat manusia. Dari segi agama, ia merupakan lingkaran yang lebih kecil dalam lingkaran umat seagama yang lebih luas. Oleh karena itu, persatuan Indonesia adalah salah satu dari persatuan kebangsaan yang terdapat di dunia Islam.

Silakeempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, juga merupakan ajaran dasar Islam. Ajaran tauhid tersebut di atas yang membawa kepada peri kemakhlukan dan peri kemanusiaan, selanjutnya juga membawa kepada faham kerakyatan dan permusyawaratan. Semua manusia adalah bersaudara dan sama. Pentingnya musyawarah (*syura*) dalam Islam dapat dilihat dari kewajiban Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan umat yang dipimpinnya. Contoh tradisi musyawarah yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah bukti bahwa musyawarah menjadi tradisi baik dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. Dengan demikian sila keempat Pancasila ini inheren dengan pesan-pesan moral dalam Islam.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, juga sejalan dengan ajaran dasar Islam. Salah satu sifat Allah adalah Maha Adil (*al-'Adil*). Allah yang Maha Adil menghendaki manusia berbuat adil, berbuat kebajikan dan dermawan kepada sesamanya, dan Ia melarang berbuat keji, kemungkaran dan penindasan.[66] Ciri seorang Muslim yang disebut culas adalah orang yang tidak dapat berbuat adil dan kebaikan. Lebih-lebih ketika ditunjuk sebagai pemimpin suatu kaum. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat, dapat diukur dari tingkat keadilan dan kebaikan yang ditebar untuk umat masnuia. Sila kelima ini juga sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Siapa pun sekiranya tidak akan ada yang megingkari prinsip ajaran keadilan bagi sesama ini.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *entry point* pemikiran Harun tersebut ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pada Pancasila tidak dapat dipertentangkan atau dibenturkan dengan nilai-nilai dan ajaran dalam Islam (al-Qur'an), bahkan keduanya dapat saling bertemu. Oleh karena itu, Pancasila yang hingga kini menjadi ideologi

---

[66] Harun Nasution, "*The Islamic State in Indonesia*", *Thesis MA*, (Montreal: McGill University, 1965).

bangsa dalam mengatur tata pergaulan hidup dan kehidupan masyarakat Indnesia –menurut Harun—sudah sangat tepat dan tidak perlu diutak-atik kembali. Kesepakatan para *founding fathres* dalam hal itu merupakan kesepakatan *genuine* dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kebangsaan di Indonesia. Intermediasi yang dilakukan Harun tentang hubungan pancasila dan Islam dalam konteks saat ini telah menemukan momennya di saat Indonesia dihadapkan kepada tuntutan oleh sekelompok orang yang mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi, khususnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok/aktifis soaial politik yang menyerukan adanya perubahan dengan sistem khilafah dari HTI dan afiliasinya.

Harun melihat bahwa walaupun penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan hasil yang bersifat *ijtihady,* namun yang dilihat bukanlah pada produk *ijtihad*nya itu. Akan tetapi lebih kepada dinamika dan konsekuensi yang ditimbulkan tersebut, yaitu menyangkut kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk masa-masa selanjutnya. Sebagaimana dielabarasi di atas, bahwa dinamika panjang dengan berbagai konflik dan intrik yang mewarnai pembentukan Pancasila sebagai ideologi telah usai, dan inilah hasil kesepakatan (*ijtihad*) bersama yang ideal demi harmoni, keadilan, dan kesejahteraan bangsa, maka sebagai bagian dari bangsa Indonesia tidak boleh bahkan wajib memegang teguh hasil kesepakatan bersama tersebut untuk dijalankan secara baik dan konsekuen.

Dalam konteks kebangsaan saat ini, sebenarnya Harun menjadi peletak dasar pemahaman terhadap pentingnya menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Poin-poin penting pemikiran Harun tentang kedudukan Pancasila di tengah kehidupan kebangsaan di atas juga menjadi petunjuk tentang bahaya laten atau terang-terangan yang sewaktu-waktu datang dan dapat mengancam sistem demokrasi Pancasila yang telah sekian lama dibangun

oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan dalih dan alasan apapun segala/setiap upaya yang mengarah kepada de-idelogisasi Pancasila harus ditolak dan bahkan mungkin diusir dari bumi Indonesia. Sebab bangsa Indonesia ini telah dibangun di atas ideologi dengan penuh pengorbanan yang sangat panjang, tidak hanya harta dan nyawa, tapi juga jiwa dan raga sekaligus.

4. Prof. Dr. Nurcholish Madjid

a. Keluarga, Pendidikan, dan Karir

Dalam sejarah dinamika pemikiran Islam, selalu saja tidak dapat dilepaskan dari konteks zamannya. Sejarah terus berubah, maka gelombang pemikiran Islam juga demikian mengikutinya. Pemikiran-pemikiran tokoh muslim kontemporer juga selalu didasarkan pada dinamika perkembangan yang ada, baik ditingkat nasional maupun global. Memang demikianlah tuntutan intelektual yang menjadi tanggungjawabnya sebagai orang yang dapat melihat, membaca, dan memberikan pandangan dan solusi atas berbagai problem yang dihadapi umat manusia. Dengan demikian, produk pemikiran tokoh tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio historis yang melingkupinya. Apakah produk pemikirannya tersebut masuk dalam kategori pemikiran liberalkah, tradisonalkah, sekulerkah, atau modern. Termasuk dalam kaitan ini adalah pemikiran Nurcholis Madjid (selanjutnya disebut Cak Nur).

Dalam catatan sejarah pemikiran Islam kontemporer –Dawam Rahardjo mencatat– sejak awal dasawarsa 1970-an, pembaruan telah menjadi istilah yang pejoratif, dengan konotasi tertentu dan membawa kecurigaan di kalangan luas, tidak saja di lingkungan awam, tetapi juga di kalangan intelektual. Ada dua alasan kenapa hal ini bisa terjadi. *Pertama,* pembaruan Islam dicurigai atau dikaitkan dengan paham sekularisme. *Kedua,* pembaruan juga disangka mengandung latar belakang politik tertentu yang

mengarah pada usaha-usaha "memojokkan" peranan umat Islam.[67]

Salah satu tokoh penting pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur). Cak Nur lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 dan meninggal dunia di Jakarta, 29 Agustus 2005 pada umur 66 tahun. Cak Nur banyak dikenal sebagai seorang pemikir Islam dan cendekiawan muslim Indonesia. Cak Nur lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga kyai terpandang di Dusun Mojoanyar, Mojotengah, Bareng, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya adalah K.H. Abdul Madjid, dikenal sebagai pendukung Masyumi; sedangkan ibunya bernama Fatonah, putri Kiai Abdullah Sadjad dari Kediri. Cak Nur adalah putra sulung dari 3 bersaudara.[68] Dengan demikian, Cak Nur sebenarnya hidup dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang kondusif dalam membentuk kepribadian dan intelektualnya.

Cak Nur menghabiskan waktu kecil dan remajanya di pesantren, yaitu pesantren Darul Ulum Rejoso di Jombang dengan mengambil Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian melanjutkan pesantren Gontor di Ponorogo. Setelah menamatkan dari pesantren Cak Nur melanjutkan studi ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1961-1968).[69] Di sinilah Cak Nur kemudian menjadi aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipilih menjadi ketuanya. Pada periode Cak Nur Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI dapat dibuat, sehingga di kemudian hari buku NDP tersebut menjadi buku pegangan ideologis HMI. Cak Nur berargumen bahwa organisasi mahasiswa seperti Central Gerakan Actie Mahasiswa (CGMI) yang beraliran komunis saja memiliki buku pegangan ideologis & Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga memilikinya. NDP ditulis Cak Nur pada saat dia sedang studi di Amerika Serikat. NDP ditulis

---

[67] M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), 273.

[68] Kuntowijoyo dkk.,dalam *Begawan Jadi Capres: Cak Nur Menuju Istana*,(Jakarta: KPP Paramadina, 2003), 18.

[69] Susilo Surahman, "*Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid*", dalam *JURNAL DAKWAH*, Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2010, 129.

Cak Nur karena terisnpirasi oleh pengalaman perjalanannya pada saat ke Timur Tengah, sehingga mendapatkan pengetahuan global. Hal ini pula yang mengantarkan Cak Nur terpilih menjadi Ketua Umum untuk dua periode. Kemudian dia melanjutkan studi doktoralnya pada Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984), dengan membahas disertasi tentang filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah.[70]

Sekembalinya dari Amerika Serikat, Cak Nur mendapat kesempatan untuk mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah (1972-1976); dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah (1985-tahun 2000-an); peneliti pada LIPI (1978); guru besar tamu pada Universitas McGill, Montreal, Canada (1991-1992). *Fellow* dalam *Eisenhower Fellowship*, bersama isteri (1990).Cak Nur adalah seorang intelektual Muslim yang sangat produktif menulis. Gagasan-gagasannya banyak dijumpai makalah-makalah yang dipublish dalam berbagai majalah, surat kabar dan buku suntingan, beberapa di antaranya berbahasa Inggris.

Sejak tahun 1986, Cak Nur bersama para intelektual lainnya di Jakarta, mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina, dengan kegiatan-kegiatan yang menggeliatkan gerakan pemikiran intelektual Islam di Indonesia. Tidak sedikit dari hasil kegiatan ilmiah di Paramadina kemudian dibukukan menjadi referensi yang berbobot, khususnya penyikapan terhadap berbagai persoalan yang muncul seperti keagamaan, sosial, budaya, politik, ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Cak Nur juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) sejak tahun 1991,[71] dan juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina hingga menemui ajalnya pada tahun 2005.

Cak Nur dianggap sebagai cendekiawan Muslim Indonesia

---

[70] *Ibid.*,173.

[71] *"Biografi Nurcholish Madjid-Cendekiawan Muslim"*, dalam https://www.biografiku.com/biografi-nurcholish-madjid/, diakses tanggal 8 Agustus 2018.

yang memiliki andil besar dalam proses reformasi di tahun 1998. Di mana pada saat itu Indonesia telah mengalami krisis kepemimpinan yang berpengaruh pada krisis di berbagai aspek, dan Cak Nur seringkali dimintai pendapat oleh Presiden Soeharto, khsusnya dalam mengatasi gejolak pasca kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Cak Nur memiliki saran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursinya agar gejolak politik yang berimbas kepada lainnya tidak terjadi semakin parah. Atas saran Cak Nur kemudian Soepharto mau meninggalkan kekuasaannya. Cak Nur juga merupakan penggagas dari kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.

Akhirnya Cak Nur meninggal dunia pada 29 Agustus 2005 akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Cak Nur kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara, sebagai penerima Bintang Mahaputra dari negara.

b. Karya Warisan Nurcholish Madjid

Sebagai seorang pemikir, intelektual, pembaharu, dan juga aktifis Muslim, Cak Nur memiliki sejumlah karya tulis yang hingga kini masih menjadi bahan/rujukan banyak orang dalam menganalis sejumlah isu, khusunya menyangkut soal keagamaan, pluralism, politik, sosial-budaya, dan lain-lain. Di antara beberapa karyanya adalah sebagai berikut:

1. *"The Issue of Modernization among Muslim in Indonesia, a Participant Point of View"*, dalam Gloria Davies (ed.),*What is Modern Indonesia Culture* (Athens, Ohio, Ohio University, 1978).
2. *"Islam In Indonesia: Challenges and Opportunities"*, dalam Cyriac K. Pullabilly (ed.), *Islam in Modern World* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982).
3. *"Islam Di Indonesia: Tantangan dan Peluang"*, dalam Cyriac K.

Pullapilly, *Islam dalam Dunia Modern,* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982).

4. *Khazanah Intelektual Islam,* (Jakarta, Bulan Bintang, 1982).
5. *Islam, Kemoderanan dan Keindonesiaan,* (Bandung: Mizan, 1987, 1988).
6. *Islam, Doktrin dan Peradaban,* (Jakarta: Paramadina, 1992).
7. *Islam, Kerakyatan dan KeIndonesiaan,* (Bandung: Mizan, 1993)..
8. *Pintu-pintu Menuju Tuhan,* (Jakarta: Paramadina, 1994).
9. *Islam, Agama Kemanusiaan,* (Jakarta: Paramadina, 1995).
10. *Islam, Agama Peradaban,* (Jakarta: Paramadina, 1995).
11. "In Search of Islamic Roots for Modern Pluralism: The Indonesian Experiences", dalam Mark Woodward (ed.), *Toward a new Paradigm, Recent Developments in Indonesian Islamic Thoughts,* (Tempe, Arizona: Arizona State University, 1996).
12. *Dialog Keterbukaan,* (Jakarta: Paramadina, 1997).
13. *Cendekiawan dan Religius Masyarakat,* (Jakarta: Paramadina, 1999).
14. *Pesan-pesan Takwa (kumpulan khutbah Jumat di Paramadina),* (Jakarta: Paramadina).

Di samping karya-karya Cak Nur yang telah dipublikasikan di atas, sebenarnya masih banyak lagi karya Cak Nur yang tidak/belum dapat dilacak dan dipublikasikan secara baik. Karya-karya Cak Nur berupa artikel/makalah yang pernah disampaikan dalam berbagai forum ilmiah adalah warisan yang yang sangat berharga. Karya-karya tulis Cak Nur dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan prisma pemikiran dan gerakan pemberdayaan umat yang dilakukan oleh Cak Nur. Tidak sedikit generasi yang kemudian menjadi penyambung pemikiran progresif Cak Nur, seperti Budhi Munawar Rahman, Komaruddin Hidayat, Kausar Azhari Noor, Zainun Kamal, Anis Baswedan, Mulyadi Kartanegara, dan lain-lain. Yayasan Paramadina yang didirikan Cak Nur dan kawan-kawannya

menjadi tempat yang sangat kondusif dalam membentuk dan mengembangkan pemikiran progresif generasi muda Islam demi membangun peradaban Islam di Indonesia. Saat ini Paramadina tidak hanya menjadi tempat diskusi tentang berbagai hal, namun juga menjadi institusi yang otonom dan independen dalam memperjuangkan hak-hak sipil, bahkan di sini juga telah dibangun sebah universitas Paramadina.

c. Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pancasila dan Islam, dan Upaya De-Ideologisasi Pancasila di Indonesia

Konsep teologis yang mendasari Cak Nur dalam menuangkan gagasan-gagasan progresifnya adalah tentang keyakinannya disebut sebagai hak primordial setiap umat manusia dan keyakinan terhadap Tuhan yang diyakini merupakan konsep paling mendasar. Menurut Cak Nur, hal demikian membawa konsekuensi bahwa kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar bagi setiap umat manusia asalkan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Konsep inilah yang kemudian membawa Cak Nur sebagai tokoh pluralisme di Indonesia. Cak Nur sangat mengakomodasi keberagaman/kebhinnekaan yang ada di Indonesia, sehingga siapapun yang merasa terganggu atau terpasung kebebasannya, Cak Nur selalu memberikan pembelaan. Karena itulah Cak Nur disebut sebagai tokoh Muslim moderat, pluralis dan multikulturalis. Menurut Cak Nur keyakinan seseorang tersebut suatu saat akan dihadapkan pada Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kelak atas perilaku yang diperbuatnya. Kebebasan dalam memilih merupakan konsep yang rasional.

Cak Nur dianggap sebagai cendekiawan Muslim yang fenomenal dan kontroversial sebagaimana K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keduanya adalah putra terbaik yang lahir dari Jombang, dan memiliki transmisi intelektual yang hampir sama, yaitu sama-sama dari keluarga kyai/ulama besar. Cak Nur juga disebut sebagai tokoh yang mendorong pluralisme di Indonesia

seperti yang dilakukan Gus Dur. Di tahun 1960-an Cak Nur memiliki gagasan kontroversial dengan mengatakan bahwa *"Pancasila sebagai ideologi terbuka"* yang tidak harus dirumuskan secara detail sekali untuk selamanya (*once and for all*), sebab jika hal demikian dilakukan, maka Pancasila akan ketinggalan zaman.[72] Cak Nur berargumen bahwa dalam kehidupan modern seperti saat ini dan akan datang diperlukan demokrasi terbuka (*open minded*) untuk dapat menjawab segala persolan yang muncul. Menurut Cak Nur, Pancasila jangan ditafsiri oleh satu badan otonom yang tidak memberikan ruang publik untuk menafsirkannya, Indonesia dalam konteks ini adalah negara plural dan akan menghadapi dunia yang semakin modern.[73] Oleh karena itu, menurut Cak Nur diperlukan keterbukaan dalam memahami Pancasila.[74]

Bagi Cak Nur, Pancasila merupakan *kalimatun sawa'* yang diterjemahkan menjadi *common platform*. Cak Nur memberikan argumen bahwa *kalimatun sawa'* dalam Pancasila secara historis dapat dibuktikan dengan ajaran dan perilaku yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika membangun masyarakat yang plural dan multi kultural di Madinah. "Piagam Madinah (*Shahifah Madinah*)" merupakan dokumen paling otentik dalam sejarah peradaban umat yang mengatur hubungan antar sesama umat manusia yang beragam. Piagam Madinah dibuat oleh Nabi SAW bersama masyarakat Madinah yang sangat beragam (bhinneka), menjadi landasan normatif bagi setiap umat Muslim di seluruh dunia -bahkan menjadi rujukan umat-umat agama lain. Sebagai konsekeunsinya adalah umat beragama Islam harus dapat dan bisa hidup berdampingan yang saling hormat dan menghormati agama atau kepercayaan lain yang ada di Indonesia. Oleh karena

---

[72] Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*, (Jakarta: Kompas, 2010), 262.

[73] Budhy Munawar-Rachman, *"Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban"* (Mizan dan Yayasan Waqaf Paramadina Center for Sprituality and Leadership (CSL), 2006), 2298

[74] Lihat Ngainun Na'im, *"Ilsam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid"*, dalam *Epistemé*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, 441-442.

itu, Pancasila itu seperti Piagam Madinah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai dokumen otentik dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Cak Nur menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sebaliknya dapat berjalan beriringan dengan Islam.[75]

Sikap toleransi terhadap keberbedaan yang ada, oleh Cak Nur disebut sebagai *al-hanifiyat al-samhah,* yaitu sebuah sikap beragama yang bersemangat mencari kebenaran secara lapang, toleran, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa. Sikap beragama yang lapang, menurut Cak Nur, memiliki dimensi historis dan teologisnya bagi agama-agama yang berakar dari tradisi Nabi Ibrahim, di mana ia tidak terikat pada agama-agama secara formal, melainkan agama yang memiliki semangat pencarian kebenaran dan tunduk pada kebenaran itu sendiri. Sebab Pancasila adalah sebuah ideologi bersama (*common platform/ kalimatun sawa'*), yang merupakan prinsip-prinsip yang menjadi titik pertemuan dan persamaan antara warga negara Muslim dan non-Muslim untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[76]

Oleh karena itu, menurut Cak Nur, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang benar —sebagai konsensus bersama seluruh komponen bangsa—, baik dilihat dari isi maupun kedudukan-nya sebagai *kalimah sawa'* bagi kehidupan berbangsa bersama pemeluk agama lain. Kesepakatan tentang dipercayainya "Tuhan Maha Esa" pada sila pertama, sebenarnya telah cukup baik. Apalagi ditambah dengan kesepakatan-kesepakatan yang lain, yaitu keempat sila berikutnya. Di atas *kalimah sawa'* inilah umat Islam bersama pemeluk agama lain dapat bekerjasama untuk kepentingan masyarakat lebih luas.[77]

---

[75] Lihat "*Pancasila dalam Pemikiran Nurcholish Madjid*", dalam https://www.qureta.com/post/pancasila-dalam-pemikiran-nurcholish-madjid, diakses 9 Agustus 2018.

[76] Lihat juga pada Yasmadi, *Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional,* (Jakarta: Ciputat press, 2002), Cet. 1, 3.7

[77] Nurcholish Madjid, "*Islam Indonesia Menatap Masa Depan: Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah*

Pemikiran progresif Cak Nur tersebut memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya untuk senantiasa memelihara dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan keseharian. Cak Nur tidak hanya disebut sebagai cendekiawan muslim yang cerdas, tetapi pemberi inspirasi bagi bangsanya, karena itu gagasan-gagasannya sering kali mendahului zamannya. Pada tahun 1970-an, ketika semangat masyarakat berpartai menguforia, Cak Nur muncul dengan jargon "Islam Yes, Partai Islam No", dengan tujuan agar Islam terlepas dari klaim satu kelompok tertentu, dan menjadi milik bersama secara nasional. Akan tetapi justru pandangannya ini dianggap menyalahi pakem, sehingga Cak Nur dianggap mengembangkan sekularisme.[78]

Sekitar tahun 1980-an, Cak Nur juga mendorong adanya *check and balance,* khususnya terkait dengan bergulirnya ide oposisi loyal. Cak Nur adalah di antara sekian inteletual Muslim yang tidak mudah tergiur oleh iming-iming sesaat jika hal itu tidak dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Contoh yang dapat ditunjukkan adalah di saat Cak Nur menjadi pembuka jalan terwujudnya reformasi, dia menolak secara halus tawaran yang diberikan oleh Presiden Soeharto untuk duduk di Komite Reformasi (terjadi pada tahun 1998). Penolakan Cak Nur, nampaknya menjadi salah satu pemicu turunnya Soeharto dari takhta kepresidenan, sehingga rencana Soeharto untuk mempertahankan takhtanya berhasil kandas.

Kegelisahan Cak Nur sebagai cendekiawan, aktifis Muslim, dan pembaharu tidak pernah pupus, sehingga pada puncak intelektualitasnya Cak Nur terusik juga dengan situasi politik pasca reformasi yang tidak stabil. Situasi bangsa seperti ini kemudian mendorong Cak Nur menyatakan siap mengikuti pemilihan

---

Waljama'ah", dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan,* (Bandung: Mizan, 2015), Cet. II, 130.

[78] Jalaluddin Rakhmat, "*Nurcholish Menurut Tuparev*", dalam Sukandi A.K. (peny.), *Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 9.

presiden pada Pemilu 2004, dan lahirlah 10 program membangun Indonesia. Akan tetapi Cak Nur mengalami kegagalan untuk dapat melaju sebagai presiden RI. Walaupun demikian, pemikiran Cak Nur sebagai inspirasi generasi bangsa menjadi warisan berharga.[79] Pemikiran genuine Cak Nur yang hingga kini memiliki pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah perihal pandangannya yang meletakkan Pancasila dan Islam dapat saling bertemu dan saling menginspirasi untuk kemajuan bangsa. Hingga kini yang melekat dari sosok Cak Nur adalah sebutan tokoh pembaharu muslim yang moderat, pluralis dan inklusif.

Di dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, Cak Nur menawarkan gagasan pembaharuannya, tentang modernisasi. Bagi Cak Nur, modernisasi adalah produk perkembangan ilmu pengetahuan, dan Islam adalah agama yang sangat modern bahkan terlalu modern untuk zamannya, karena Islam adalah agama yang pada hakikatnya memiliki hubungan organik dengan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan kedudukan ilmu pengetahuan tersebut dalam kerangka keimanan.[80] Oleh karena itu, kaum muslimin mestinya yakin bahwa Islam bukan saja tidak menentang ilmu pengetahuan, tetapi justru menjadi pengembangannya dan tidak melihat perpisahan antara iman dan ilmu. Hal itu didasarkan kepada faktor historisitas Islam yang pernah mengalami kejayaan pada masa kekhalifahan hingga runtuhnya yang memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Dengan demikian, Cak Nur secara implisit ingin menyampaikan pesan moral, bahwa *pertama*, Pancasila dan Islam

---

[79] *"Biografi Nurcholish Madjid-Cendekiawan Muslim"*, dalam https://www.biografiku.com/biografi-nurcholish-madjid/, diakses tanggal 8 Agustus 2018.

[80] Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, (Jakarta: Paramadina,1992), Cet. 2, 590.

tidak akan pernah bertentangan, justru sebaliknya keduanya dapat saling bertemu dan saling mengisi. Islam dapat dijadikan inspirasi dalam mengartikulasikan nilai-nilai dari setiap sila yang ada dalam Pancasila secara bertanggung jawab dan konsekuen. *Kedua,* Pancasila dapat dijadikan ideologi terbuka dan dapat ditafsirkan sesuai dengan azas kemanfaatan dan kemaslahatan bangsa—walalaupun ide ini kemudian menimbulkan pro dan kontra—secara jujur dan bertanggungjawab, sehingga pesan-pesan moral Pancasila dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap masyarakat Indonesia. *Ketiga,* pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila secara baik, itu sama saja dengan pengamalan ajaran Islam juga, sebab mulai dari sila pertama yang mengandung ajaran tauhid, pada sila berikutnya merupakan pengejawantahan dari sila pertama, yaitu berbuat rasa kamanusiaan, adil, beradab, persatuan, kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, semuanya tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadis). *Keempat,* jika Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* tidak dilaksanakan secara baik dalam kehidupan kebangsaan, maka dikhuwatirkan upaya yang mengarah pada delegitimasi dan de-ideologisasi Pancasila akan semakin memberikan dampak terhadap disharmoni dan disstabilasasi dalam berbagai hal.

Hal yang tidak dapat dilupakan adalah, bahwa masyarakat Indonesia memiliki ciri masyarakat yang plural dan multikultural (bhinneka). Sedangkan kebhinnekaan itu sendiri merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari atau dinafikan. Justru sebaliknya kebhinnekaan itu akan menjadi kekuatan dahsyat jika dapat dikelola dengan baik. Di antara alat kelola yang dianggap efektif hingga saat ini adalah ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia.

B. IMPLIKASI DARI PANDANGAN TOKOH MUSLIM INDONESIA TENTANG HUBUNGAN PANCASILA DAN ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN KEBANGSAAN

Dalam kajian sejarah menyangkut tokoh –apakah seorang ulama/kyai (*mujtahid*), pemimpin, intelektual/cendekiawan, aktifis, pembaharu (*mujaddid*), dan lain-lain– selalu saja tidak dapat dilepaskan dari situasi (konteks) yang melingkupinya. Sebab seorang tokoh itu lahir dari proses sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, mereka akan selalu menjadi orang pertama yang tampil dalam melihat, mengkritisi, dan juga memberikan solusi atas berbagai problem yang dihadapi oleh sekelilingnya. Hal itu sejalan dengan karakter utama yang dimilikinya, yaitu selalu tampil dalam berbagai kesempatan untuk merespon berbagai isu dan problem yang dihadapinya. Karakter lain yang dimiliki seorang intelektual adalah peran pentingnya dalam proses pemberdayaan umat dan negara. Di negara maju, peran intelektual/cendekiawan –menurut A.S. Hikam– dianggap sangat signifikan dalam mewarnai kebijakan-kebijakan publik, sehingga menjadi rujukan bagi pembentukan *civil society* secara mandiri.[81]

Keempat tokoh Nasional –K.H. Achmad Siddiq, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Dr. Harun Nasution, dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid– merupkan tokoh Muslim yang memiliki pengaruh penting dalam pergulatan pemikiran Islam di Indonesia dan kaitannya dengan perkembangan isu-isu nasional dan global. Mereka banyak menginspirasi pemikiran para generasi berikutnya. Jika dilihat dari *background* sosial historisnya, para intelektual muslim tersebut berangkat dari basis keilmuan dan lingkungan sosial yang berbeda. Kyai Siddiq dan Gus Dur dapat dikatakan sebagai dua orang yang memiliki karakter sama karena keduanya sama-sama lahir dan besar dari lingkungan pesantren dan –secara genealogis kekerabatan– merupakan putra-putra dari ulama besar Indonesia, yaitu Kyai Siddiq putra Kyai Muhammad Siddiq dan Gus Dur adalah putra K.H. Wahid Hasyim, di mana

[81] Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), 196; Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 171; dan Mujamil, *NU "Liberal"*, 263.

keduanya adalah tokoh yang membidani lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU (Nahdlatul Ulama), juga pejuang nasional dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang membedakan di antara keduanya adalah jika Kyai Siddiq intelektualitasnya dibentuk hanya dari pendidikan di lingkungan pesantren dan hampir tidak pernah mengenyam pendidikan formal secara mapan, apalagi di tingkat perguruan tinggi, namun dapat mengantarkannya sebagai ulama intelektual dan intelektual ulama yang mumpuni. Sementara Gus Dur perjalanan intelektualnya tidak hanya dibentuk oleh pesantren, namun juga pendidikan formal bahkan pendidikan Barat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan darinya.

Sedangkan dua tokoh Muslim berikutnya adalah Harun Nasution dan Nurcholish Madjid (Cak Nur). Keduaya juga memiliki *background* pengalaman keluarga dan pendidikan yang hampir sama namun ada perbedaan-perbedaan. Harun Nasution –sebagaimana disebutkan sebelumnya– berangkat dari keluarga yang berkecukupan dan juga keluarga tokoh agama yang disegani. Sementara Cak Nur juga demikian, yaitu lahir dari keluarga pesantren dan putra seorang ulama yang disegani di Jombang. Yang membedakan antara keduaya adalah kultur sosial dan tradisi yang melingkupinya. Harun putra asli dari Sumatra Barat, dan Cak Nur merupakan putra kelahiran Jombang Jawa Timur, yang secara kultur sosial dan tradisi berbeda, berpengaruh pada pembentukan karakter masing-masing, walaupun dalam perjalanan intelektalnya sama-sama kritis dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Menarik memang mengkaji keempat tokoh dengan latar belakang yang berbeda tersebut. Menariknya terletak pada dinamika pemikirannya yang kemudian juga membawa pengaruh/implikasi signifikan dalam pergerakan pemikiran Islam di Indonesia. Jika Kyai Siddiq dan Gus Dur memiliki basis yang sama, yaitu pesantren dan Nahdliyyin (NU). Sementara

Harun dan Cak Nur basisnya terletak pada kaum akademisi di kampus. Dalam konteks inilah yang kemudian akan mewarnai model, corak, dan pendekatan dalam dinamika pemikiran Islam Indonesia dan kaitannnya dengan persoalan-persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan, keberagaman, keberagamaan, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Hal demikian juga membawa implikasi bahwa Kyai Siddiq dan Gus Dur akan lebih mudah mengembangkan ide-ide cerdasnya melalui pesantren dan NU yang dipimpinnya. Sementara Harun dan Cak Nur akan lebih mudah mengembangkan pemikiran-pemikirannya melalui masyarakat akdemis di kampus. Keempat tokoh dengan kultur yang berbeda-beda tersebut justru menjadi kekuatan tersendiri dalam mengisi kebutuhan bangsa ke depan. Inilah yang kemudian dapat mengisi ruang pablik secara bebas (*free public spere*) dalam penyelesaian berbagai problem kebangsaan yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan, karena adanya penguatan dari para tokoh yang kemudian membawa pengaruh siginifikan terhadap penguatan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum dapat dideskripsikan beberapa poin penting tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemikiran/pandangan keempat tokoh muslim mengenai hubungan Islam dan Pancasila dalam sistem kebangsaan di Indonesia. Dalam kaitan ini, dari empat tokoh muslim tersebut, penulis dapat membagi dua varian pemikiran, yaitu varian ulama intelektual dan varian cendekiawan muslim.

Varian pertama, adalah kelompok pesantren.Kyai Siddiq dan Gus Dur adalah dua tokoh pesantren dan NU. Keduanya adalah tokoh ulama yang sangat disegani dan dihormati oleh kalangan pesantren dan Nahdliyyin hingga saat ini, tidak hanya karena kharisma leluhurnya yang merupakan ulama, tokoh terkemuka dan pendiri NU, namun juga karena intelektualitas dan kepiawaiannya dalam mengartikulasikan ajaran Islam dalam kehidupan lebih empiris, seperti dalam menghadapi isu-isu sosial, politik, demokrasi, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain.

Di samping pesona pribadi sebagai seorang kyai yang selalu tampil santun, jujur, komunikatif, dan akomodatif terhadap segala perbedaan, menjadi instrument efektif dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat secara mudah.

Kyai Siddiq dianggap sebagai ulama NU yang memiliki pandangan kemodernan dan tampilan keulamaannya yang progresif, khususnya terkait dengan perubahan yang dilakukannya, yaitu merubah tatanan tradisi yang selama ini berjalan di pesantren yang cenderung statis dan kurang kritis. Misalnya tradisi yang berkembang di pesantren adalah budaya kritis terhadap apa yang disampaikan gurunya tentang berbagai persoalan, santri tidak berani atau takut mengutarakan/bertanya sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan nuraninya, sehingga santri diam dan mengikuti saja apa yang didawuhkan oleh kyainya tersebut. Hal ini terjadi karena sikap *sami'na wa atha'na* yang tertanam di benak santri menjadi sebuah keharusan. Sikap kritis terhadap guru juga dianggap sebagai tindakan yang tidak etis, bahkan bisa menghilangkan berkah. Oleh Kyai Siddiq tradisi tersebut dihilangkan secara perlahan dengan menghidupkan budaya kritis dan tidak feodal di lingkungan pesantren yang dipimpinnya. Santri diberi kebebasan dalam menanyakan berbagai hal secara kritis terhadap kyai dan guru-guru di pesantren. Tindakan Kyai Siddiq tersebut membawa implikasi signifikan terhadap perkembangan keilmuan di pesantren, dan lambat tapi pasti tradisi kritis gayung bersambut berjalan dengan baik hingga kini. Memang ada anggapan bahwa tradisi tidak kritis dan feodal tersebut sebagai akibat dari diajarkannya kitab *Ta'lim al-Muta'allim* di pesanren-pesanren tentang proses pembelajaran yang tidak kritis, sehingga dapat mempengaruhi hubungan santri dan guru yang monoton di dalam proses belajar mengajar, bahkan jika ada santri yang bertanya kepada kyainya dianggap sesuatu yang tabu.[82]

---

[82] Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 175-176.

Gagasan fenomenal Kyai Siddiq yang hingga kini masih dirasakan pengaruhnya dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah tentang penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan merupakan keputusan final bagi seluruh bangsa Indonesia. Menurut Kyai Siddiq, Pancasila tidak perlu lagi dipertentangkan dengan Islam.[83] Kyai Siddiq menyampaikan pernyataan tersebut sekitar tahun 1980-an di saat seluruh organisasi Islam dan partai politik lainnya tidak/belum berani mengeluarkan keputusan tersebut, akan tetapi NU melalui Kyai Siddiq sudah berani mengeluarkan keputusan progresif terkait dengan eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan satu-satunya azas dalam berorganisasi, sehingga untuk masa-masa selanjutnya diikuti oleh berbagai organisasi massa dan politik di Indonesia. Pernyataan Kyai Siddiq dalam perkembangan selanjutnya membawa implikasi signifikan dalam membangun tata kenegaraan secara baik dan mapan.[84] Implikasi selanjutnya dari keputusan Kyai Siddiq tersebut adalah bahwa NU semakin menunjukkan keberpihakannya terhadap keberadaan Pancasila sebagai ideologi, bahkan di saat Pancasila dirongrong oleh sekelompok/sebagian orang, NU dengan seluruh badan otonom yang ada selalu siap siaga dan tampil terdepan dalam mengawal Pancasila. Kelompok yang sangat getol ingin mengganti ideologi Pancasila adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah Joko Widodo di tahun 2017.

Keputusan Kyai Siddiq yang kemudian diikuti oleh seluruh warga NU tersebut semakin mendapatkan legitimasinya di kalangan NU, di saat berduet dengan Gus Dur dalam memimpin NU —Kyai Siddiq sebagai Ra'is 'Am dan Gus Dur sebagai ketua Tanfidziyahnya— hingga dua periode. Gus Dur -jika dilihat usianya— walaupun lebih muda dari Kyai Siddiq, namun Gus

[83] Anwar Hudijono, "*.K.H. Achmad Siddiq: Akar Menghujam-Batang Menjulang*", dalam *Harian Surya*, 25 Januari 1991.
[84] *Ibid.*, 172-173.

Dur dapat mengikuti pemikiran dan langkah-langkah seniornya tersebut. Demikian juga Kyai Siddiq dapat mengikuti pemikiran-pemikiran progressif Gus Dur, yang seringkali melompat-lompat, sehingga banyak yang tidak dapat mengikutinya. Sementara Kyai Siddiq sebagai orang yang lebih tua justru cocok dengan gagasan-gagasan yuniornya tersebut. Keduanya tampak seperti dua sisi mata uang yang saling mengisi keberadaannya. Lebih-lebih pandanganya menyangkut Pancasila sebagai ideologi untuk NKRI.

Berbeda dengan Kyai Siddiq, Gus Dur yang memiliki *background* dua lingkungan pendidikan (pesanren dan Barat), ditopang dengan kecerdasan, bahan bacaan, dan pergaulannya dengan berbagai tokoh dunia, menjadikannya sebagai tidak hanya intelektual/ cendekiawan, namun juga sebagai ulama mumpuni dan disebut juga sebagai budayawan Indonesia yang disegani. Lompatan-lompatan pemikirannya juga seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan pemikiran *nyelenehnya* (bukan seperti lazimnya) tersebut menjadi inspirasi bahkan idola oleh kaum muda Nahdliyyin, sehingga kini pun muncul kelompok yang mengatasnakaman "Gusdurian". Kelompok inilah yang kemudian melestarikan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran Gus Dur, khususnya pandangan-pandangan Gus Dur menyangkut demokrasi dan pluralisme. Mujamil menyebut Gus Dur sebagai cendekiawan NU yang memiliki pemikiran paling menonjol dalam mengembangkan wawasan di kalangan NU. Syafi'i Anwar seperti dikutip Mujamil juga mengatakan, Gus Dur berhasil mendorong dan mengkondisikan *the emerging intellectual* di kalangan muda NU, karena pemikiran-pemikirannya yang liberal-progresif.[85]

Pada masa awal-awal pemikiran Gus Dur, memang di kalangan NU pada saat itu tidak semuanya dapat mengikutinya.

---

[85] Mujamil, *NU "Liberal"*, 264.

Sebab di kalangan NU sendiri terdapat beragam level pemikiran, mulai dari tingkat pemikirannya yang masih di bawah rata-rata (sempit), hingga pemikiran yang sudah di atas rata-rata, sehingga tingkat pemahaman terhadap setiap yang dimunculkan Gus Dur terjadi konflik/perdebatan yang hangat, bahkan di antara tokoh-tokoh NU sekalipun.[86] Akan tetapi berselang selama kurang lebih 40 tahunan jika dihitung sejak Gus Dur mengeluarkan gagasan-gagasannya yang kontroversial di tahun 1980-an tersebut, justru saat ini terjadi sebaliknya, yaitu tumbuhnya pemikiran progresif di kalangan generasi Muda NU. Implikasi pemikiran Gus Dur secara umum membawa dampak positif bagi pengembangan dan dinamika pemikiran di kalangan generasi muda NU.Bahkan tidak jarang generasi muda NU yang memiliki pemikiran liberal pun dianggap sebagai metamorfosis dari pemikiran Gus Dur tersebut. Dalam konteks inilah labelitas sebagai pemikir liberal-progresif tidak hanya disematkan kepada Gus Dur tapi juga ke pengikut Gus Dur (Gusdurian).

Demikian juga pemikiran Gus Dur menyangkut hubungan agama-negara, khususnya dalam konteks Indonesia, yaitu hubungan Pancasila dan Islam, seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa hubungan dialektis tersebut sudah selesai, dan tidak ada yang perlu diperdebatkan kembali tentang posisi Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pemikiran Gus Dur tersebut tentu membawa implikasi mendasar bagi pengembangan konsep kenegaraan dalam umat yang beragam dan beragama di Indonesia. Gusdurian yang tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air mengembangkan ide-ide progresif Gus Dur dengan tetap mengikuti ijtihad para pendahulunya –termasuk Kyai Siddiq dan Gus Dur— bahwa Pancasila adalah merupakan keputusan final para *founding fathers*, yang tidak perlu diutak-atik kembali.[87]

---

[86] *Ibid.*, 265.

[87] Dalam konyeks itulah, Gus Dur selalu konsisten untuk tidak sepakat bagi pihak-

Oleh karena itu, konsekuensi dari pandangan yang mengikat bagi seluruh bangsa tersebut,. seakan memunculkan konsensus bersama yang menyatakan, jika ada pihak/sekelompok/siapa pun yang berusaha merongrong atau berupaya mende-idelogisasikan Pancasila dalam kehidupan kebangsaan, maka harus ditolak dan dilawan. Respon seperti ini ternyata menyeruak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Walaupun Gus Dur sudah tiada untuk selamanya, namun prisma pemikiran-pemikirannya menjadi bahan yang tidak pernah habis untuk didiskusikan, dan menjadi inspirasi generasi berikutnya demi membangun bangsa yang plural dan multikultural ini.

*Varian Kedua,*adalah kelompok akademisi (kampus).Harun Nasution (Harun) dan Nurcholish Madjid (Cak Nur) merupakan akademisi kampus yang memiliki pengaruh besar hampir di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).Pengaruh keduanya sangat membekas di hati para mahasiswanya, apalagi ketika telah menjadi alumni. Tidak sedikit mahasiswa bimbingannya saat menjadi menjadi pelopor pembaruan pemikiran Islam di kampus masing-masing. Hal demikian tidak heran, karena pada saat tahun 1980-an jumlah program Pascasarjana tidak sebanyak saat ini, yang ketika itu hanya ada di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alaudin Makasar, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian yang menjadi direktur Pascasarjananya adalah Harun Nasution, dan Cak Nur menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi Islam tersebut. Para mahasiswanya tentu akan bersentuhan langsung dengan pemikiran kedua tokoh cendekiawan muslim tersebut. Gagasan-gagasan keduanya telah

---

pihak tertentu yang berkeinginan menjadikan Indonseia sebagai Negara Islam (*dar al-Islam*), dan Gus Dur secara tegas menolaknya. Lihat Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia,* (Jakarta: The Wahid Institut dan Ma'arif Institut, 2009).

mewarnai kajian pemikiran Islam di Indonsia. Dapat diperkirakan bahwa jika saat ini sudah terdapat berbagai program Pascasarjana di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya PTKIN semata zrsebut. Jika tidak secara langsung bertemu dengan kedua cendekiawan itu, pada dasarnya secara tidak langsung kondisi tersebut merupakan kontinyuitas dari keduanya. Sebab keduanya telah berhasil memberikan dasar-dasar epistemologi pemikiran Islam secara universal dan rasional melalui buku-buku yang ditulis oleh keduanya, dan menjadi bahan rujukan di hampir seluruh PTKI, khususnya pada program Pacasarjana di seluruh Indonesia.

Pengaruh Harun yang hingga kini masih dirasakan oleh akademisi kampus keagamaan Islam di Indonesia adalah masih digunakannya buku wajib untuk pembahasan dalam mata kuliah ilmu kalam/teologi Islam. Buku yang hampir selalu dipakai dalam setiap perkuliahan menyangkut teologi Islam adalah buku yang ditulis oleh Harun Nasution tentang *"Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan"*.[88] Buku karya Harun ini tidak hanya dimiliki oleh mahasiswa, bahkan menjadi pegangan dan rujukan para dosen pemikiran Islam dan para penulis lainnya jika membahas seputar teologi Islam. Demikian juga buku Harun yang berjudul *"Filsafat dan Mistisisme dalam Islam"*,[89] menjadi buku pegangan kampus keagamaan Islam untuk mata kuliah akhlaq-tasawuf. Kedua karya harun tersebut seakan menjadi rujukan idola bagi semua mahasiswa dan dosen PTKI yang menekuni di bidang pemikiran Islam, walaupun dua buku tersebut sudah tidak dicetak lagi. Ada satu lagi karya Harun yang pada dekade tahun 1980/1990-an menjadi rujukan studi Islam di sejumlah PTKI, yaitu *"Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1-2"*.[90] Melalui karya-

---

[88] Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), Cet. 5.

[89] Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

[90] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1-2*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), Cet. 1.

karyanya itu kemudian Harun memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir mahasiswa, yang menekankan pendekatan sejarah dan rasional, sehingga dapat dilanjutkan oleh para alumninya yang telah tersebar ke berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Harun Nasution yang memiliki pandangan bahwa Pancasila secara substantif mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sebaliknya dapat saling mengisi, adalah menjadi landasan normatif dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. Jika dilihat dari setiap butir yang terdapat pada Pancasila –mulai dari **sila pertama**, *Ketuhanan Yang Maha Esa;* **sila kedua**, *Kemanusiaan yang adil dan beradap;* **ketiga**, *persatuan Indonesia;* **keempat**, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan* **kelima**, *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* — yang pilih para *founding fathers* sebagai dieologi dan *common platform* untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia, maka sudah tepat, dan tidak perlu diutak-atik kembali, karena keputusan inilah yang dianggap sebagai keputusan final dan memberikan manfaat besar dalam membangun harmoni di tengah kehidupan bangsa yang sangat plural di Indonesia. Oleh karena itu, Harun selalu menekankan pentingnya menjaga dan melaksanakan nilai-nilia Pancasila tersebut secara bertanggungjawab dan konsekuen.

Konsepsi Harun perihal hubungan Pancasila dan Islam tersebut, dalam perjalanan selanjutnya membawa implikasi kepada pandangan tentang pentingnya merawat, memahami, dan mengimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan hingga kapan pun. Pandangan tersebut juga membawa implikasi terhadap keberadaan kampus-kampus yang tidak sejalan dengan misi negara yang harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Jika hal ini dikaitkan dengan fenomena mutakhir, di mana disinyalir ada beberapa kampus yang berupaya untuk mereduksi bahkan mendelegitimasi dan mende-idelogisasi Pancasila dengan ingin

mengganti sistem *khilafah*. Bahkan menurut beberapa laporan penelitian, ada beberapa kampus yang terindikasi memfasilitasi munculnya faham radikal,[91] sebagai embrio munculnya gerakan politik kampus yang dibungkus dengan gerakan dakwah kampus –melalui organisasi mahasiswa seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK)– untuk mengganti sistem demokrasi Pancasila dengan *khilafah*. Oleh karena itu, konsepsi Harun sangat relevan dan dapat menjadi dasar pemikiran terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Karena sistem *khilafah* baik secara historis maupun teologis, di samping tidak ditemukannya dalam Islam, juga dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan kebangsaan yang sudah baik selama ini, bahkan dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI.

Hal sama dilakukan Cak Nur sebagaimana yang dilakukan Harun –namun berbeda pada cara– dalam rangka membentengi de-ideologisasi Pancasila adalah dengan terus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada semua anak bangsa. Karena menurut Cak Nur –seperti dijelaskan di atas–Pancasila merupakan *kalimatun sawa' (common platform)* dalam ajaran Islam. Jika dilihat kandungan yang ada dalam setiap sila Pancasila tersebut, maka nilai-nilai yang tersurat dan tersirat di dalamnya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan dengan agama-agama lain di Indonesia. Oleh karena itu, keputusan para pendiri bangsa ini dianggap Cak Nur sudah tepat, dan Pancasila inilah yang cocok sebagai landasan dalam berkebangsaan di Indonesia. Cak Nur memang

[91] Seperti yang dilapporkan Saifudin dalam penelitiannya –seperti dikutip M. Rois Abin– di Jurnal Analisis, vol. XI, no. 1 (2011), menyebutkan bahwa gerakan radikalisme telah menjangkiti kampus-kampus ternama, misalnya di UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta, UI (Universitas Indonesia) Jakarta, IPB (Institut Pertanian Bogor) Bogor, UNAIR (universitas Airlangga) Surabaya, dan UNDIP (Universitas Diponegoro) Semarang. Baca M. Rois Abin, *"Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi Islam Berbasis Nilai-nilai Multikultural"*, dalam Muhammad Aziz Hakim, dkk.,*Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), 26.

pernah melontarkan gagasan kontroversialnya di tahun 60-an menyangkut Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya, terbuka untuk seluruh bangsa yang dapat menafsirkan dan memahaminya sesuai dengan ajaran dasar yang ada di dalam Pancasila, dengan tidak keluar dari maksud sila-sila dalam Pancasila, sehingga Pancasila dapat berdialog dengan zamannya hingga kapanpun, dan tidak tergerus oleh zaman. Pandangan inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia waktu itu, khususnya protes paling keras adalah dari pihak pemerintah karena pada saat itu masyarakat Indonesia berada pada tekanan sebuah rezim Orde Baru, yang juga menganggap bahwa yang berhak memberikan tafsir tunggal (mono tafsir) terhadap Pancasila adalah pemerintah.[92]

Implikasi dari pandangan Cak Nur tersebut adalah munculnya pemahaman bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang suci dan sakral yang tidak dapat ditafsiri ulang sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi dalam konteks saat ini yang sangat modern, sehingga diperlukan tafsir kontekstual terhadap Pancasila. Pancasila akan selalu *update* dan *in-context* dengan situasi zamannya jika dipahami secara baik dan tepat oleh warganya. Untuk selanjutnya nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Pandangan Cak Nur tentang pentingnya "Pancasila sebagai ideologi terbuka" tersebut sangat relevan di saat adanya perasaan lega karena telah keluar dari tekanan rezim Orde Baru yang luar biasa dan masuk ke sebuah masa reformasi, seakan seluruh rakyat Indonesia keluar dari sarang harimau yang sewaktu-waktu bisa menerkamnya. Konsekuensinya adalah bahwa seluruh komponen masyarakat dapat menafsirkan Pancasila sesuai dengan konteks zamannya dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri.

---

[92] Lihat kembali pada Rachman, "*Ensiklopedi Nurcholish Madjid*", h. 2298; Na'im, "Islam dan Pancasila", 441-442.

Pandangan lain dari Cak Nur yang hingga kini dapat dirasakan pengaruhnya adalah tentang "Islam Yes, Partai Islam No". Pandangan Cak Nur yang dilontarkan di tahun 1980-an tersebut memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Sebab ide Cak Nur tersebut kemudian dicurigai sebagai upaya sekularisasi. Padahal tujuan Cak Nur adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa Islam adalah rumah bersama secara nasional, bukan klaim sepihak dan pribadi. Ide Cak Nur tersebut dalam konteks saat ini ternyata dapat dirasakan, bahwa munculnya klaim-klaim kebenaran sepihak dengan tidak mengakui keberadaan pihak lain (*the others*), adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Klaim ini muncul sebagai konsekuensi dari eksklusivitas dan ekstrimitas pandangan dan tindakan yang dilakukannya. Inilah yang menjadi biang kerok disintegrasi bangsa dan disharmoni yang terus menjangkiti rasa keberagamaan dan nasionalisme yang dibangun selama sekian lama.

Dalam konteks ini, Cak Nur sebenarnya dapat memprediksi bahwa akan muncul problem keberagamaan dan nasionalisme di tengah masyarakat yang beragam dan multikultural ini. Oleh karena itu, Cak Nur seakan ingin mengatakan bahwa janganlah menjadi bagian dari masyarakat yang tidak pandai menghargai dan menghormati di tengah masyarakat yang beragam, karena keberagaman itu memang sengaja diciptakan oleh Allah SWT sebagai media untuk saling berlomba menjadi yang terbaik di hadapanNya dan di hadapan umat manusia. Pemahaman Pancasila secara benar dan bertanggungjawab adalah instrument penting dalam menangkal adanya radikalisasi dan de-ideologisasi Pancasila di Indonesia.

Pandangan responsif, antisipatif, dan futuristik dari keempat tokoh Muslim tersebut jika dikaitkan dengan upaya deideologisasi Pancasila dalam konteks saat ini –khususnya oleh HTI dan afiliasinya– sangat relevan. Hal ini paling tidak dapat dilihat pada

beberapa perspektif baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. *Pertama,* problem yang muncul saat itu adalah menyangkut kegelisahan umat terhadap sebuah rezim (Orde Baru) yang sangat otoriter, sehingga keresahan tersebut muncul sebagai akibat dari ketakutan atas tekanan dan intimidasi yang selama itu terjadi bagi siapapun yang tidak mengikuti keputusan pemerintah. Hal ini terjadi mengingat kediktatoran rezim Orde Baru telah menjadi momok bagaikan hantu di siang bolong di mana warga bangsa menjadi takut karena adanya intimidasi dalam setiap keputusan yang tidak ditaati dan tidak dilaksanakan oleh masyarakat.

Kedua, Pancasila pada saat rezim Orde Baru seakan diterjemahkan dan ditafsiri sepihak oleh pemerintah, sehingga apapun penafsiran yang datang dari luar pemerintah dan berbeda dengannya, dianggap sebagai pembangkangan dan harus diambil tindakan tegas karena dianggap mengganggu stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Ketiga,* munculnya berbagai macam organisasi sosial-keagamaan –yang disinyalir trans nasional (organisasi import)– di Indonesia pada era-reformasi (pasca Orde Baru) yang tidak sejalan bahkan seringkali melalukan tindakan distortif terhadap konsep demokrasi Pancasila di Indonesia merupakan benalu dan bahkan ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Organisasi yang mengklaim diri sebagai organisasi keagamaan dan paling getol hingga saat ini untuk melakukan tindakan makar terhadap Pancasila adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin menggantinya dengan sistem *khilafah,* yang sangat kontras dan bertentangan dengan Pancasila dan *uncontext* dengan kultur Indonesia.

Keempat, munculnya problem yang melanda di sebagian besar dunia –khususnya dunia Islam– menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia atas problem-problem yang dihadapinya sebagai konsekuensi dari tiadanya pemahaman komprehensip terhadap pemaknaan hubungan agama dan

negara seiring dengan situasi yang semakin disruptif, sehingga yang terjadi adalah disstabilitas dan disharmoni. Sebagai akibatnya adalah munculnya kekacauan dan kekerasan di mana-mana. *Kelima,* Pancasila di Indonesia dalam situasi global seperti ini seakan menunjukkan eksistensinya yang sejalan dan bisa bersinggungan dengan segala situasi yang dihadapi bangsanya. Hal ini telah dibuktikan malalui dinamika sejarah panjangnya di tengah masyarakat yang sangat plural dan multikultural, Pancasila mampu beradaptasi, berdialog, dan berdealektika dengan zaman yang sedemikian disruptif, sehingga Indonesia tetap bisa *survive* di tengah terpaan problem-problem mondial.

Keenam, ijtihad para ulama dan *founding father* (pendiri bangsa) ini —termasuk *ijtihad*keempat tokoh muslim tersebut— perihal penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* menjadi pelajaran berharga dalam menata dan merawat keberagamaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah pluralitas (kebhinnekaan) dan multikulturalitas Indonesia. *Ketujuh,* para ulama Indonesia mampu menerjemahkan teks-teks agama ke dalam konteks Indonesia, sehingga ajaran dan prinsip-prinsip Islam senantiasa dapat bersinggungan dengan negara. Beragama dimaknai sebagai pesan substantif bukan sebagai simbol dan legal-formalnya semata. Yang jauh lebih penting dari itu adalah pesan moral dalam ajaran dan prinsip Islam itu sendiri, sehingga Islam selalu membumi di bumi Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan pengejawantahan dari pemahaman nilai-nilai dan prinsip Islam tersebut. Dengan demikian, upaya delegitimasi dan de-ideologisasi Pancasila sampai kapan pun dalam perpsektif keempat tokoh muslim tersebut, adalah bukan hanya sebagai upaya pengkhianatan terhadap bangsa, tapi juga mengandung makar (*bughat*) terhadap kesepakatan para ulama, *founding fathers,* dan bangsa Indonesia itu sendiri.

BAB V
PENUTUP

Bab lima ini merupakan bab terakhir dari keempat bab yang telah dielaborasi sebelumnya. Oleh karena itu, pada bab ini akan disampaikan dua sub bab, yaitu kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi.

A. KESIMPULAN

Berdasar pada focus masalah yang disajikan pada bab satu, dan uraian pada bab dua hingga bab empat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Keempat tokoh muslim Indonesia -K.H. Achmad Siddiq, K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr.Harun Nasution, dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid— memiliki pandangan yang hamper sama dalam mendudukkan Pancasila*vis a vis* Islam. Pancasila dan Islam tidak dapat dipertentangkan atau dihadap-hadapkan satu sama lain, sebab kemunculannya berdasarkan pada situasi psikologis, teologis, historis, dan juga sosio-kultural bangsa Indonesia yang sangat beragam, tidak hanya etnis, suku, agama, kepercayaan, namun juga faham, budaya, dan bahasa. *Ijtihad* para *founding fathers* (pendiri bangsa) sudah didasarkan pada pertimbangan matang, sehingga Pancasila dipilih dan diputuskan bersama sebagai ideologi dan *common platform*

dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila tidak perlu diutak-atik kembali untuk diganti atau dirubah dengan ideology lainnya yang belum tentu sesuai dan cocok dengan aspek-aspek psikologis, historis, sosio-kultur bangsa Indonesia yang beragam (*bhinneka*) ini. Keputusan final ini merupakan consensus bersama yang wajib diikuti dan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan konsekuen.

2. Pandangan keempat tokoh tersebut member pengaruh/ implikasi kuat dalam mengatur tata kehidupan kebangsaan untuk masa-masa selanjutnya. Di mana Pancasila harus dijadikan spirit untuk memajukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju, beradab, makmur, adil, dan sejahtera. Implikasi mendasar dari pandangan keempat tokoh muslim tersebut saat ini adalah menjadi inspirasi berharga dalam mengawal dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan di saat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, khususnya menyangkut kesungguhan di dalam berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Pancasila, sebab di pihak lain ada upaya yang ingin berusaha melakukan deideologisasi Pancasila untuk digantikan dengan ideologi lain yang belum tentu cocok dengan kultur-sosial bangsa Indonesia. Oleh karena itu, implikasi yang muncul selanjutnya dari pandangan keempat tokoh muslim tersebut adalah adanya pemahaman di kalangan generasi berikutnya tentang *urgent*-nya menjaga dan membentengi Pancasila dari upaya-upaya de-idelogisasi dan de-legitimasi Pancasila tersebut.

B. REKOMENDASI

1. Bagi pemerintah. *Mindset* pemerintah–dalam konteks saat ini– harus dirubah dengan mengambil ide para tokoh pendiri bangsa yang mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok/

golongan. Sebab sumpah para pemimpin negeri ini adalah merupakan janji mengikat yang tidak boleh dikhianati, bahkan pertanggngjawabannya yang paling otentik adalah di hadapan Tuhan. Jika yang demikian dilaksanakan secara bertanggung jawab dan konsekuen, maka Pancasila terbukti telah diamalkan secara baik dan benar. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila oleh pemerintah adalah dengan berlaku adil untuk semua masyarakat, tidak berbuat koruptif, manipulatif, nepotif, dan lain-lain yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini wajib dilakukan oleh semua pemimpin negeri ini mulai dari tingkat yang paling atas hingga paling bawah. Di samping itu, pemerintah agar dapat merumuskan strategi pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila secara tepat dan tidak bersifat indoktrinasi -seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru—, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diejawantahkan di tengah masyarakat secara baik dan benar.

2. Bagi masyarakat umum. Pancasila hendaknya senantiasa dijadikan spirit dalam membangun kehidupan dan persahabatan di tengah masyarakat yang beragam (*bhinneka*) ini dengan tetap mengedepankan saling menghormati dan saling menghargai, sehingga problem-problem yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara baik.
3. Bagi akademisi/peneliti berikutnya. Kajian ini merupakan satu kajian yang barangkali belum sepenuhnya mewakili dari sekian pandangan tokoh muslim di Indonesia yang memiliki pandangan sama dengan keempat tokoh muslim yang disebutkan di depan. Akan tetapi masih banyak tokoh muslim Indonesia yang memiliki pandangan yang mungkin sama yang perlu digali dan dieksplorasi secara lebih mendalam, sehingga dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk menjadi bahan dalam memperkokoh pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideology bangsa yang tak tergoyahkan dan

tidak bertentangan dengan agama, sehingga semakin kuat dalam membangun jalinan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan penelitian lebih lanjut, tentunya dalam perspektif yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussami, Humaidy dan Ridwan Fakla AS.(ed.), *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama`*, Yogyakarta: LTn-NU dan Pustaka Pelajar, 1995, Cet. I.

Abin, M. Rois, "*Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi Islam Berbasis Nilai-nilai Multikultural*", dalam Saiful Musthofa (peny.) *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.

Aceh, Aboe Bakar, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum K.H. A. Wahid Hasyim, 1957.

Achmad, Hamid, *Uswatun Hasanah (Biografi Keteladanan Kiai Hamid)*, Pasuruan: Yayasan Ma'had as-Salafiyah, 2001, Cet. 3.

Adnan, M. Mas'ud (*ed.*), *Presiden Dur yang Gus Itu*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Afandi, Agus, "*Melihat Sisi Kelompok Keagamaan di Perguruan Tinggi Umum*", dalam *Paramedia*, Volume 1, No. 2 (Juli 2000).

Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Albatawi, K.H. Syaikh Sa'adih & Nandang Najmulmunir, *Islam & Restorasi Pancasila*,Bekasi: Universitas Islam "45" Bekasi, 2016.

Ali, Mohammad Daud, "*Fenomena Sempalan Keagamaan di PTU: Sebuah Tantangan bagi Pendidikan Agama Islam*", dalam *Dinamika*

Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi; Wacana tentang Pendidikan Agama Islam, Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (Ed.), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Asyari, H., Dkk., *Pengantar Studi Islam,* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005.

Azra, Azyumardi, "*Kelompok Sempalan di Kalangan Mahasiswa PTU: Anatomi Sosio-Historis*", dalam *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi; Wacana tentang Pendidikan Agama Islam,* Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (Ed.), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bahar, Safroedin dan Nani Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

Baidhawy, Zakiyuddin, "*Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara*", dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid dkk.,*Fikih Kebinnekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim,* Bandung: Maarif Institut-Mizan, 2015, 131.

Bakar,Abu & Istianah,*Sejarah Peradaban Islam,* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid,* Yogyakarta: LKiS, 2010, Cet. IX.

"*Biografi Nurcholish Madjid-Cendekiawan Muslim*", dalam https://www.biografiku.com/biografi-nurcholish-madjid/, diakses tanggal 8 Agustus 2018.

Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,*Yogyakarta: LKiS, 1994.

Damami, M. dkk., "*H. A. Mukti Ali: Ketaatan, Kesalehan dan Kecendekiaan*" dalam Abdurrahman (et. al.), *Agama dan Masyarakat,* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.

Dewi, Varnita, "*Hubungan Antara Islam dan Pancasila*", dalam *Tugas Makalah yang disampaikan pada Mata Kuliah Pengantar Pancasila,*

Aceh: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2014.

Dhofier, Zamakhsyari, *"K.H. Hasyim Asy'ari: Penggalang Islam Tradisional"*, Yanto Bashri & Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, Yogyakarta: LKiS, 2009, Cet. II

Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS, 2009) Cet. IV.

Gaus, Ahmad AF, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*, Jakarta: Kompas, 2010.

Ghazali, Abdul Moqsith, *"Metodologi Islam Nusantara"*, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2015, Cet. II.

Hamim, Thoha, *"Problematika Hubungan Antar Ummat Beragama; Tinjauan tentang Hubungan Antagonistik Hindu-Muslim dan Implikasinya terhadap Rendahnya Mobilitas Minoritas Muslim di India"*, dalam *Akademika*, Volume 05, No. 1 (September 1999).

Hidayat, Komaruddin & Hendro Prasetyo, *"Menilik Dinamika IAIN: Sebuah Pengantar"*, dalam *Problem & Prospek IAIN*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.

Hikam, Muhammad A.S., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.

Hooker,MB.,*Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Bandung: Jakarta, 2002.

Hosen, Nadirsah, *Islam Yes, Khilafah No: Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa al-Rasyidin hingga Umayyah*, Yogyakarta: Suka Press, 2018, Cet. III.

Huda, Afton Ilman, *Biografi Mbah Siddiq*, Jember: Pon. Pes.Al-Fattah, Tt.

Hudijono, Anwar, *".K.H. Achmad Siddiq: Akar Menghujam-Batang Menjulang"*, dalam *Harian Surya*, 25 Januari 1991.

Jawa Pos, 25 Januari 1991.

Kartanegara, Mulyadi, *Pengantar Epistemologi Islam*, Bandung: Mizan, 2003.

Kuntowijoyodkk.,*Begawan Jadi Capres: Cak Nur Menuju Istana*, Jakarta: KPP Paramadina, 2003.

"*Kyai Achmad*", dalam *AULA: Risalah NU*,Surabaya: PWNU Jatim, Pebruari 1991, No. 02, Tahun XIII.

Latif, Yudi, "*Tafsir Sosiologis atas Piagam Madinah*", dalam Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana (ed.), *Islam, Ham, dan Keindonesiaan: Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama*, Jakarta: Maarif Institut & nzaid, 2007.

Maarif,Ahmad Syafii,*Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*,Jakarta: LP3ES, 1985.

Madjid, Nurcholis, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, Jakarta: Paramadina,1992, Cet. 2.

Madjid, Nurcholish, "Islam Indonesia Menatap Masa Depan: Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Waljama'ah", dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2015, Cet. II.

Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Kita: Aspirasi Umat Islam di Indonesia*, Jakarta: Leppenas, 1983.

Mangkusasmito, Prawoto, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*,Jakarta: Hudaya, 1970.

"*Mengenal K.H. Achmad Siddiq*", dalam *Zaman*, 2 Pebruari 1985, h. 43.

Muniron dkk.,*Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jember: STAIN Jember Press, 2010.

Na'im, Ngainun, "Ilsam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid", dalam *Epistemé*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.

Nasution, Harun, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Nasution,Harun,*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1-2*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, Cet. 1.

Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, Cet. 5.

Nasution, Harun, *The Islamic State in Indonesia*, M.A. Thesis, Montreal: McGill University, 1965.

Natsir, M., *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2001.

Ni'am,Syamsun & Anin Nurhayati, *Tasawuf Kebhinnekaan Perspektif Sufi Nusantara*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2018.

Ni'am, Syamsun, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membeumikan Tasawuf*, Jakarta: Erlangga Press, 2009.

"Nilai-nilai Pancasila pada Masa Reformasi-Sekarang", dalam https://muhammadmukhyar.blogspot.com/2014/01/nilai-pancasila-pada-masa-era-reformasi.html, diakses 16 Agustus 2018.

Noeh, Munawar Fuad dan Mastuki HS. (ed.), *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, Jakarta: Logos, 1999, Cet. I.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Noorsena, Bambang, "*Pancasila: Dari Puncak Kejayaan Majapahit hingga Pidato Bung Karno 1 Juni 1945*", dalam http://jbohanor.wordpress.com/2018/06/01, diakses tanggal 3 Juni 2018.

Nubowo, Andar, "*Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi*", Jurnal Keamanan Nasional Vol. I, No. 1 2015.

Nurisman, *Pemikiran Filsafat Islam Harun Nasution: Pengembangan Pemikiran Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2012.

"*Pancasila dalam Pemikiran Nurcholish Madjid*", dalam https://www.qureta.com/post/pancasila-dalam-pemikiran-nurcholish-madjid, diakses 9 Agustus 2018.

Qomar, Mujamil, *Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2012.

Qomar, Mujamil, *NU "Liberal": Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*,Bandung: Mizan, 2002, Cet. 1.

Rachman, Budhy Munawar, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Bandung: Mizan dan Yayasan

Waqaf Paramadina Center for Sprituality and Leadership (CSL), 2006.

Rahardjo, M. Dawam, Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim, Bandung: Mizan, 1993.

Rakhmat, Jalaluddin, "*Nurcholish Menurut Tuparev*", dalam Sukandi A.K. (peny.), *Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ridwan, Nur Khalik, *NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Saiful Mustofa (*Peny.*), *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI,*Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.

Salim, Hairus HS.dan Ridwan Fakla AS., "*K.H. Achmad Siddiq: Pemikiran Keagamaan dan Kenegaraannya*", dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS. (ed.), *Biografi 5 Ra`is 'Am Nahdlatul Ulama: K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syansuri, K.H. Ali Ma'shum, dan K.H. Achmad Siddiq*, Yogyakarta: LTN-NU-Pustaka Pelajar, 1995, Cet. I.

Sampono, Nono, "*Revitalisasi Nilai-Nilai Keindonesiaan Dan Ideologi Pancasila Dalam Konteks Sistim Keamanan Nasional Menghadapi Tantangan Global*", Disampaikan dalam *Sarasehan Pusbintal Mabes TNI Cilangkap*, Rabu, 28 Oktober 2015.

"*Selamat Jalan Cucu Joko Tingkir*", dalam *Berita Buana*, 24 Januari 1991.

Shihab, Muhammad Asad, *Hadlratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari: Perintis Kemerdekaan Indonesia*, Terjemah K.H. A. Musthafa Bisri, Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1994.

Siddiq, K.H. Achmad, "*Hubungan Agama dan Pancasila*", dalam *Makalah untuk Pertemuan Ilmiah "Peranan Agama dalam Memantapkan Ideologi Negara"* yang Diselenggarakan oleh Balitbang Agama Departemen Agama RI. di Jakarta, 14-15 Maret 1985.

Siddiq,K.H. Achmad, "*Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam*", *Makalah* yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an.

Siraj, Said Agil, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

Siraj, Said Agil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*, Bandung: Mizan, 2006.

Siraj, Said Aqil, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin*, Jakarta: LTN NU, 2014.

Siswanto, "*Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan*", dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1 Juni 2017.

Soebahar, Abdul Halim, "*Arsitek Pemikiran Islam Indonesia (Catatan Biografi K.H. Achmad Siddiq)*" dalam *Penelitian*, Jember: Juli 2001.

Soekarno, "*Lahirnya Pancasila*", dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi*, Jakarta: DPA, 1961.

Sukma, R. & C. Joewono (ed.), *Islamic Thought and Movements in Contemporary Indonesia, Centre for Strategic and International Studies*, 2007.

Sulaiman, Dedek, "*Deideologi Politik Islam (Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakukan Azas Tunggal)*", dalam *Skripsi*, Jakarta: UIN Syahid Jakarta, 2008.

Suminto, Aqib, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70tahun Harun Nasution*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1989.

Sumitro, Warkum dan Kawan-kawan dalam Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia, 2014.

Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, Tt.

Supriadi, Cecep, "*Relasi Islam dan Negara: Wacana Islam dan Keindonesiaan*", dalam *Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015.

Surahman, Susilo, "*Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid*", dalam *JURNAL DAKWAH*, Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2010.

"Survei: 40,82 Persen Pelajar Bersedia Menyerang Orang yang Menghina Islam", dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/survei-4082-persen-pelajar-bersedia-menyerang-orang-yang-menghina-islam.

Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Thoha, Zainal Arifin, "*Kenylenehan Gus Miek dan Budaya Semaan al-Qur'an*", *dalam Runtuhnya Singgasana Kiai (NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian tak Kunjung Usai)*,Yogyakarta: Kutub, 2003.

Ubaedillah, A. & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Penerbit Prenada Media Group, 2013, Cet. 10.

Umam, Saiful, "*K.H. A. Wahid Hasyim: Muslim Demokrat Peletak Fondasi Departemen Agama*", Yanto Bashri & Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, Yogyakarta: LKiS, 2009, Cet. II.

Wadayati, Heni Wahyu, "*Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan*", *Jurnal Dakwah*, Vol. X No. 2, (Juli-Desember 2009).

Wahid, Abdurahman, "*Negara Berideologi Satu, Bukan Dua*", dalam Buku *Islamku, Islam Anda,Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Wahid, Abdurahman, "*Pancasila sebagai ideologi dalam kaitannya dengan kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*", *Makalah seminar* yang dilaksanakan oleh kelompok studi Pengembangan Pemikiran Pancasila dan UUD 1945 BP-7 Pusat pada tanggal 24-26Oktober 1989 di Jakarta. Dibukukan Oetojo Oesman dan Alfian (penyunting), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991, Cet. 2.

Wahid,Abdurrahman,"*Islam:PunyakahKonsepKenegaraan?*",dalam Shaleh Isre (ed.) *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LkiS, 2000.

Wahid, Abdurrahman, "*Kata Pengantar*" dalam Einar Martahan Sitompul, *NUdanPancasila*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989.

Wahid, Abdurrahman, "*Musuh dalam Selimut*", dalam Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam*, Jakarta: The Wahid Institut & Ma'arif Institut, 2009.

Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institut dan Ma'arif Institut, 2009.

Wattimena, Abd Khair, "*Upaya Penegasan Islam Kebangsaan: Kajian Perppu UU No. 2 Tahun 2017*", dalam Saiful Mustofa (*Peny.*), *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.

Wellek, Rene & Austin Warren, *Teori Kesusasteraan*, Jakarta: Gramedia, Tt..

Widjojo, Muridan S., "*Wacana Politik Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998*", dalam Muridan S. Widjojo (ed), *Penakluk Rezim Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat press, 2002.

Yunita, Niken Widya, "*Ketua MPR Bicara Soal Pancasila yang Mulai Ditinggalkan*," 29 April 2017, https://news.detik.com/berita/d-3487755/ketua-mpr-bicara-soalpancasila-yang-mulai-ditinggalkan, diakses pada 20 Mei 2017.